



RENSTRAJAK

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2025

Penerbit:

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ISSN 3063-8364



9 773063 836053

**BULLETIN****RENSTRAJAK**

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2025

“Dari sisi pemerintah daerah (dalam kajian nanti) kita perlu memetakan apa saja yang perlu dilakukan penguatan sehingga menghasilkan layanan perizinan yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang”

DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.PD
(KEPALA BSKDN KEMENDAGRI)

**KAJIAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA**

**FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) DENGAN TEMA ISU-
ISU STRATEGIS DALAM SISTEM KEPEMILUAN DI
INDONESIA**

VISI

Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif

MISI

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (research based policy);
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mewujudkan kelembagaan Strategi Kebijakan yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

BULLETIN RENSTRA JAK

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2024



DITERBITKAN OLEH :

**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri**

ALAMAT REDAKSI :

**Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

E-MAIL :

bskdn@kemendagri.go.id

WEBSITE :

bskdn.kemendagri.go.id/website

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

PENASEHAT :

Dr. Yusharto Huntounggo, M.Pd

PENANGGUNG JAWAB :

Dr. Noudy R.P Tendean, S.IP, M.Si

PIMPINAN REDAKSI :

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

SEKRETARIS REDAKSI:

Rachman Kosasih, S.T

REDAKTUR PELAKSANA:

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

TIM REDAKSI:

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

Rachman Kosasih, ST

Yos Saputra, S.Kom

Adi Nugraha, S.Stat

Tito Dwian Maulana, S.Stat

Sindy Tervia, S.Stat

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Gogo Ricky Martin Purba, S.Tr.IP.

Annisa Putri Riyanto, S.IP.

Dea Afdila, S.Tr.IP.

Toriq Dwi Citra Permata, S.Tr.IP.

Ferry Pradana, S.Tr.IP.

Zaeb Awaluddin Zikri, S.Tr.IP.

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

Dwi Indarti, S.Kom.

Lina Widayanti, A.md.Ak.

Rina Yuliana, SE.

Supriyoko, SE.

TIM KREATIF DESAIN:

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

Fajar Haramukti, S.Sn.

Sandy Prasetyo S.Kom.

Haryanto, ST

PENYUNTING:

Rachman Kosasih, ST

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Adi Nugraha, S.Stat

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Bulletin Renstrajak BSKDN Kemendagri yang berbahagia,

Pertama tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat dan rahmatnya kita dapat menerbitkan bulletin edisi Pertama pada bulan Januari s.d Maret tahun anggaran 2025. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sebagai lembaga yang berdedikasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat. Melalui kajian serta analisis mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kebaruan dan relevan untuk keberhasilan dalam menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai proses penelaah kaidah keilmuan serta prinsip-prinsip praktik penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, efektif dan melayani.

Adapun beberapa kegiatan utama di edisi ke Pertama pada bulan Januari s.d Maret tahun anggaran 2025, antara lain Kajian Pengentasan Kemiskinan melalui Kemudahan Perizinan Berusaha dan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia.

Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri tertuang dalam Bulletin Renstrajak, disusun agar memudahkan semua pembaca dalam proses dan hasil kegiatan. Kami Bagian Perencanaan berharap agar Bulletin Renstrajak BSKDN Kemendagri dapat menghasilkan informasi yang telah terdokumentasi secara lengkap. Bulletin ini tentunya butuh dukungan dari semua pihak untuk dapat menjaga konsistensi dan kualitas.

Selamat membaca Bulletin Renstrajak untuk mengetahui kegiatan pada Bagian Perencanaan.

Salam Planner.



**Kepala Bagian Perencanaan,
Tomy Veryanto Bawulang, M.Ed.,Lead, Ph.D.**

1

susunan umum

Susunan Dewan Redaksi	1
Pengantar Redaksi	2
Daftar Isi	3
Literasi Perencanaan	4

2

KEGIATAN UTAMA

Kajian Pengentasan Kemiskinan melalui Kemudahan Perizinan Berusaha	5
Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia	6



3

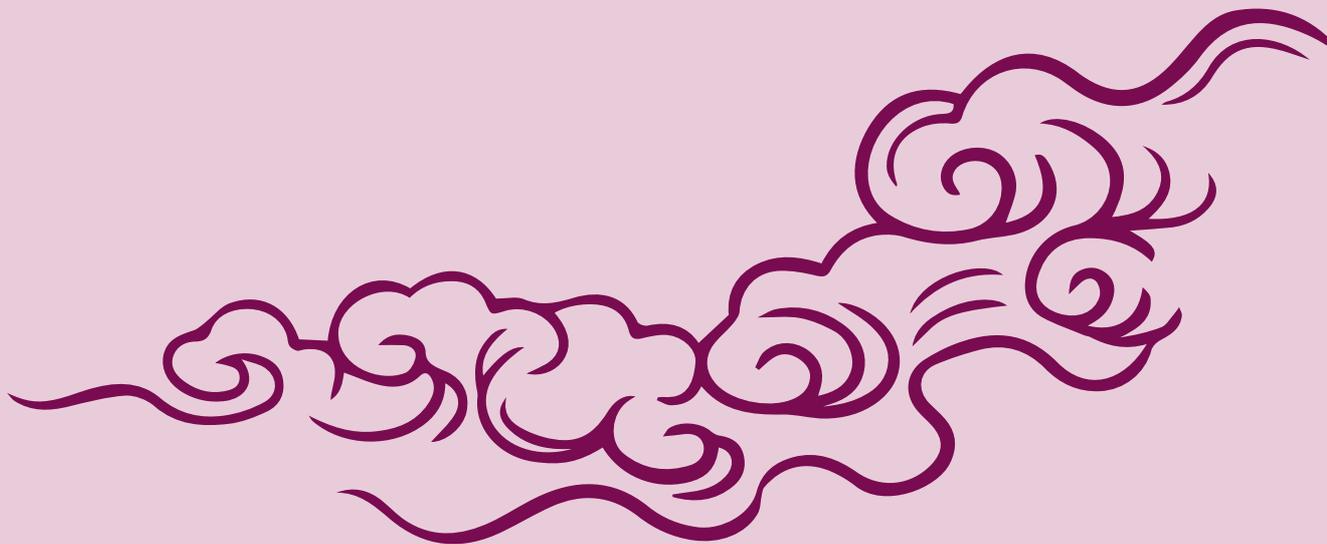
SERBA SERBI BAGREN

Serba Serbi Januari	7 - 44
Serba Serbi Februari	45 - 89
Serba Serbi Maret	90 - 125

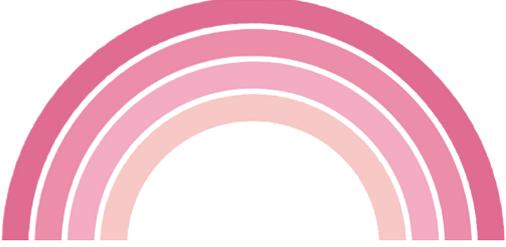
4

INFO BAGREN

Artikel Bagren	126 - 133
Galeri Bagren	134 - 135
Kuliner Nusantara	136 - 137



Literasi Perencanaan



Perencanaan secara luas adalah suatu proses yang melibatkan penentuan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Proses ini bersifat sistematis dan terstruktur, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sumber daya, waktu, serta faktor internal dan eksternal.

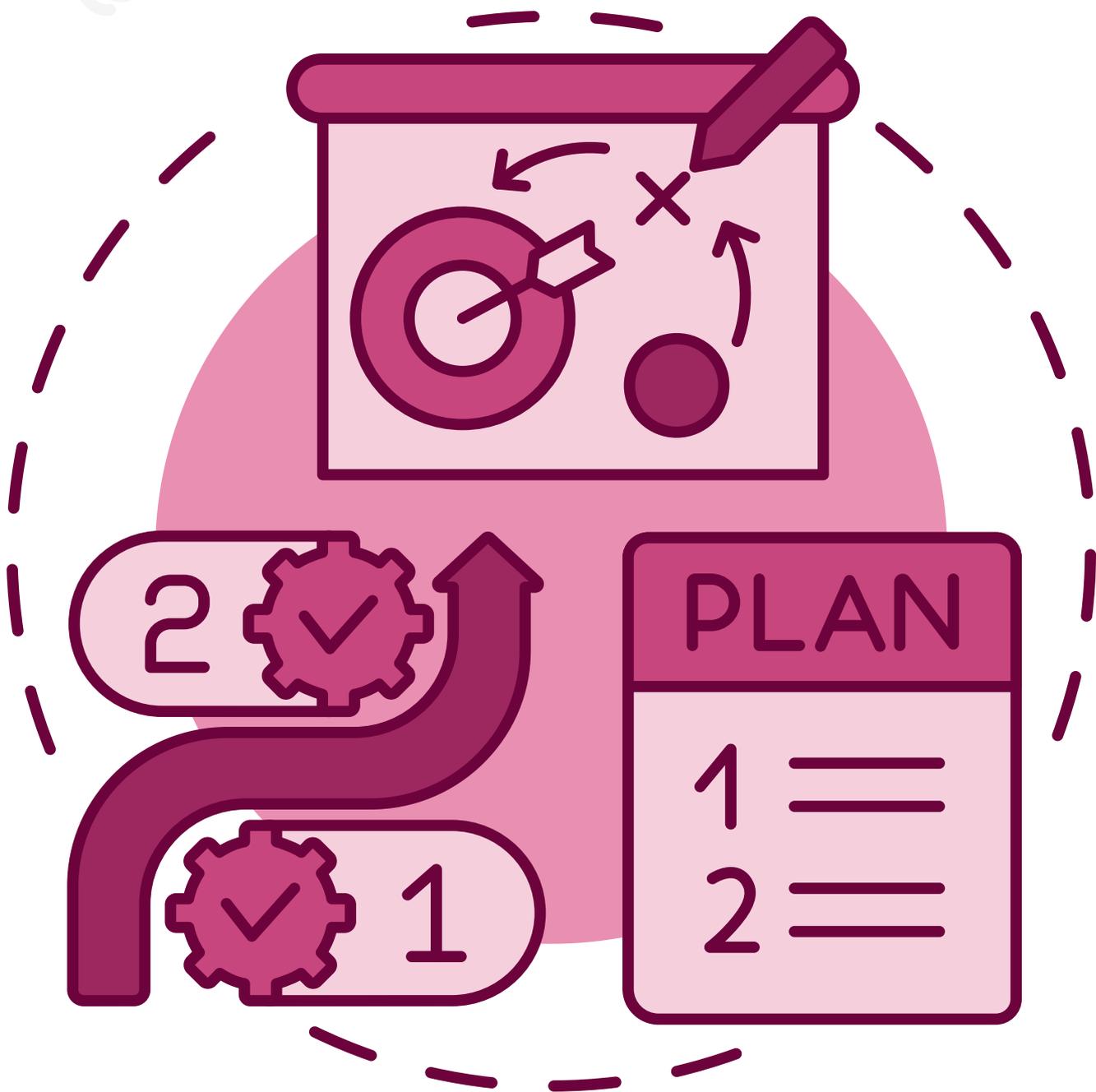
Perencanaan dalam pemerintahan dalam negeri adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan ini mencakup penentuan visi, misi, sasaran, serta alokasi sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri umumnya berfungsi untuk merumuskan, merencanakan, dan mengoordinasikan kebijakan - kebijakan strategis yang berkaitan dengan urusan dalam negeri. TUSI Bagren di atur dalam Permendagri 137 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri

Hal tersebut diatur dalam Pasal 701 Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penataan sistem dan prosedur, sistem pengendalian intern pemerintah serta penyusunan laporan kinerja evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama, dan penyiapan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 702 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- penyiapan bahan dan pengelolaan data dan informasi, monitoring program dan anggaran, evaluasi kinerja serta sistem pengendalian intern pemerintah;
- penataan sistem dan prosedur, serta penyusunan laporan kinerja; dan
- penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama, serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang - undangan dan produk hukum.



Dorong Akselerasi Penurunan Kemiskinan, BSKDN Kemendagri Siapkan Kajian Permudah Perizinan Usaha

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen mendukung percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menyusun kajian untuk mempermudah perizinan usaha di daerah, sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan kemudahan berusaha di tingkat daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Dibutuhkan kajian yang menggambarkan peran Kemendagri dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini kita perlu memberikan masukan strategi kepada Mendagri guna meningkatkan perizinan berusaha untuk mengcover penduduk miskin dan menumbuhkan perekonomian daerah," ungkap Yusharto saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Kemendagri pada Jumat 3 Januari 2025.

Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, proses perizinan yang rumit dan memakan waktu lama menjadi salah satu hambatan utama bagi daerah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Dia menegaskan, perizinan yang berbelit-belit tidak hanya menghambat masuknya investasi, tetapi juga mempersulit pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Padahal, UMKM merupakan pilar penting perekonomian daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.



"Sementara itu dari sisi pemerintah daerah (dalam kajian nanti) kita perlu memetakan apa saja yang perlu dilakukan penguatan sehingga menghasilkan layanan perizinan yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong daerah untuk melakukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerapan sistem yang lebih transparan, cepat, dan berbasis digital. "Ini tidak hanya terbatas pada perizinan berusaha, tapi berlaku pada semua jenis perizinan," tambahnya.

Menurut Yusharto, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, dibutuhkan untuk mewujudkan layanan perizinan yang lebih mudah.

Yusharto pun mengimbau agar pemerintah daerah mengadopsi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan layanan publik, termasuk dalam proses perizinan. Menurut dia, hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. "Kita perlu sistem yang terintegrasi, sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien dan akuntabel".



Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia

Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 16.00, Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP, M.A, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan dihadiri oleh perwakilan pejabat struktural dan fungsional.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia" di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya diskusi berbasis ilmiah dan partisipasi publik sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Dia mengatakan diskusi ini merupakan kick-off dari rangkaian pertemuan selanjutnya yang melibatkan daerah.

"Saya akan memandu agar waktu berjalan efektif, karena kita membutuhkan betul-mungkin ini bukan pertemuan yang pertama, nanti akan ada serangkaian ada FGD dan kita ingin sekali agar teman-teman di daerah juga bisa terlibat," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga menyoroti beberapa isu strategis kepemiluan yang perlu didalami. Hal itu seperti pertanyaan soal revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada apakah akan berada di bawah payung omnibus law politik atau cukup fokus pada dua undang-undang tersebut. Kemudian, juga terkait presidential threshold dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan semua partai politik mencalonkan presiden.



Ada pula isu manfaat dan dampak pilkada langsung dibandingkan dengan pilkada melalui DPRD, khususnya terkait biaya politik yang tinggi, hingga keserentakan pemilu dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik.

“Kita ingin kita agar bisa fokus ke isu-isu utama, tapi kalau nanti ada tambahan silakan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Dia mengatakan melalui FGD tersebut, pihaknya optimistis dapat terus menggali dan memetakan permasalahan utama yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai informasi, dalam forum tersebut BSKDN Kemendagri menghadirkan sejumlah pakar yang memiliki perhatian terhadap isu kepemiluan.

"Salah satu tujuan dari kegiatan ini yakni mengeksplorasi bentuk model demokrasi dan sistem kepemiluan yang ideal, sesuai dengan nilai-nilai budaya, karakteristik masyarakat Indonesia dan tuntutan globalisasi," jelas Yusharto. Sebagai informasi, dalam forum tersebut BSKDN Kemendagri menghadirkan sejumlah pakar yang memiliki perhatian terhadap isu kepemiluan.

Mereka di antaranya Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Mujani; Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati; Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy N.S. Umboh; serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam International Indonesia (UIII) Philips J.



Serba Serbi Januari

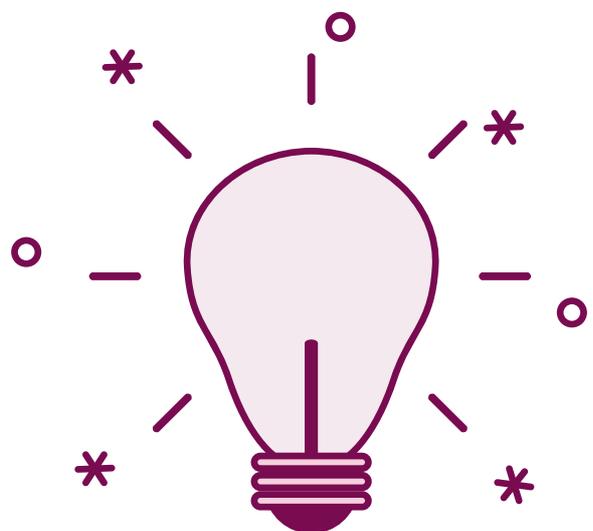
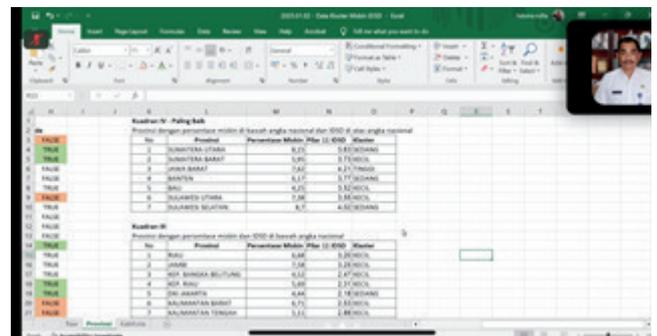
Rapat Persiapan Kajian Pengentasan Kemiskinan melalui Kemudahan Perizinan Berusaha

Rapat dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Bapak Plh. Sekretaris BSKDN dan dihadiri oleh seluruh Tim Penyusun Kajian Pengentasan Kemiskinan

Pada rapat dilaksanakan pembahasan terkait penyusunan konsep awal instrumen survey untuk dilaksanakan pengumpulan data di daerah, serta dilaksanakan diskusi seputar klasifikasi daerah berdasarkan tingkat kemiskinan yang disandingkan dengan jumlah penduduk

Pembahasan konsep awal kajian akan menjadi bahan untuk diskusi lanjutan bersama tim eksternal lintas komponen di lingkungan Kemendagri. Untuk mendukung giat dimaksud, masing-masing Pusat diminta untuk menyiapkan anggaran dalam rangka pelaksanaan penyusunan kajian dan perjalanan dinas antar kota selama lima hari untuk pengumpulan data lapangan

Tim melaksanakan pendalaman dan pematangan konsep kajian untuk mempersiapkan pelaksanaan pengumpulan data lapangan dan persiapan analisis data guna menghasilkan rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui kemudahan izin berusaha.



Rapat Lanjutan Penyusunan Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Kemudahan Perizinan Berusaha

Rapat dilaksanakan di ruang command center dan dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN, pukul 14.00 s.d 18.00

pada rapat dilaksanakan pembahasan strategi kebijakan yang perlu dilaksanakan penelaahan lebih lanjut terkait perampingan alur Perizinan Berusaha agar syarat tambahan dapat disederhanakan. Terkait analisis SOP yang belum terintegrasi, membahas dan mengevaluasi rumusan masalah mengenai pengentasan kemiskinan melalui kemudahan perizinan, dan membahas OSS.

Selanjutnya akan dilaksanakan rapat teknis tindak lanjut mengenai pelaksanaan pengumpulan data pada lokus yang akan ditentukan berdasarkan kriteria yang mewakili karakteristik wilayah, baik wilayah dengan jumlah penduduk tinggi dan rendah, wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi dan rendah, serta wilayah dengan pencapaian Indeks Daya Saing yang tinggi dan rendah. Juga akan ditentukan komposisi personil dari Tim Kerja yang bersifat lintas komponen yang akan melaksanakan pengumpulan dan analisis data.



Serba Serbi Januari

Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rapat dilaksanakan di ruang sidang utama (RSU) gedung A Lt.3 Kemendagri pukul 14.00 s.d 18.00.

Pada rapat dilaksanakan pembahasan terkait penyusunan konsep awal instrumen survey untuk dilaksanakan pengumpulan data di daerah, serta dilaksanakan diskusi seputar klasifikasi daerah berdasarkan tingkat kemiskinan yang disandingkan dengan jumlah penduduk

Terdapat beberapa poin yang dibahas pada rapat ini:

- Terkait peningkatan hak terkait sertifikat tanah , izin air tanah
- Permasalahan pelayanan yang terkendala di daerah atau pusat
- Masalah operator daerah terkendala dari pusat
- Pembekalan terkait materi atau pertanyaan yg disampaikan
- Melakukan crosscheck dalam tabulasi data (13-16) data dapat atau tidak

- Membuat saran untuk bapak menteri tindak lanjut yang harus dilakukan setelah ada kajian ini
- Membahas ruang lingkup semua layanan berusaha
- Arahan untuk menyiapkan pembekalan di bskdn (konstruksi sesuai KBLI) narasumber pemberian izin
- permasalahan terkait usaha usaha
- Melakukan penyempitan instrumen terkait izin izin tertentu



- mengkaji perizinan di 10 daerah utama ekonomi indonesia (jangan sampai lokus tidak memiliki efek terkait kajian kita)
- KBLI bisa jadi ada 2 KEMANTAN DAN KEMENPERIN (pelaku usaha akan memilih yang mudah)
- Terdapat aturan sektor yang belum klop di KBLI
- Penentuan lokus tidak hanya perkotaan karena sudah tidak banyak masalahnya
- Pelaksanaan pengurusan persyaratan dasar terlalu terpusat (kewenangan banyak ditarik dipusat, contoh LH dan Pertambangan)

- Inovasi di daerah terkurung mandatory spending, dana dari apbd habis untuk operasional dan pegawai
- Harus ada penyempurnaan instrumen, pemilihan lokus

Dengan adanya tindak lanjut dari rapat ini, diharapkan regulasi perizinan dan layanan usaha dapat lebih efektif, hambatan dalam pelayanan dapat diminimalisir, serta inovasi di daerah dapat berkembang guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.



Serba Serbi Januari

Rapat Pembahasan Finalisasi Pedoman Lapangan Kajian Cepat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Tahun 2025 Dan Instrumen

Rapat dilaksanakan pkl. 10.30 s.d 18.00 di Ruang Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan.

Bagian Perencanaan memaksimalkan panduan untuk dapat disosialisasikan. Tinjauan terhadap PP Nomor 6 Tahun 2021 terkait perizinan berusaha, Tim PTSP Bina ADWIL memfokuskan perizinan dasar serta melakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM).

Diperlukan surat keseluruhan dan surat khusus. Lokasi kajian berdasarkan hasil pengolahan dari kriteria jumlah penduduk tingkat kemiskinan dan kapasitas fiskal daerah didapatkan 15 lokasi yang terdiri dari tiga Provinsi, tiga lokus Kota dan sembilan Kabupaten. Lampiran disiapkan untuk dikirim perdaerah atau locus.

Kemenkop menganjurkan agar UMKM mempunyai NIB dan izin usaha, namun di beberapa daerah hanya mewajibkan NIB berdasarkan kategori risiko. Pertanyaan-pertanyaan dasar tidak perlu dipertanyakan karena tim yang turun lapangan sudah harus paham, jika terdapat regulasi yang belum update tim diminta untuk mengkonfirmasi regulasi yang mengatur perizinan berusaha.



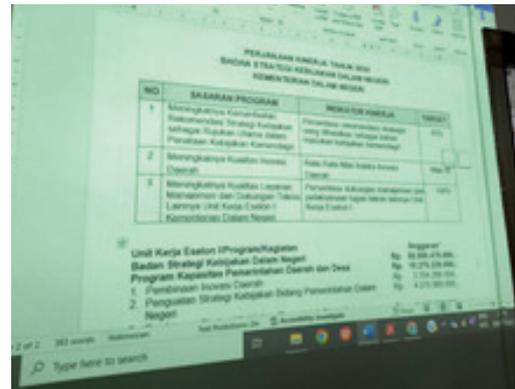
Rapat Konfirmasi dan Finalisasi Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 lingkup Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 11.00 s.d 12.30 WIB di Lantai 6 Gedung B Kemendagri, yang dipimpin oleh Perencana Ahli Muda, serta dihadiri perwakilan dari UKE 1 lingkup Kemendagri.

Biro Perencanaan Kemendagri memberikan informasi terkait adendum PK TA 2024 untuk penyesuaian dengan perubahan dokumen Renstra Kemendagri TA 2020-2024.

Dari beberapa indikator kinerja utama dan program di lingkup BSKDN, telah disesuaikan dengan revisi dokumen Renstra Kemendagri. Setiap pimpinan komponen diharapkan untuk dapat menandatangani dokumen adendum PK 2024 dan PK 2025.

Bagian Perencanaan akan menindaklanjuti arahan penyesuaian dokumen PK TA 2024 dan PK TA 2025 lingkup BSKDN.



NO	SARAN PROGRAM	REVISI PERJANJIAN KINERJA	TAMBAH
1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Strategi Kebijakan sebagai Tuntutan Proses Reformasi Kelembagaan Kementerian	Penyempurnaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja menengah untuk mendukung pencapaian sasaran	10%
2	Meningkatkan Kualitas Sistem Layanan	Kata Kunci Baru Sistem Layanan	10%
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Dukungan Teknis Lainnya (misal: Kerja Sama, Kerja Sama, Kerjasama Dengan Negara)	Penyempurnaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja menengah untuk mendukung pencapaian sasaran	10%

Unit Kerja Eselon I (Program/Regulasi)
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Program Kemitraan Pemertahanan Daerah dan Desa
1. Pemertahanan Eselon Daerah
2. Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemertahanan Daerah
Negeri

Anggaran
Rp. 80.000.000.000
Rp. 10.000.000.000
Rp. 1.000.000.000
Rp. 4.000.000.000



Serba Serbi Januari

Rapat Koordinasi Kebijakan Blokir 50% Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Dalam Negeri

Rapat dilaksanakan pkl. 13.30 s.d. 15.40 WIB melalui virtual zoom meeting dipimpin Kepala Bagian Anggaran Biro Perencanaan.

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Blokir 50% Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk pencermatan terhadap kegiatan yang dilakukan pemblokiran anggaran perjalanin dimaksud agar seluruh program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan tercapai targetnya.

Kegiatan renovasi bangunan pada 6 UKE I (Setjen, IPDN, Itjen, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Dukcapil, dan BSKDN), blokir sebesar Rp.8.620.570.000,- dikarenakan belum dilengkapi dengan Interpolasi.

Blokir Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.343.941.327.000,- dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden (Total Rp.1.799.316.796.000,- termasuk pada akun belanja perjalanan dinas).

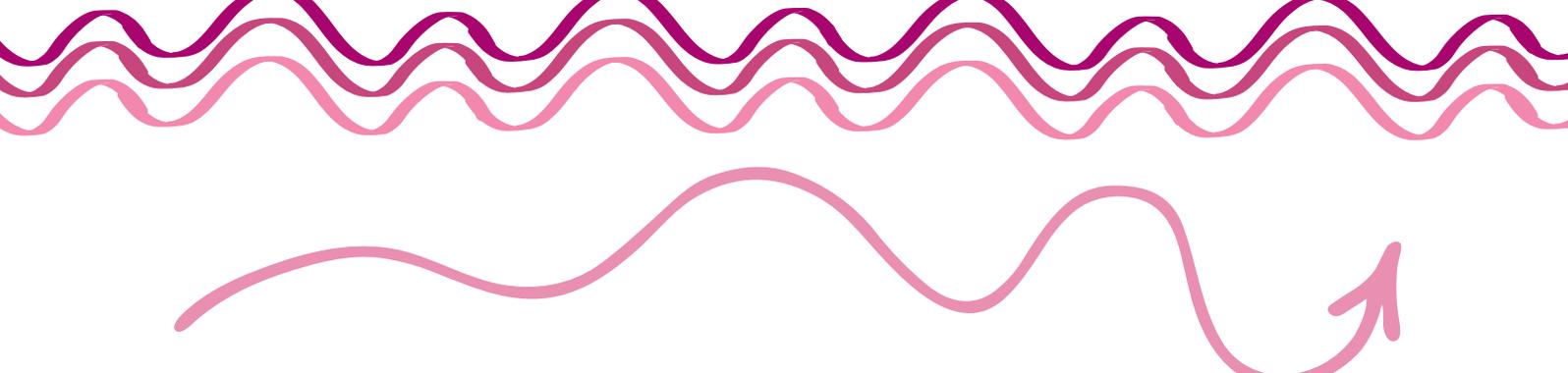
Belanja TIK pada 8 UKE I (Setjen, Itjen, Ditjen Bina Adwil, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Otda, Ditjen Dukcapil, dan BSKDN), blokir sebesar Rp.1.411.403.963.000,- dikarenakan belum diterbitkannya clearance dari Komdigi, KemenPANRB, dan Bappenas.

Total Pagu Blokir Anggaran BSKDN 2025 Rp 5.729.112.000 mencakup:

- Interpolasi: Rp 200.000.000
- Belanja TIK: Rp 100.000.000
- Perjalan Dinas: Rp 5.429.112.000

Biroren akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait Pematangan 50% anggaran penghematan dan output yang diharapkan.





Rapat Pembahasan Strategi kebijakan Penurunan Kemiskinan Melalui Percepatan dan Kemudahan Perizinan Berusaha

Rapat dilaksanakan pkl.14.00 s.d 17.30 di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri, yang dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

Agenda: Bimbingan teknis/persiapan teknis dalam kegiatan di lapangan. Dasar konsepsi: merapikan tumpang tindih sebagai signifikansi kajian dari perizinan berusaha di daerah.

Setiap lokasi tim BSKDN akan tersebar untuk di setiap lokasi dan setiap hari akan dilakukan tabulasi data. Link untuk tabulasi tersebut sudah disediakan.

Desain Instrumen masih memiliki ruangan tersedia untuk melakukan perubahan. Kendala yang dimiliki adalah non teknis dalam mendesain instrumen. Bantuan narasumber agar BSKDN lebih fokus. Dengan mempertimbangkan waktu dalam 3 hari diharapkan bimbingan teknis dapat membantu jalannya program kerja yang akan dilaksanakan.

Terdapat 20 Instrumen akan digunakan sebagai pedoman dalam wawancara untuk memandu pengajuan pertanyaan serta analisis jawaban responden secara sistematis.

Terdapat beberapa saran,yakni: kuesioner bisa dibuat lebih sederhana, menghindari terlalu lama waktu yang digunakan untuk mencari data dibanding menganalisis data kuesioner. melihat instrumen dahulu karena kemungkinan permasalahan ada di internal sehingga membutuhkan 1 data, yaitu melihat apakah ada kendala dalam penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha di daerah.

Rapat yang dilaksanakan pada hari ini sebagai langkah awal Kemendagri untuk menuntun serta terkait locus menjadi fase pertama dengan berkesinambungan karena output akan menjadi dasar untuk menggagas kegiatan seperti inflasi namun, tidak hanya inflasi tetapi juga pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Serba Serbi Januari

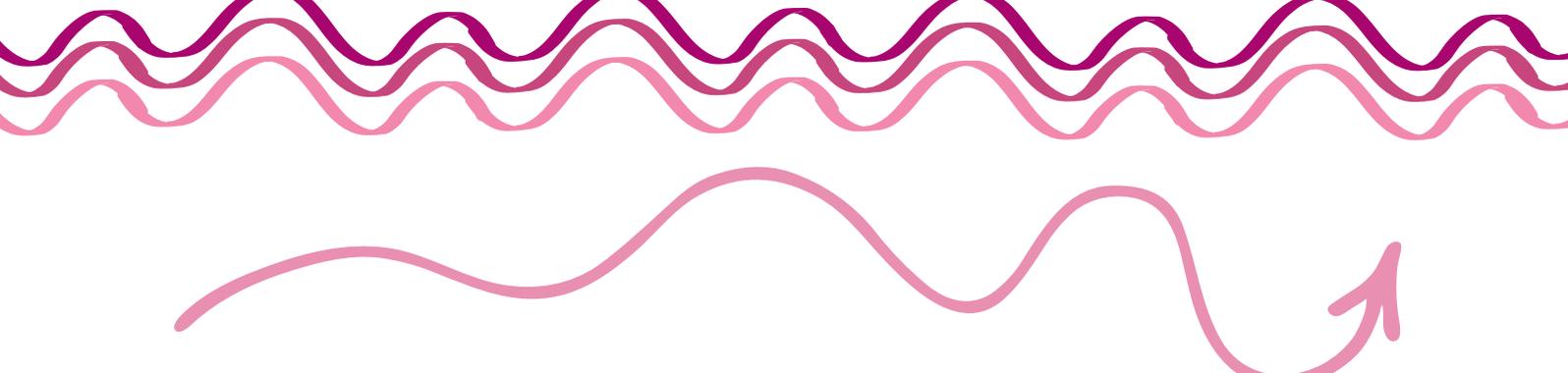
Rapat Sosialisasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan BSKDN

Rapat dilaksanakan pkl. 13.30 s.d 15.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Aula BSKDN yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris BSKDN dihadiri oleh Kepala Bagian SDMO, JFU Bagian SDMO, seluruh PPNPN Pusat dan Bagian, Pamdal dan OB.

Rapat tersebut bertujuan untuk memberitahukan lebih baik, lebih giat dalam bekerja segi PPNPN, pamdal, OB. Minggu depan akan ada proses surat perjanjian kerja yang akan diberikan ke pada seluruh PPNPN, pamdal, OB.

Untuk tahun depan akan ada pengurangan yang dilihat dari evaluasi kinerja pada tahun 2025, jadi mohon untuk kinerja ditingkatkan dalam segi aspek





Rapat Kick Off Reviu Baseline TA.2026 Dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA.2026

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB yang dipimpin oleh Plh. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri yang dihadiri oleh seluruh perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Angka Dasar Baseline adalah indikasi pagu prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan pagu indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.

Belanja operasional merupakan pengeluaran yang bersifat wajib untuk menjamin keberlangsungan proses kinerja instansi pemerintah, belanja operasional terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional.

Pada P3K tahap I akan memperoleh Ni pada bulan Maret 2025, sedangkan untuk tahap II masih berproses, penetapan P3K paruh waktu itu digunakan pada pegawai yg sudah bekerja lebih dari 2 tahun, sedangkan yg dibawah 2 tahun tidak bisa diakomodir.

Reviu Baseline TA.2026 dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA.2026 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 pkl. 09.00 WIB.

Bagian Perencanaan siap mengakomodir dalam proses reviu baseline tahun 2026 dengan dukungan dari data Pusat dan Bagian Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri.



Serba Serbi Januari

Rancangan Awal Rencana Kerja TA.2025 dan Reviu Baseline TA.2026

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 di Ruang Rapat Vidcon yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris BSKDN Kemendagri dan dihadiri oleh Perwakilan Pusat dan Bagian BSKDN Kemendagri.

Pembahasan terkait rapat Rencana Kerja Tahun 2025 dan Reviu Baseline Tahun 2026.

Program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dengan sasaran kegiatan:

- 1283 Meningkatnya Partisipasi Pemerintah Daerah Dalam Replikasi dan Difusi Inovasi Daerah secara Berkelanjutan
- Meningkatnya kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri
- Meningkatnya daerah yang mengalami peningkatan kualitas strategi kebijakan daerah dalam perumusan kebijakan

Program Dukungan Manajemen dengan sasaran kegiatan:

- 6128 terselesaikannya Layanan Legislasi dan Litigasi Lingkup BSKDN
- 6129 terselesaikannya Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Lingkup BSKDN Kemendagri
- 6130 terselesaikannya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik BSKDN Kemendagri
- 6131 terselesaikannya Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Strategi Kebijakan

Pagu Blokir BSKDN TA.2025 sebesar Rp. 5.729.112.000,- dari anggaran sebesar Rp.58.608.338.000,-. Pagu aktif BSKDN TA.2025 sampai saat ini sebesar Rp. 52.879.226.000,-

Diharapkan Pusat dan Bagian menyerahkan data dukung berupa TOR dan RAB Tahun 2026, data tersebut akan dipergunakan pembahasan pada penelitian Reviu Baseline TA.2026 bersama Biro Perencanaan Setjen Kemendagri



Penelitian Reviu Baseline T.A 2026 dalam rangka penyusunan pagu indikatif T.A 2026

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 10.00 s.d 15.00 WIB dipimpin oleh Analis Anggaran Ahli Muda Selaku Sub Koordinator pada Subbagian Penyusunan Anggaran III yang di hadiri oleh Perwakilan Bagian Perencanaan, Bagian SDMO, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Pusat Inovasi.

Penelitian Reviu Baseline TA.2026 bertujuan untuk koordinasi 001, 002, kepegawaian dan program prioritas dalam perhitungan pagu indikatif TA.2026.

Pegawai BSKDN TA.2024-2026 terdiri dari

- PNS tahun 2024 sebanyak 141, tahun 2025 sebanyak 145 dan tahun 2026 sebanyak 154
- CPNS tahun 2024 sebanyak 9, tahun 2025 11 (formasi umum)
- P3K tahun 2024 sebanyak 1, tahun 2025 sebanyak 57 dan tahun 2026 sebanyak 56

- PPNPN tahun 2024 untuk Pamdal sebanyak 14, tahun 2025 sebanyak 14 dan tahun 2026 sebanyak 14. Pengemudi tahun 2024 sebanyak 9 tahun 2025 9 dan tahun 2026 9. Administrasi tahun 2024 sebanyak 46. Teknisi tahun 2024 sebanyak 5. Kesehatan tahun 2024 sebanyak 2 dan Kebersihan tahun 2024 sebanyak 12, tahun 2025 sebanyak 13, tahun 2026 sebanyak 13.

Pada perhitungan 001 untuk perhitungan anggkatan 32 dan 33 diharapkan dihilangkan terlebih dahulu, jadi nanti tolong perubahannya disampaikan kembali. Gaji pada Paruh waktu, Pamdal, dan OB akan di outsourcing.

Program prioritas nasional pada kegiatan inovasi akan memastikan kembali output IKK 2 Jumlah daerah yang menerapkan inovasi tematik berdasarkan isu aktual strategis untuk target 510 Daerah.

Serba Serbi Januari

Rapat Pengelolaan Keuangan BSKDN Kemendagri TA.2025

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB di Ruang Rapat Vidcon dipimpin oleh Kepala BSKDN Kemendagri yang dihadiri oleh Kepala Bagian Keuangan, Perwakilan Bendahara BSKDN Kemendagri.

Nilai IKPA BSKDN pada pengelolaan UP TUP bulan Desember 2024 sebesar 90,40 dengan nilai komponen persentase GUP sebesar 80,15 terdapat 11 kali revolving UP dan rata-rata revolving UP dalam 1 tahun sebesar Rp. 209.967.613,- sehingga UP tahun 2025 hanya bisa disetujui sebesar Rp. 210.000.000,-. Adapun pembagian pada Pusat dan Bagian sbb:

- Pusat 1, Pusat 2, Pusat 3 dan Pusat 4 masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,-
- Bag.Umum sebesar Rp. 75.000.000,-, Bag. Ren sebesar Rp. 30.000.000,-, Bag. Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- dan Bag. SDMO sebesar Rp. 15.000.000,-

Diharapkan Pusat dan Bagian setiap bulan revolving mencapai 90% dari UP yang diterima.

Target realisasi bulan Juni 2025 BSKDN sebesar 50%. Pusat dan Bagian terdapat rencana besar dengan rincian:

- Pusat 1 kegiatan Permendagri IKKD harus selesai bulan September
- Pusat 2 kegiatan ITKPD harus selesai bulan Agustus
- Pusat 3 bulan Oktober kegiatan IPKD
- Pusat 4 bulan November minggu ke - 2 kegiatan IGA



Konfirmasi data Unit Kerja Eselon I pada Aplikasi e-Monev Bappenas TW IV TA.2024 dan Pemutakhiran Data Capaian Kinerja Prioritas Nasional TW IV TA.2024

Rapat dilaksanakan via zoom meeting
pkl. 13.30 s.d 14.30 WIB.

- Pelaporan komponen BSKDN sudah lengkap 100% 55.559.478.000
- BSKDN merupakan satu-satunya UKE I yang telah melaporkan pelaporan kinerja kegiatan
- BSKDN memiliki pelaporan indikator sejumlah 25 dan telah dilaporkan sebanyak 25, lengkap.
- BSKDN telah melaporkan level rincian output
- BSKDN telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan mendapatkan apresiasi



Rekapitulasi UKE I yang Telah Menyampaikan Capaian Strategis s.d. TW IV TA. 2024			
No	UKE I	Tercapai	Belum
1	Angin		
2	Angin		
3	Angin Pagi		
4	Angin Bina Adabi		
5	Angin Bina Keluarga		
6	Angin Bina Bangsa		
7	Angin Kita		
8	Angin Berkarya		
9	Angin Bina Bangsa		
10	Angin		
11	Angin		
12	Angin		
13	Angin		
14	Angin		
15	Angin		
16	Angin		
17	Angin		
18	Angin		
19	Angin		
20	Angin		
21	Angin		
22	Angin		
23	Angin		
24	Angin		
25	Angin		

Serba Serbi Januari

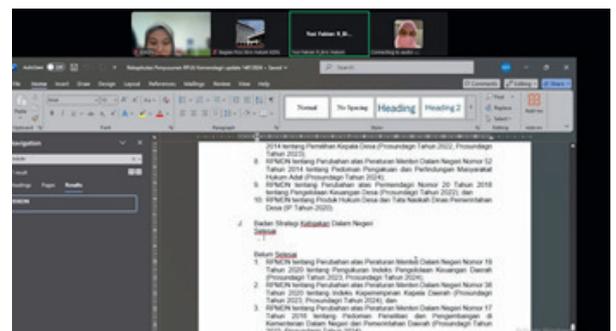
Rapat Evaluasi Prosundagri Tahun 2024 dan Progress Penyusunan Prosundagri 2025

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 09.00 s.d 18.00 WIB dipimpin oleh Kabag Biro Hukum yang di hadiri oleh Perwakilan tiap komponen Kemendagri.

Tahun 2024 BSKDN tercatat memiliki 3 (tiga) Rancangan Permendagri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-64 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

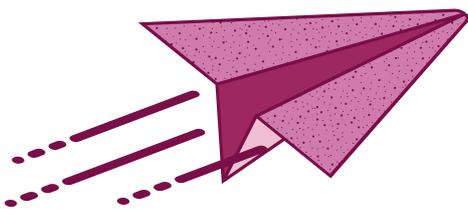
- Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, sedang dilaksanakan penyesuaian pengaturan penganggaran dengan pengaturan yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan peraturan;

- Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, sedang dilaksanakan pembahasan penetapan bobot penilaian yang menjadi bagian dari variabel pengukuran indeks;
- Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomo 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sedang dilaksanakan penyesuaian pengaturan terkait teknis pelaksanaan analisis kebijakan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan LAN RI.



untuk progress penyusunan prosundagri tahun 2025 meliputi:

- Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Luncuran 2023 masuk prosun 2024, biro hukum tidak setuju karena prosundagri hanya untuk 2 tahun. Masuk penganggaran roren. Minta arahan bu kabag. Harus selesai 2025, tidak bisa masuk di 2026).
- Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Atas Peraturan
- Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Luncuran 2023 masuk prosun 2024, biro hukum tidak setuju karena prosundagri hanya untuk 2 tahun, surat sekretaris BSKDN Nomor: 100.4.2/4653/BSKDN tanggal 26 September 2024)



- Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Melampirkan rancangan yang sudah lebih siap dan dokumen justifikasi kebutuhan pengaturan)
- Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) (Jika pertimbangannya pelaksanaan UU 23/2014, lantas bagaimana pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan indeks dan peringkat kinerja pemerintah daerah? Karena melibatkan 4 komponen lainnya (otda, keuda, bangda, itjen) diprioritaskan (penguatan dari roren). Masuk penganggaran.

untuk progress penyusunan prosundagri tahun 2025 masih dalam tahap pembahasan internal bskdn dengan target penyelesaian di bulan November 2025

Serba Serbi Januari

Evaluasi Pelaksanaan SPM Pra Triwulan IV Tahap Tiga DAN Asistensi Tahapan Penerapan SPM pada e-SPM Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pukul 09.00 s.d 15.00 melalui zoom meeting

Pencapaian: Secara keseluruhan, penerapan SPM Pra Triwulan IV Tahap Tiga telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan beberapa instansi telah menyelesaikan dokumen SPM tepat waktu.

Masalah yang Ditemui:

- Beberapa unit kerja mengalami keterlambatan dalam proses verifikasi data SPM yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara data yang diinput dan format yang diharapkan.
- Tidak semua laporan SPM telah dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Masalah yang Ditemui:

- Beberapa daerah mengalami kendala teknis terkait konektivitas internet dan pemahaman mengenai alur pengisian SPM dalam sistem e-SPM.

Asistensi Tahapan Penerapan SPM pada e-SPM Tahun 2024, Progress Implementasi:

- Aplikasi e-SPM telah mengalami pembaruan pada fitur pelaporan dan pengiriman data. Sebagian besar instansi telah mulai menggunakan sistem ini untuk menyusun dan mengirimkan SPM.
- Beberapa instansi masih memerlukan pendampingan teknis terkait pengisian dan pengelolaan data pada e-SPM.

Rapat evaluasi ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum, pelaksanaan SPM Pra Triwulan IV Tahap Tiga sudah menunjukkan progres yang baik, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Asistensi lanjutan dalam penerapan e-SPM juga dianggap krusial untuk memastikan implementasi yang optimal pada tahun 2024.

Rapat Finalisasi Kebijakan Keamanan Informasi Kementerian Dalam Negeri

Rapat dilaksanakan Hotel Acacia Jakarta pkl. 09.00 s.d 16.30 WIB dipimpin oleh Kabid pengelolaan sistem informasi pusdatin dan di hadiri oleh SMKI pusdatin Kemendagri, beberapa staff komponen lingkup kemendagri (biro hukum, biro perencanaan, biro ortala, bsdkn dan lainnya)

Tujuan dari diadakanya rapat Finalisasi Kebijakan Keamanan Informasi Kementerian Dalam Negeri yaitu menyusun kebijakan dan keamanan informasi, melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dimana seluruh kegiatan tersebut harus beraspek kepada peraturan kebijakan.

Pada rapat tersebut dibahas juga mengenai penyusunan peraturan kebijakan keamanan dan informasi (Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang infrastruktur Informasi Vital dalam hal persandian/pengamanan informasi)

sesudah rapat tersebut pusdatin akan dilakukan pendataan ulang terkait sistem keamanan dan informasi di hari rabu, 22 januari 2024 oleh pusdatin. Jika tidak ada konfrimasi mengenai aplikasi/website maka akan di lakukan shut down pada aplikasi/website tersebut untuk mengurangi ancaman siber.

Bagian perencanaan siap mendukung penyusunan peraturan kebijakan tersebut untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data informasi di seluruh indonesia.



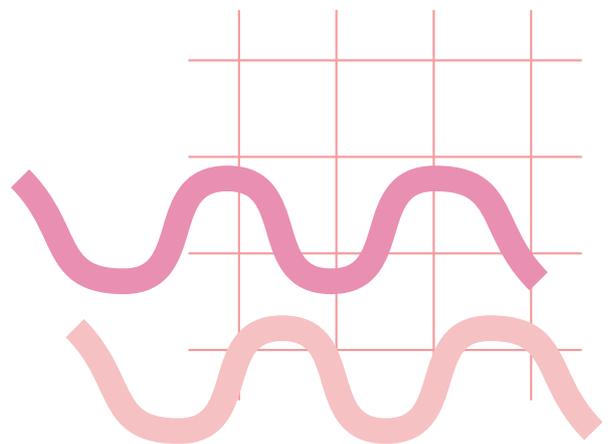
Serba Serbi Januari

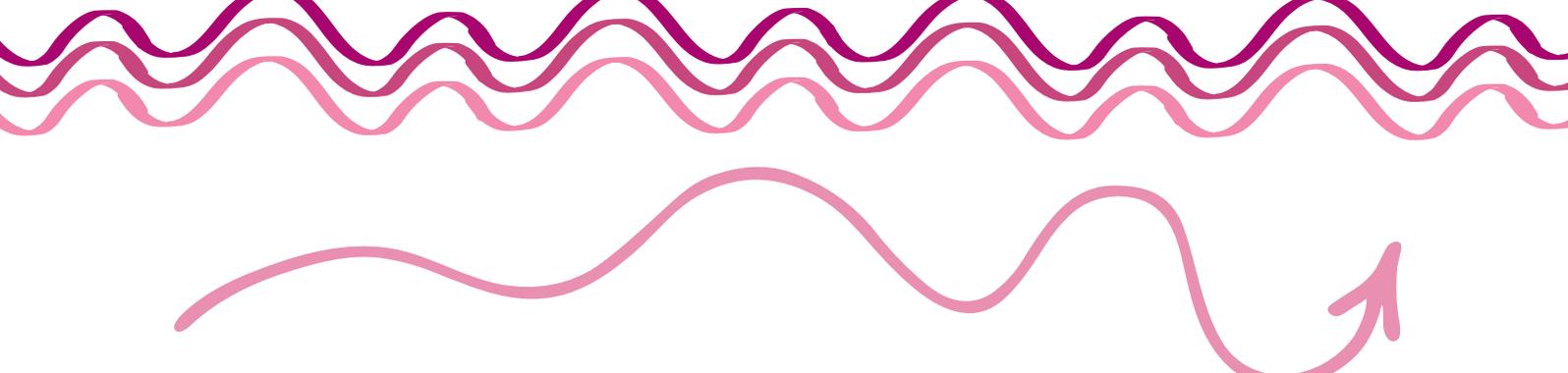
Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Kajian Penyelesaian Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Kemudahan Layanan Perizinan Berusaha

Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 20 Januari 2025 Pukul 14.00 s.d 18.00 WIB bertempat di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri yang dihadiri oleh Kepala Badan, Plh. Ses, Kapustrajakan 3.

Rapat diawali dengan pemaparan data lokus Prov. DKI Jakarta oleh Saudara Aji Nur Cahyo. Dilanjutkan dengan pembahasan hasil input data instrumen pelaku usaha dan pemerintah daerah serta cek kelengkapan data di setiap lokus.

Rapat akan dilanjutkan besok pagi jam 10.00 untuk menyelesaikan Laporan Akhir.





Rapat Finalisasi Kebijakan Keamanan Informasi Kementerian Dalam Negeri

Rapat dilaksanakan Hotel Acacia Jakarta pkl. 09.00 s.d 16.30 WIB dipimpin oleh Kabid pengelolaan sistem informasi pusdatin dan di hadiri oleh SMKI pusdatin Kemendagri, beberapa staff komponen lingkup kemendagri (biro hukum, biro perencanaan, biro ortala, bsdkn dan lainnya).

Pada rapat tersebut membahas mengenai manajemen risiko keamanan informasi dan standar operasional prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan/teknis.

Dibutuhkan mekanisme manajemen resiko yang terimplementasi berupa manajemen risiko keamanan informasi di lingkup kemendagri dengan adanya penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan data serta aplikasi yang di kelola oleh pusdatin kemendagri dapat berjalan dengan baik.

Manfaat dari manajemen risiko ini yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, mewujudkan penerapan SPBE yang terintegrasi, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan, Meningkatkan kinerja pemerintahan, mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Bagian Perencanaan siap untuk mengikuti dan melaksanakan arahan terkait manajemen risiko sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah perencanaan yang dilakukan sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, guna mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan memitigasi risiko secara efektif dan efisien.

Serba Serbi Januari

Rapat Virtual Koordinasi Prosundagri 2025 lingkup BSKDN

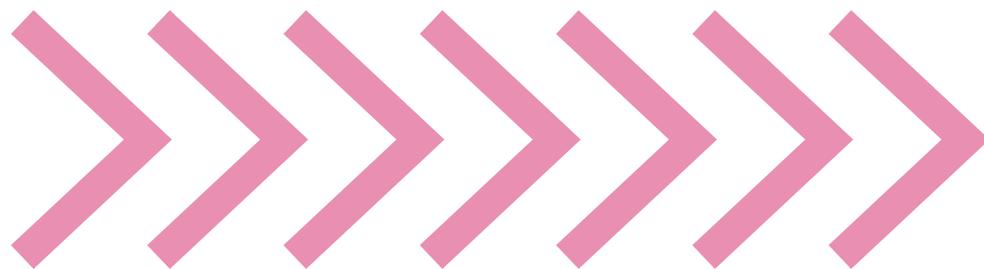
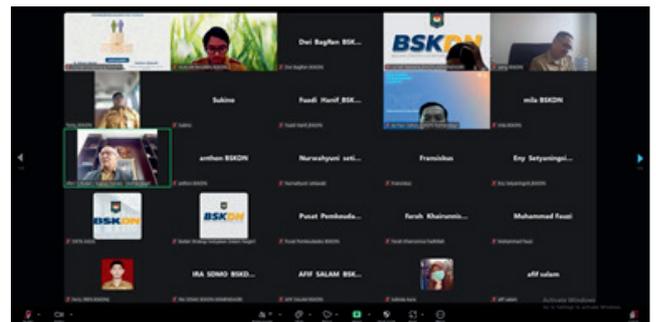
Rapat dilaksanakan via zoom meeting pukul 09.00 s.d 11.30 WIB dipimpin oleh Plh. Ses BSKDN dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Pusat dan Bagian di BSKDN

Pada rapat tersebut membahas mengenai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang sudah dibuat namun oleh masing masing pusat namun belum rampung

Dibutuhkan percepatan dan pendampingan yang akan difasilitasi oleh BagRen untuk penyelesaian draft/perubahan terkait Permendagri IKKD, ITKPD, IPKD, Penghargaan Atau Insentif Inovasi Daerah, serta Pedoman Litbang Untuk Internal dan Daerah.

Manfaat dari Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri ini yaitu membantu menyelesaikan Permendagri dan mengharmonisasikan dengan Biro Hukum Kemendagri serta Kementerian Hukum

Bagian Perencanaan siap untuk memfasilitasi dan membantu terkait Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri agar selesai pada waktunya.



Rapat Perencanaan dan Pelaporan Anggaran Tahun 2026

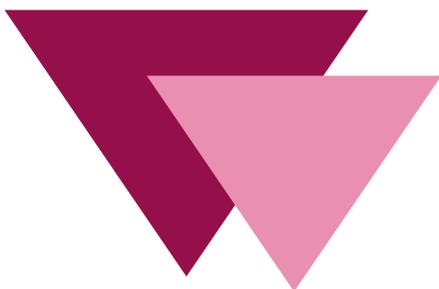
Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja pkl. 12.30 s.d 17.00 WIB dipimpin oleh Plh. Kepala Biro Perencanaan yang dihadiri oleh Perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri

Adapun pembahasan rapatnya diantara lain:

- Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendagri TA.2024, Pelaksanaan Anggaran TA.2025 dan Percepatan Anggaran TA.2026
- Sosialisasi PMK 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No.62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dalam penyusunan RKA-K/L TA.2026

Realisasi Anggaran BSKDN Kemendagri TA.2024 menempatkan posisi ke 8 dari 13 UKE I Kemendagri. Terdapat Blokir Kemendagri TA.2025 sebesar Rp.1.799.016.796.000,- yang dikarenakan adanya Kebijakan Blokir Perjalanan Dinas menindaklanjuti arahan Presiden serta belum dipenuhinya kelengkapan dokumen pada beberapa kegiatan.

Penetapan Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemendagri menjadi 100 saat ini masih dalam proses paraf Menteri K/L terkait yang nantinya akan menambah Belanja Pegawai (001).



Serba Serbi Januari

Rapat Pendataan Ulang Sistem Elektronik Domain Kementerian Dalam Negeri

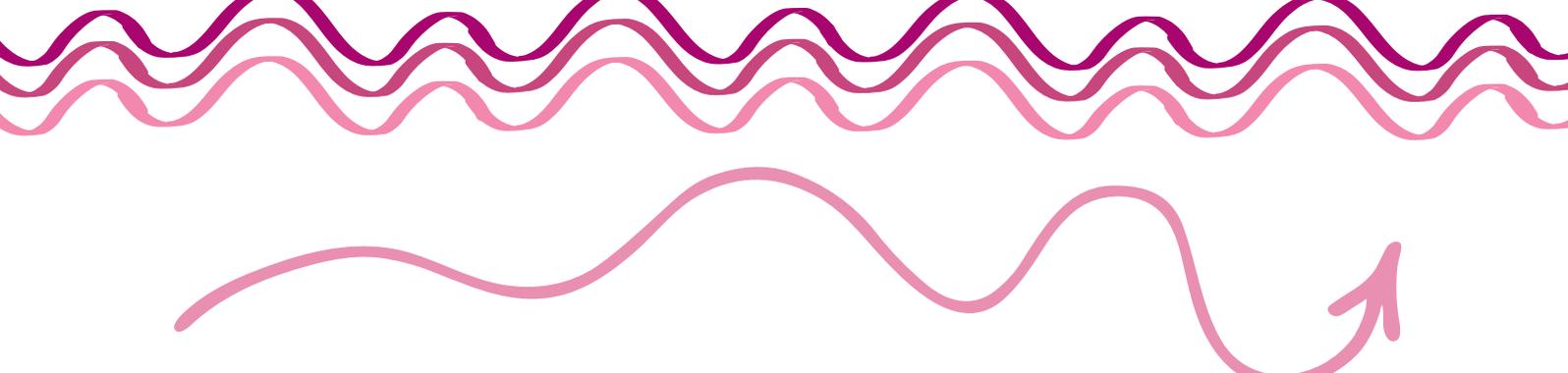
Rapat dilaksanakan Hotel Acacia Jakarta pkl. 08.30 s.d 15.00 WIB dipimpin oleh Kabid pengelolaan sistem informasi pusdatin dan di hadiri oleh SMKI pusdatin Kemendagri, beberapa staff komponen lingkup kemendagri (biro hukum, biro perencanaan, biro ortala, bsdkn dan lainnya)

Pada rapat tersebut membahas mengenai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang sudah dibuat namun oleh masing masing pusat namun belum rampung.

Aplikasi atau website yang sudah non aktif dan tidak terdapat update maka akan ditutup. Perlu adanya peningkatan pada beberapa aplikasi dan website karena masih banyak terdeteksi adanya usaha peretasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagian Perencanaan siap untuk mengikuti dan menerima arahan mengenai sistem elektronik domain yang berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah perencanaan yang dilakukan sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan.





Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri

Rapat dilaksanakan di Gedung F Kementerian Dalam Negeri Lt.3 pukul 09.00 s.d 12.30 WIB dipimpin oleh Kepala Biro Ortala dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) serta dihadiri oleh seluruh Komponen dan UPT di Kemendagri

Pada rapat tersebut membahas mengenai penyamaan persepsi dari format dan tata bahasa sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri

Perubahan-perubahan dibuat berdasarkan Terbitnya Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah dan Adanya perubahan struktur organisasi Kemendagri (Wakil Menteri, Logo Baru, Pengaturan Tanda Tangan Elektronik)

Beberapa poin penting terkait perubahan tata naskah dinas:

- Perubahan posisi tujuan surat keluar yang awalnya di kanan (di bawah tanggal) menjadi di kiri (di bawah perihal)
- Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas menggunakan warna biru tua (berlaku pada semua level pegawai, bukan pejabat saja)
- Penandatanganan Naskah Dinas oleh Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat pimpinan Unit Kerja Eselon I (termasuk plh dan plt) tidak menggunakan gelar, tidak menggunakan nomor induk (nama lengkap saja)
- Penandatanganan Naskah Dinas untuk pejabat selain Menteri, selain Wakil Menteri, dan selain pejabat pimpinan Unit Kerja Eselon I menggunakan gelar, nomor induk
- Penulisan nama penanda tangan Naskah Dinas piagam, sertifikat dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan tidak menggunakan gelar pegawai, dan pangkat/golongan

Serba Serbi Januari

Rapat Pemahaman pengelolaan keuangan negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023

Rapat dilaksanakan di Command Center pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan di hadiri oleh KPPN Jakarta IV, Narasumber dari Ditjen Keuda, Narasumber dari Itjen Kemendagri.

Pada rapat tersebut membahas mengenai pengelolaan keuangan negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Langkah-langkah Strategis Dalam Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025, meliputi pengaturan agenda/jadwal rencana kegiatan dan rencana penarikan anggaran. Hal ini agar dilakukan secara lebih cermat dan baik, dengan memperhatikan kondisi, kendala, dan pengalaman dalam pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Diminta utuk pusat dan bagian agar melakukan pengawalan secara ketat terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 agar dapat dilakukan secara lMemastikan rencana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA, yang digunakan sebagai dasar dalam pencairan dana.

Diharapkan melalui kegiatan ini, proses pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di tahun 2025 ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan



Rapat Pendataan Ulang Sistem Elektronik Domain Kementerian Dalam Negeri

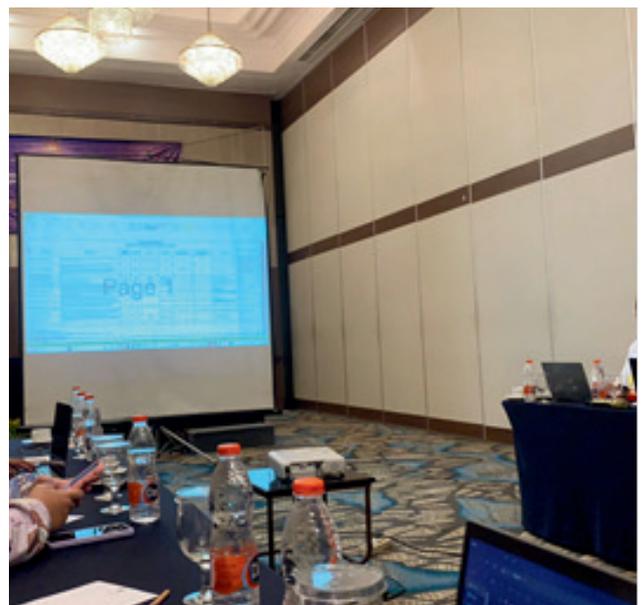
Rapat dilaksanakan Hotel Acacia Jakarta pkl. 08.30 s.d 15.00 WIB dipimpin oleh Kabid pengelolaan sistem informasi pusdatin dan di hadiri oleh SMKI pusdatin Kemendagri, beberapa staff komponen lingkup kemendagri (biro hukum, biro perencanaan, biro ortala, bsdkn dan lainnya)

Pada rapat tersebut melaksanakan pendataan ulang sistem elektronik domain pada setiap komponen dengan melampirkan data aplikasi atau website yang masih aktif (A) atau sudah non aktif (N).

Aplikasi atau website yang sudah non aktif dan tidak terdapat update maka akan ditutup.

Perlu adanya peningkatan pada beberapa aplikasi dan website karena masih banyak terdeteksi adanya usaha peretasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagian Perencanaan telah mengirimkan permintaan daftar data aplikasi dan website domain BSKDN. Bagian perencanaan siap untuk mengikuti dan menerima arahan mengenai sistem elektronik domain yang berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah perencanaan yang dilakukan sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan.



Serba Serbi Januari

Rapat Persiapan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penerapan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri

Acara dilaksanakan di ruang Video Conference BSKDN Kemendagri. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat IV dan dipimpin oleh Analis Kebijakan Madya (Ibu Nuril F). Dihadiri oleh Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) LAN RI sebagai Narasumber, Analis Kebijakan Madya LAN, Peneliti BRIN dan para Pejabat Fungsional, Kasubag TU dan staf di lingkungan Pusat IV baik daring maupun luring

Paparan Analis Kebijakan Ahli Pertama (Ibu Ristiyan W.)

- Laporan tahun 2025 ini akan memakai format telaahan staf (sesuai Permendagri No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah).
- Akan disusun sebanyak 38 Telaahan Staf untuk tiap provinsi dan deadline-nya Maret 2025.
- Susunan Telaahan Staf: Persoalan, Praanggapan, Fakta-fakta yang mempengaruhi, Analisis, dan Kesimpulan.

Paparan Narasumber Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) LAN RI (Bpk. Yogi Suwarno, Ph.D.)

Untuk data yang banyak dan besar disarankan menggunakan AI

- Gunakan data pembanding untuk menghindari manipulatif data
- Buat standar Telaahan Staf, misal jumlah halaman yang akan dibuat
- Sumber data harus jelas tidak boleh anonim, sebagai bentuk akuntabilitas
- Bandingkan data primer dan sekunder
- Kata Kunci dalam penyusunan Telaahan Staf Rekomendasi Kebijakan Penerapan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri: Kompetisi, Komparasi, Klaborasi, dan ownership
- Disarankan ada time line Indeks Inovasi Daerah: Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang
- Perlu diadakan FGD Telaahan Staf sebelum disampaikan ke Mendagri

Rapat peninjauan kerja sama dengan Universitas Hasanudin

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Pustrajak Kewilayahan, Kependudukan, dan Yanlik BSKDN (Pusat 2), rapat dipimpin oleh Kapus 2 dan dihadiri oleh perwakilan Unhas serta Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasker) Setjen.

Pada rapat dilaksanakan diskusi yang berisikan pengenalan dan penyampaian maksud peninjauan kerja sama, yakni Kapus 2 menginisiasi penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap produksi barang/jasa, di mana kajian untuk hal ini dapat dikolaborasikan bersama para dosen dan mahasiswa Unhas, selain itu juga diwacanakan kegiatan replikasi kajian dan penerapan IPTEK yang dilaksanakan mahasiswa selama KKN.

Perwakilan Pusfasker menyampaikan bahwa perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait apakah sudah adanya Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Unhas, bila sudah ada maka hanya perlu perpanjangan dan hal ini dapat lebih mudah dilaksanakan.

Bagian Perencanaan siap mengawal proses peninjauan kerja sama antara BSKDN dengan Unhas termasuk melalui penyiapan dokumen kerja sama dengan berkoordinasi bersama Pusfasker.



Serba Serbi Januari

Rapat Tindaklanjut Analisis Kerentanan dan Insiden Siber Kemendagri

Rapat dilaksanakan Hotel Acacia Jakarta pkl. 08.30 s.d 15.00 WIB dipimpin oleh Kabid pengelolaan sistem informasi pusdatin dan di hadiri oleh SMKI pusdatin Kemendagri, beberapa staff komponen lingkup kemendagri (biro hukum, biro perencanaan, biro ortala, bsdkn dan lainnya)

Pada rapat tersebut melaksanakan evaluasi dan memberikan informasi terkait aplikasi dan website komponen yang telah terdeteksi terdapat usaha peretasan

Aplikasi atau website yang sudah non aktif dan tidak terdapat update maka akan ditutup. Perlu adanya peningkatan pada beberapa aplikasi dan website karena masih banyak terdeteksi adanya usaha peretasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi dan website BSKDN yang terdeteksi adanya peretasan yaitu IPKD, E-Journal, E-Library, dan yang paling parah yaitu Puja Indah.

Bagian perencanaan siap untuk mengikuti dan menerima arahan mengenai sistem elektronik domain yang berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah perencanaan yang dilakukan sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan.



Rapat Konfirmasi Capaian Data Kinerja dalam Net Konsep Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2024 dan Finalisasi Laporan Rencana Aksi PK TW IV TA 2024

Rapat dibuka oleh Fungsional Perencana Muda Monev dan Pelaporan Kinerja Setjen Kemendagri dan selanjutnya teknis rapat oleh Fungsional Perencana Pertama Monev dan Pelaporan Kinerja Setjen Kemendagri, di hadiri oleh perwakilan dari BSKDN dan Tim APIP Itjen Kemendagri.

Pelaksanaan rapat dalam rangka penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kemendagri. Dalam penyusunan LAKIP Kemendagri, BSKDN mendukung dua indikator kinerja Menteri Dalam Negeri yaitu: Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.



Terhadap Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri target kinerja 45% realisasi 92.30% dengan capaian kinerja 205.11% berdasarkan 12 rekomendasi Kebijakan yang dimanfaatkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sementara Indikator Kinerja Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi target kinerja 36% realisasi 76.92% dengan capaian kinerja 213.67% berdasarkan hasil perhitungan indeks inovasi dengan kategori sangat inovatif dan inovatif dengan total 420 daerah.

Tim APIP Itjen Kemendagri akan melakukan riviui terhadap LAKIP BSKDN yang direncanakan pada awal bulan february tahun 2025. BSKDN akan melakukan perbaikan/update data dan menyampaikan kembali ke Biro Perencanaan paling lambat Kamis, 30 Januari 2025.

Serba Serbi Januari

Rapat Tindak Lanjut LoI antara BSKDN dengan Monash University

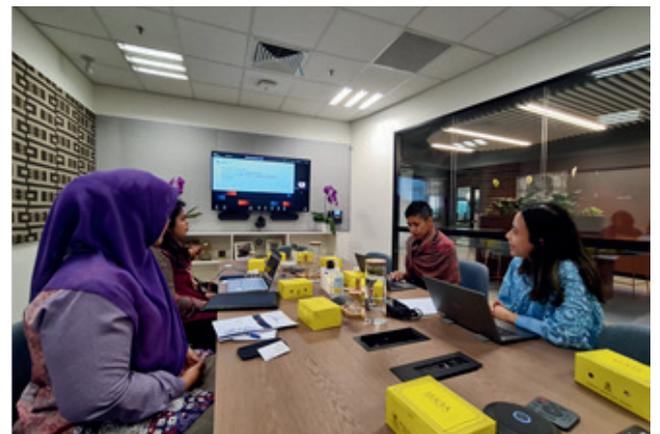
Rapat dilaksanakan di Meeting Room Monash University Indonesia Kampus BSD dan dihadiri oleh Wakil Dekan Ilmu Sosial dan Manajer Kerja Sama Monash University Indonesia. Turut hadir perwakilan BPSDM dan Pufasker Setjen.

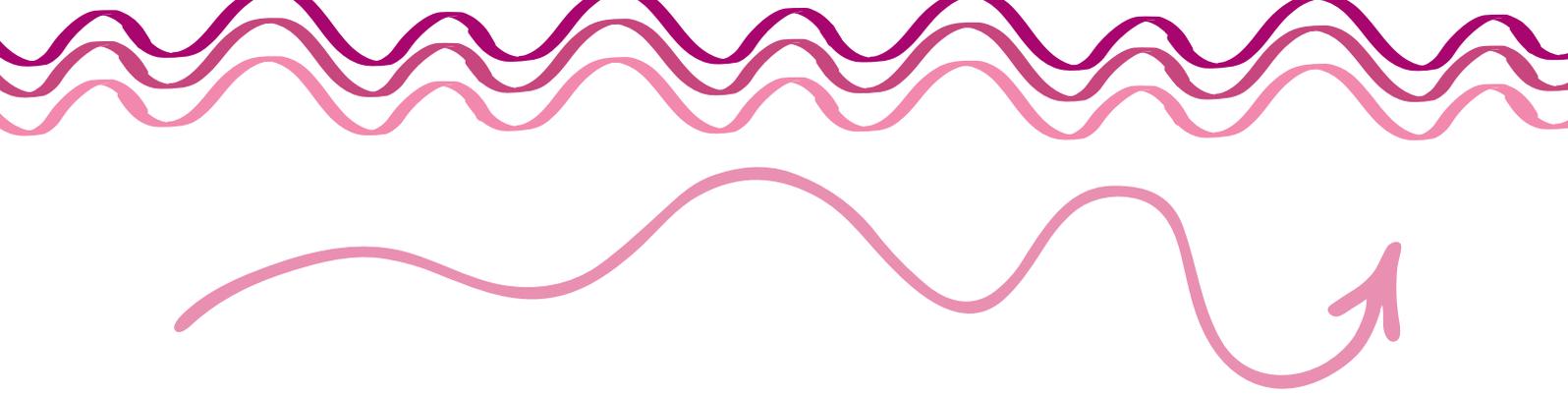
Pada rapat dilaksanakan pembahasan kelanjutan Penandatanganan LoI yang akan dimulai dengan penyampaian Surat Monash University Indonesia ke Sekjen Kemendagri dan dilanjutkan dengan penyusunan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama dengan BSKDN dan BPSDM.

Adapun pemetaan ruang lingkup yang disepakati adalah: kolaborasi riset digitalisasi pilkades, peningkatan kapasitas kepala daerah dan ASN Pemda, serta rencana pemberian beasiswa bagi ASN Kemendagri dan Pemda untuk melanjutkan studi.

Monash University Indonesia juga mewacanakan sosialisasi studi tata kota wilayah Banten dengan sebutan Banten Mozaic, studi ini dapat disosialisasikan dengan melaksanakan pelatihan bagi para ASN di wilayah Banten untuk peningkatan pemahaman tata kota yang lebih baik.

Selanjutnya Tim Teknis menindaklanjuti rencana kerja sama dengan membentuk Grup Komunikasi dan segera menyusun dokumen kerja sama.





Rapat Program dan Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri TA.2025 dan Perencanaan Program Kegiatan TA.2026

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB di Ruang Rapat Aula BSKDN dipimpin oleh Kepala BSKDN Kemendagri yang dihadiri oleh Kepala Plh. Sekretaris, Para Kapus, Para Kepala Bagian, Bendahara, PPK, PPTK dan Perwakilan Pusat dan Bagian BSKDN Kemendagri.

Adapun rangkai rapatnya mencakup:

- Penandatanganan Pakta Integritas TA.2025
- Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA.2025
- Masing-masing Pusat dan Bagian BSKDN memaparkan Kegiatan TA.2025, RPD TA.2025 dan Kegiatan TA.2026

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dapat masuk dalam seluruh sasaran strategis Kemendagri baik secara primer, sekunder dan tersier.

Sasaran Strategis Kemendagri 2025-2029 diantaranya

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
- Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Bagian Perencanaan akan melakukan coaching bagi seluruh UKE II lingkup BSKDN untuk konfirmasi penyusunan Indikator Kinerja dari level Program s.d Kegiatan dalam menjamin ketercapaian Indikator Kinerja BSKDN Kemendagri.



Serba Serbi Januari

Penjaringan Isu Strategis/Aktual dalam mendukung Program dan Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik

Rapat dilaksanakan pkl. 09.30 s.d 12.00 WIB di Lantai 3 Gedung Krisna BSKDN Kemendagri, yang dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan II, serta dihadiri perwakilan dari Itjen, Ditjen Bina Bangsa, Ditjen Dukcapil, Ditjen Bina Pemdes, dan BNPP.

Seluruh UKE I lingkup Kemendagri yang hadir, menyampaikan isu strategis untuk ditindaklanjuti oleh Pusat Strategi Kebijakan II. Bagian Perencanaan akan mendukung pelaksanaan penjaringan isu strategis yang dapat dituangkan sebagai dasar penyusunan dokumen rekomendasi strategi kebijakan.



Rapat Pembahasan Draft Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) di Lingkungan Kemendagri

Rapat dilaksanakan di RR Pusat 2. Gedung Krisna Lt. 3 pukul 13.30 s.d 15.00 WIB dipimpin oleh Kepala Pusat 2 dan dihadiri oleh Biro Perencanaan dan Biro Hukum di Kemendagri

Pada rapat tersebut membahas mengenai penyusunan Permendagri tentang Pengukuran ITKPD. Rancang bangun ITKPD telah disempurnakan beberapa kali melalui berbagai metode yaitu Diskusi Pakar Pemerintahan, Uji Coba Instrumen Tahap I, Uji Coba Instrumen Tahap II, Arahan Sekretaris Jenderal, serta diskusi kesesuaian indikator ITKPD terhadap indikator kinerja di Pemerintahan Provinsi.

Berdasarkan pertemuan tanggal 22 Oktober 2024 dan 21 November 2024, yang melibatkan Biro Perencanaan, dan Para Kabagren dari Komponen terkait terdapat diskusi untuk penyesuaian rancang bangun ITKPD dengan 4 Indeks yaitu Indeks Pengawasan – Itjen, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah – Ditjen Bangda, EPPD – Ditjen Otda, IPKD – Ditjen Keuda / BSKDN.



Serba Serbi Januari

Rapat Persiapan Penyusunan Penyempurnaan Uji Instrumen Indeks Inovasi Daerah dan Penjaringan Data Inovasi Daerah

Acara dilaksanakan di ruang Video Conference BSKDN Kemendagri. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Pusat IV. Rapat dipandu oleh Analis Kebijakan Muda (Bpk. Arzyad S). Dihadiri oleh LAN RI, Bappenas, para pejabat fungsional, Kasubag TU, staf di lingkungan Pusat IV baik luring maupun daring

Paparan analisis kebijakan muda (Bpk. Arzyad S)

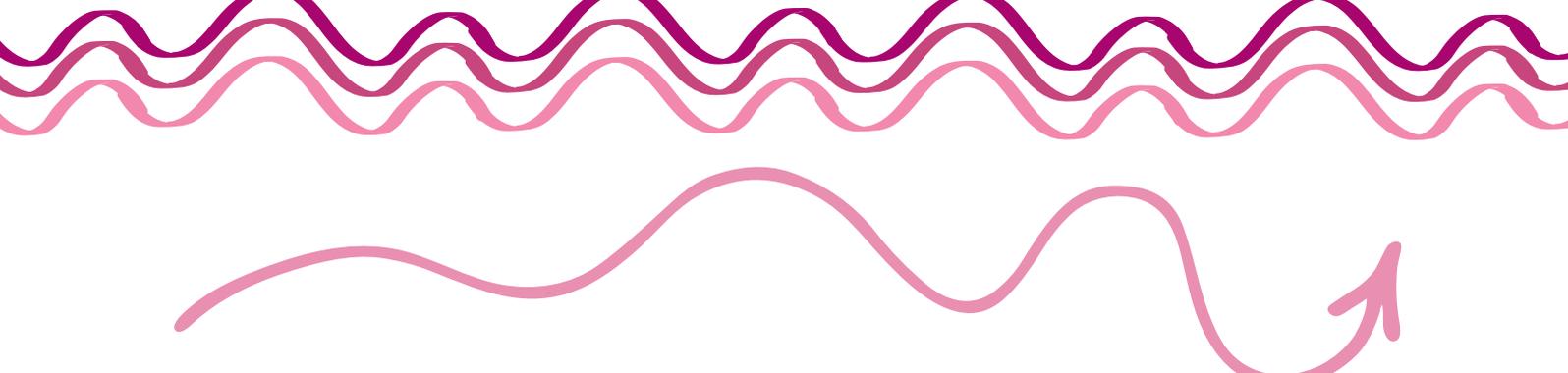
- jumlah inovasi daerah: 31.719 inovasi
- jumlah penda yg mengisi aplikasi IID: 529 Daerah
- jumlah daerah sangat inovatif: 112 daerah
- jumlah daerah inovatif: 308 daerah
- jumlah daerah kurang inovatif: 109 daerah
- jumlah daerah yang tidak dapat dinilai: 17 daerah

Paparan Bpk. Anton (LAN)

- urusan pelayanan dasar diusulkan untuk lebih dari 2 layanan dasar dan maksimal 6 layanan dasar
- masukan indikator IID: manajemen kinerja pegawai, masukan inovasi tematik terbaru, bisa ditaging lebih dari satu taging, inovasi tematik juga wajib, klaster provinsi bisa ditambahkan poin pembinaan inovasi di kab/kota, disarankan ada klaster regional di kab/kota, klaster papua butuh perlakuan khusus, sepakat dengan indikator HAKI tapi terkendala dengan biaya yang tidak murah.

Paparan Bpk. Amos (bappenas)

- bisa merujuk ke Indeks GWPP di Ditjen Adwil
- mengapresiasi indikator HAKI tapi perlu dipikirkan baik baik karena inovasi di daerah hampir mirip mirip
- posisi IGA sebagai penyemangat Daerah untuk melakukan inovasi



Rapat konsolidasi internal Bagian Perencanaan

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Bagian Perencanaan pkl. 12.00 s.d 13.30 WIB yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan yang dihadiri oleh seluruh pegawai Bagian Perencanaan.

Pembahasan terkait konsolidasi internal Bagian Perencanaan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya pada bulan Februari tahun 2025 termasuk PPA, Monev, Kerjasama PerUndang-Undangan dan Data and Knowledge Management.

Pada prinsipnya kegiatan di masing-masing bagian yang dapat ditindaklanjuti segera, segera dilaksanakan karena kemungkinan adanya pemotongan tahap 2 semoga itu tidak terjadi.

Adapun rencana kegiatan masing-masing bagian yang akan dilaksanakan di bulan Februari diantara lain:

- PPA (akan melaksanakan coaching clinic pada hari senin s.d kamis tanggal 3 s.d 6 Februari 2025 dengan Pusat maupun Bagian dan sedang menyusun rencana kerja TA.2026 serta penyusunan renstra Tahun 2025-2029)
 - Monev (terdapat anggaran untuk website pada data dan informasi kalo bisa diahlihan ke tim Data and Knowledge Management, kegiatan yang terdapat 12 rekomendasi kalo bisa outputnya diubah menjadi 12 Daerah untuk memudahkan mendapatkan output kegiatan)
 - Kerjasama dan PerUndang-Undangan (akan mengadakan kick off meeting untuk perubahan permendagri 17/2016 pada hari senin tanggal 3 Februari 2025)
 - Data and Knowledge Management (terkait policy brief akan tetap menggunakan para pakar atau narasumber seperti kegiatan pada pusat lingkup BSKDN Kemendagri)
- 

Serba Serbi Januari

Rapat Persiapan Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik pada Wilayah Metropolitan Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pkl. 13.30 s.d selesai di Ruang Rapat Lt. 5 Pustrajakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri, yang dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan IV, serta dihadiri bagren dan Bagian Keuangan BSKDN

Pada rapat tersebut membahas mengenai Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik pada Wilayah Metropolitan. Kegiatan Pilot Project dilakukan untuk memfasilitasi daerah kawasan metropolitan untuk mereplikasi dan mengembangkan inovasi yang telah berhasil diterapkan di daerah metropolitan yang lain sesuai permasalahan yang dihadapi.

Bagian keuangan akan mengawal dan siap utk memfasilitasi pencairan sesuai dengan prosedur.

Daerah rujukan pilot project tahun 2025 yaitu daerah di kawasan Bandung Raya dan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), sedangkan untuk daerah penerapan yaitu daerah di kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli, Serdang, Karo) dan Bimindo (Bitung, Minahasa, Manado).

.Bagian Perencanaan akan mendukung pelaksanaan kegiatan penerapan pilot project dan diharapkan lebih berinovasi dan efisien dalam penggunaan anggaran.



Rapat Audiensi dengan BRIN tentang Upaya Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

Rapat dilaksanakan di Comman Center, dipimpin oleh Bapak Kepala BSKDN, dihadiri oleh Direktur Kebijakan Polkumhankan BRIN beserta rombongan, serta hadir Kepala Pusat 4 BSKDN, dan perwakilan masing-masing Pusat dan Bagian

Pada rapat disampaikan diskusi seputar pengenalan Struktur Organisasi kedua lembaga, disampaikan seputar tugas dan fungsi dari Dit Polkumhankam yang berfokus pada penyelenggaraan riset bidang Politik, Hukum, dan Hankam. Penelitian yang dilaksanakan setiap tahun kerap melibatkan berbagai K/L berdasarkan tematik sesuai fungsi dari masing-masing K/L. Kemendagri turut aktif menjadi kolaborator dalam pelaksanaan riset yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik

Bagian Perencanaan siap mengawal pelaksanaan kolaborasi penelitian yang saling menguntungkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.

Dit Polkumhankam BRIN bermaksud untuk menjaring isu dan judul penelitian untuk kemudian dikolaborasikan menjadi joint research yang melibatkan Kemendagri dan berbagai K/L lain, sehingga mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy). Untuk itu masing-masing Pusat lingkup BSKDN agar mengusulkan identifikasi isu-isu strategis untuk dikerjasamakan dengan Dit Polkumhankam BRIN



Serba Serbi Januari

Rapat Rancangan Keputusan Tim Unit Kepatuhan Manajemen Risiko Kemendagri 2025

Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting pukul 10.00 s.d 12.30.

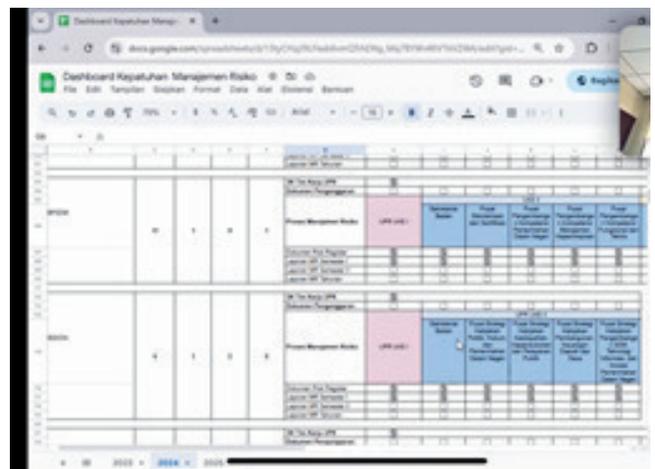
Struktur manajemen risiko

- Unit pemilik risiko
- Unit Kepatuhan manajemen risiko
- unit pengawas manajemen risiko

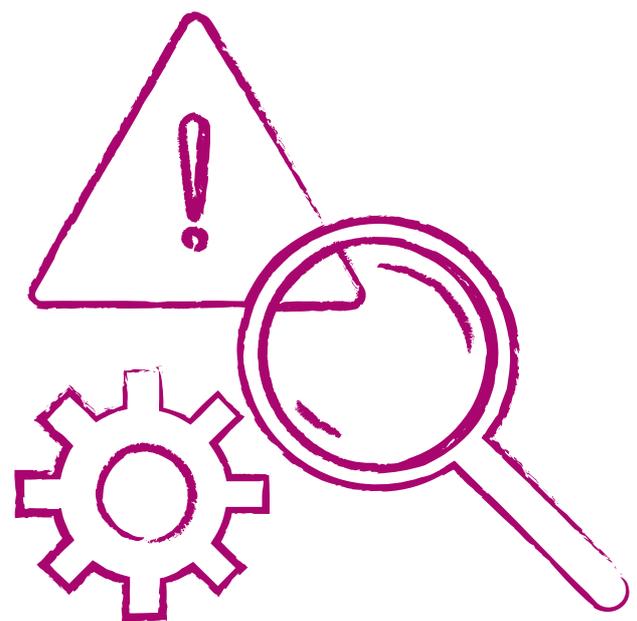
Hal hal yang perlu dilakukan UKE 1

- Menetapkan struktur UPR
- Mengidentifikasi risiko unit kerja disetiap level UPR
- Melakukan FGD untuk membahas risiko oleh pimpinan UPR dan seluruh staf
- Menetapkan Risiko prioritas disetiap UPR dan menyusun rencana mitigasi
- Melaporkan hasil identifikasi dan analisa risiko secara berjenjang kepada pimpinan UPR
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi setiap semester
- Melaporkan kejadian risiko dan usulan risiko baru

BSKDN diharapkan segera melaporkan laporan MR semester 2 dan tahunan 2024.



Unit Kerja	Risiko	Level Risiko	Penyebab	Dampak	Strategi Mitigasi	Status
Unit 1	Risiko 1	High	Penyebab 1	Dampak 1	Strategi 1	High
Unit 2	Risiko 2	Medium	Penyebab 2	Dampak 2	Strategi 2	Medium
Unit 3	Risiko 3	Low	Penyebab 3	Dampak 3	Strategi 3	Low



Rapat efisiensi belanja dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 13.00 s.d 16.00 WIB yang dipimpin oleh Plh. Kepala Biro PERENCANAAN Kemendagri yang dihadiri oleh Perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Pagu efisiensi Kemendagri sebesar Rp. 2.753.693.000.000,- dari pagu Kemendagri sebesar Rp. 4.792.328.518.000,- . BSKDN Kemendagri efisiensinya sebesar Rp. 15.243.167.000,-, Blokir perjalanan dinas termasuk dalam efisiensi.

Pagu yang tidak bisa diambil dalam efisiensi Kemendagri yaitu:

- honorarium non ASN dalam DIPA Kemendagri TA.2025
- realisasi OMSPAN dan menghitung outstanding per 31 Januari 2025



Tindak lanjut yang harus dilakukan setelah rapat siang ini antara lain:

- cut-off pelaksanaan kegiatan per 31 Januari 2025
- Kemendagri mendapatkan persetujuan Komisi II DPR RI atas identifikasi rencana efisiensi anggaran (disampaikan dalam Raker tanggal 3 Januari 2025)
- Masing-masing UKE I Kemendagri menyampaikan usulan revisi blokir (ADK beserta data dukungnya) kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro PERENCANAAN paling lambat tanggal 5 Februari 2025

Biro PERENCANAAN menyarankan tidak boleh ada kegiatan sampai tanggal 14 Februari 2025 sampai proses efisiensi selesai



Serba Serbi Februari

Rapat Konsolidasi Anggaran dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup BSKDN

Rapat dilaksanakan di RR Bagian Keuangan pkl. 09.00 s.d 14.00 WIB yang dipimpin oleh Kabag Bagian Keuangan dan didampingi itjen

Adapun beberapa hal yang dibahas yaitu:

- Laporan keuangan tahun 2024Lapkin 2024
- Manajemen risiko 2024
- PK 2024

Pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari.Tindak lanjut yang harus dilakukan setelah rapat siang ini adalah segera melengkapi dokumen yang belum terselesaika 2 tahun masuk dalam Prosundagri

Bagian Perencanaan akan siap menerima dan mengikuti arahan serta memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan.



Kegiatan Audiensi Kajian Cepat Kemudahan dan Percepatan Perizinan Berusaha Kementerian BKPM

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari Pukul 14.00 s.d selesai di Jl. Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan.

Tim diterima oleh bagian kedeputian bidang pengembangan iklim penanaman modal direktorat pemberdayaan usaha. Pada pemberdayaan usaha, dilakukan pembinaan di 20 lokus dalam setahun pada tahun 2022 dan 2023 kepada pelaku usaha UMKM.

Kendala yang dialami saat pendampingan adalah KTP yang tidak terkoneksi oleh sistem e-KTP sehingga tidak valid karena pemohon berpindah-pindah tempat tinggal jadi membutuhkan waktu yang lama. Kendala lainnya adalah pelaku usaha kesulitan menemukan KBLI yang sesuai. Namun dibantu pendampingan oleh DPMPTSP daerah.

Untuk membuat NIB pada pelaku usaha perseorangan non Badan Usaha tidak memerlukan NPWP karena kebanyakan nilainya dibawah 10 miliar rupiah sehingga tidak diwajibkan membayar pajak.

Akan diagendakan kembali oleh BPKM untuk kemendagri dengan melibatkan bagian terkait kajian diantaranya ada di kedeputian bidang hilirisasi investasi strategis, bidang pelayanan dan penanaman modal dan bidang teknologi informasi penanaman modal.



Serba Serbi Februari

Diskusi Pembahasan Jaminan Sosial bagi PPPK bersama PT. Taspen

Diskusi dimulai dengan pembahasan potensi kerja sama antara BSKDN dengan PT. Taspen dalam menyediakan jaminan sosial hari tua bagi PPPK. Perwakilan PT. Taspen menyampaikan berbagai produk dan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik PPPK. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain terkait Jenis Program, manfaat, dan mekanisme.

Pada diskusi juga dilaksanakan Pelatihan Kewirausahaan. Selain jaminan sosial, Taspen juga membahas mengenai pentingnya pelatihan kewirausahaan bagi PPPK sebagai bekal di masa depan. PT. Taspen memiliki program-program pelatihan yang dapat membantu PPPK mengembangkan keterampilan berwirausaha sebagai persiapan menghadapi pensiun.

BSKDN mewacanakan diskusi Perluasan Inovasi seputar Pelatihan ASN dalam rangka persiapan menghadapi pensiun, untuk itu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Taspen dibutuhkan guna mendorong replikasi inovasi dari satu daerah ke daerah lain

Bagian Perencanaan, berkoordinasi bersama Bagian SDMO dan Pusat III BSKDN, siap menindaklanjuti kerja sama dengan pembahasan teknis lebih lanjut bersama Tim Teknis dari Taspen



Konsolidasi Anggaran dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup BSKDN TA. 2025-2029

Rapat dilaksanakan di RR Bagian Perencanaan pkl. 10.00 s.d 17.00 WIB yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan yang dihadiri oleh Perwakilan masing-masing Pusat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri.

Rapat bertujuan untuk koordinasi pemantapan penyusunan rencana kerja BSKDN TA. 2026 dan penyusunan dokumen rencana strategis TA. 2025 - 2029.

Peleburan kegiatan FDA kedalam masing-masing rekomendasi strategi kebijakan pada UKE II unit BSKDN Kemendagri. Penyampaian Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2025. BSKDN Kemendagri memperoleh pagu efisiensi sebesar Rp. 15.243.167.000,-.

Adapun pembahasan setiap Pusat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sbb:

- Pusat 1, Penambahan pada komponen input pada Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah serta penambahan nomenklatur komponen
- Pusat 2, Penambahan jumlah output rekomendasi strategi kebijakan lingkup Kewilayahan dan Pelayanan Publik sebanyak 2 rekomendasi
- Pusat 3, Revisi dan penambahan nomenklatur pada RO pengukuran pengelolaan keuangan daerah
- Pusat 4, Penetapan output kegiatan pada KRO rekomendasi kebijakan penerapan inovasi pemerintah daerah sebanyak 38 daerah



Serba Serbi Februari

Nota Kesepahaman Kemendagri, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara dan BPPIK Dalam Pengawasan Perizinan Berusaha

- Menteri Dalam Negeri:

Perizinan menjadi salah satu temuan oleh KPK, yang terdapat banyak pelanggaran. Disamping dibentuknya berbagai sistem seperti PTSP, MPP, dan OSS, masih ditemukan jenis-jenis implementasi pelayanan perizinan secara tatap muka yang memuat moral hazard. Selain peran APIP melalui Inspektorat Kemendagri dalam pengawasan perizinan, diperlukan dukungan unsur eksternal seperti Polri, KPK, Kejaksaan, dan BPPIK.

- Jaksa Agung:

Kerjasama antar lembaga menjadi sangat krusial dalam rangka pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah. Pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam penyelenggaraan perizinan berpotensi dapat meningkatkan efektifitas pengawasan, meminimalisir prakti KKN, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

- Kapolri

Dilihat dari dinamika lingkungan strategis, Indonesia masih dihadapkan dengan krisis ekonomi dan energi karena isu-isu konflik internasional. Untuk itu Indonesia harus tetap menjaga iklim investasi.

Polri berkomitmen menjaga iklim pertumbuhan ekonomi 8% dengan melakukan pengawasan serta berupaya memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait kemudahan perizinan berusaha.

- Ketua KPK

Perizinan seharusnya menjadi zona terbuka namun dalam implementasinya menjadi zona tertutup. Perlu dilakukan pembaruan, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi sehingga proses perizinan dapat dilakukan maksimal.



- Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK)

Dibandingkan dengan negara lain, proses bisnis perizinan di Indonesia cenderung lebih banyak tahapan sehingga terkesan rumit dan panjang. Perbaikan kebijakan perizinan perlu dilakukan dengan mengedepankan kemudahan, akurasi dan kecepatan. Perlu dibuatkan sistem yang singkat mulai dari distribusi, digitalisasi dan akuratisasi dengan sistem yang terkontrol dan terukur.

- Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK)

Dibandingkan dengan negara lain, proses bisnis perizinan di Indonesia cenderung lebih banyak tahapan sehingga terkesan rumit dan panjang. Perbaikan kebijakan perizinan perlu dilakukan dengan mengedepankan kemudahan, akurasi dan kecepatan. Perlu dibuatkan sistem yang singkat mulai dari distribusi, digitalisasi dan akuratisasi dengan sistem yang terkontrol dan terukur.

Poin penting:

- Maksud: Sebagai pedoman para pihak dalam rangka pengawasan perizinan di daerah;
- Tujuan: Untuk optimalisasi mengatasi hambatan perizinan di daerah, Membangun koordinasi antar pihak terkait pencegahan tindak pidana dalam penyelenggaraan perizinan, dan Memastikan SOP yang sesuai ketentuan;
- Ruang lingkup: Pembentukan tim koordinasi, Pertukaran dan pemanfaatan data, Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM, Serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- Tim koordinasi terdiri dari Tingkat Pusat (Kemendagri, Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan BPPIK), Tingkat Provinsi (Inspektur Pemprov, Reskrim Polda, Intelijen Kejati) dan tingkat Kab/Kota (Inspektur Pemkab/Pemkot, Reskrim Polres, dan Intelijen Kejari);
- Tugas tim: Menyusun Renja, Melakukan reuiu, Kegiatan Pencegahan, Rekomendasi Perbaikan, Supervisi Rencana Aksi, Pendampingan, dan Pengawasan lainnya.

Serba Serbi Februari

Penyusunan laporan Kajian Pengurangan Kemiskinan Melalui Kemudahan Perizinan Berusaha

Rapat dilaksanakan Rabu, 5 Februari Pukul 10.00 s.d 14.00, diruang vidio conference BSKDN dan dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Rapat membahas dokumen persyaratan dalam pengurusan syarat dasar perizinan berusaha dasar yakni KKPR dan PBG. Dokumen syarat diidentifikasi dari setiap lokus dan menandai syarat tambahan dari masing-masing lokus.

Selain itu, dilakukan diskusi susunan penyusunan ulang laporan dari BAB 1 sampai BAB 5. Rapat akan dilanjutkan besok dengan membahas persetujuan lingkungan dan perizinan sector yang lebih mendalam terhadap satu sektor pilihan.



Konsolidasi Anggaran dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup BSKDN TA. 2025-2029

Rapat dilaksanakan di RR Bagian Perencanaan pkl. 10.00 s.d 16.00 WIB yang dipimpin oleh Perencana Ahli Pertama yang dihadiri oleh Perwakilan masing-masing Bagian lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Rapat bertujuan untuk koordinasi pemantapan penyusunan rencana kerja BSKDN TA. 2026 dan penyusunan dokumen rencana strategis TA. 2025 - 2029.

Adapun pembahasan setiap Bagian lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sbb:

- Bag. Umum, Pengurangan jumlah blokir anggaran dengan mengeluarkan Honorarium PBJ dan Pembayaran Listrik Kantor
- Bag. Keuangan, Pengurangan pemblokiran anggaran dengan mengeluarkan Honorarium Pengelola Keuangan (KPA/PPK/PPTK/BP/BPP/dll)
- Bag. SDMO, Pembahasan efisiensi layanan pendidikan dan pelatihan

Penyampaian Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2025. BSKDN Kemendagri memperoleh pagu efisiensi sebesar Rp. 15.243.167.000,-



Serba Serbi Februari

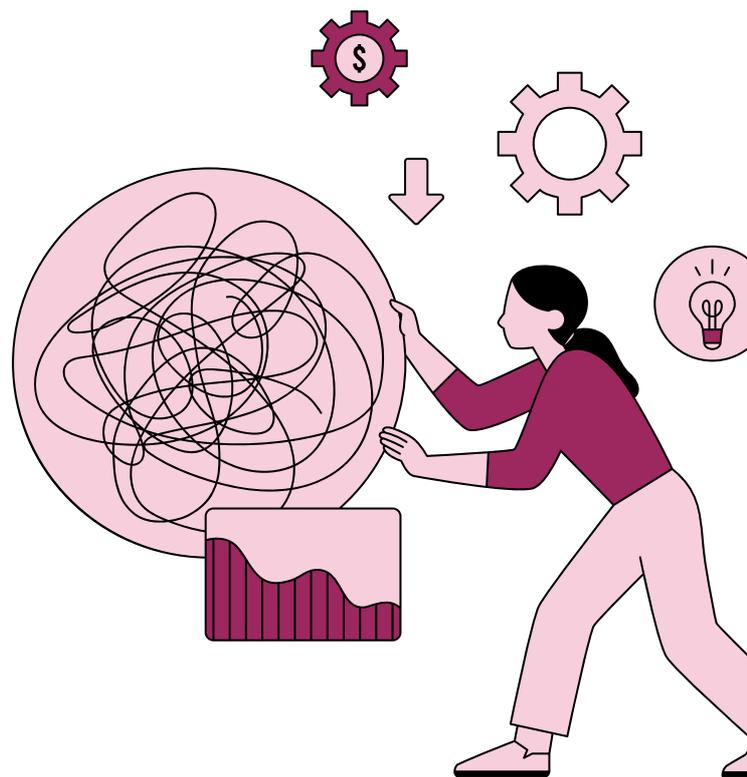
Reviu APIP Itjen terkait Lapkin dan Manajemen Risiko

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 s.d 13.00 di ruang arjuna BSKDN dan dipimpin oleh perencana ahli muda bagian perencanaan BSKDN

Rapat bertujuan untuk mereviu kembali terkait laporan kinerja BSKDN dengan memperhatikan beberapa poin poin yang masih keliru dan kurang sinkron serta memperbaiki yang perlu diubah atau diupdate kembali.



Terdapat perbaikan pada tabel target dan realisasi serta capaian indeks inovasi yang terdapat sedikit kekeliruan dan sudah dikonfirmasi. Bagian perencanaan terus memantau dan memastikan langkah terbaik yang sesuai dengan kebijakan



Rapat Pembahasan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl 13.00 s.d 17.30 WIB yang dipimpin oleh Kepala Bagian Anggaran Biro Perencanaan Setjen Kemendagri yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri pada Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan

Rapat pembahasan terkait kenaikan Tunjangan semula 80% menjadi 100%, Perhitungan Gaji dan Tunjangan CPNS, P3k Tahap 1, P3k Tahap II TA. 2025. . Kebutuhan perhitungan Tunjangan 100%, Tunjangan P3K Tahap I, Tunjangan P3K Tahap II dan CPNS BSKDN TA.2025 sebesar Rp.5.907.676.000,- sudah termasuk kekurangan gaji.

Biro Perencanaan akan menyampaikan kembali penghitungan ulang skema efisiensi di lingkup Kemendagri.



Serba Serbi Februari

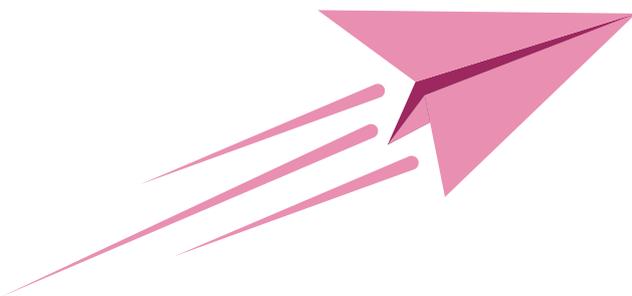
Rapat Koordinasi Pengusulan Baseline Kemendagri TA 2026

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 13.00 s.d 17.00 WIB yang dipimpin oleh Kepala Bagian Anggaran Biro Perencanaan Setjen Kemendagri yang dihadiri oleh Perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

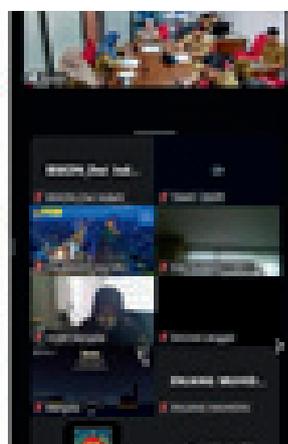
Penyesuaian angka review baseline sesuai dengan usulan, UKE I perlu melakukan edit RKAKL pada tahap Review Baseline sesuai dengan usulan angka dasar UKE I.

Hasil pengguliran angka dasar TA.2026 pada SAKTI untuk BSKDN agar segera menyelesaikan pengguliran pada SAKTI paling lambat hari ini Senin, 10 Februari 2025.

Kelengkapan dokumen baseline TA.2026, BSKDN agar menyampaikan kontrak operasional kantor pada pengadaan CS, pengamanan, sopir, outsourcing sewa mesin fotocopy, kendaraan operasional, dll. Jika terdapat multiyears contract (kontrak tahun jamak) maka agar dilampirkan dokumen pendukung tahun 2026, namun jika tidak terdapat multiyears contract maka agar dilampirkan dokumen pendukung tahun 2025.



KDE	KDE I	Kode	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Anggaran Dasar	Anggaran Realisasi							
12	1201	1201001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
13	1301	1301001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
14	1401	1401001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
15	1501	1501001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
16	1601	1601001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
17	1701	1701001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
18	1801	1801001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
19	1901	1901001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
20	2001	2001001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
21	2101	2101001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
22	2201	2201001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	





Rapat Pembahasan Kendala dan Rekomendasi Hasil Kajian Kemudahan Layanan Perizinan Berusaha Bersama BKPM

Pelayanan Dasar Permohonan izin PBG dan izin persetujuan lingkungan pada dasarnya dilakukan melalui sistem yaitu SIMBG dan AMDLNET. Kedua sistem tersebut saat ini sudah terintegrasi dengan Sistem OSS. Terkait pengajuan KKPR, juga telah tersedia 350 RDTR digital yang sudah terpasang di OSS, sedangkan 60 RDTR sedang dalam proses. Sementara itu untuk PKKPR, terdapat pertimbangan teknis yang diproses sesuai kewenangan dinas teknis.

Masih ditemukan beberapa daerah memiliki perda yang masih bersifat kontra dengan KBLI, sehingga penyesuaian regulasi pusat dengan daerah masih tetap perlu dilakukan. Adapun terkait berbagai inovasi daerah juga masih perlu diintegrasikan dengan implementasi OSS.

Terkait dengan peningkatan literasi pemanfaatan OSS kepada pelaku/calon pelaku usaha, terdapat 3 upaya pendekatan yang dilakukan BKPM yaitu: Penyediaan sistem layanan informasi di dalam OSS; Pelaksanaan kegiatan bimtek dan sosialisasi; serta Pendekatan kegiatan di lapangan seperti asistensi pembuatan NIB. Sementara itu kegiatan lain akan dikoordinasikan.

Pengawasan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini DPMPSTSP bengacu pada Permendagri No. 25 Tahun 2021 memiliki kewenangan yang lebih leluasa dalam monitoring dan evaluasi di lapangan. Pengawasan juga dapat ditingkatkan melalui deteksi permasalahan melalui laporan dari masyarakat.



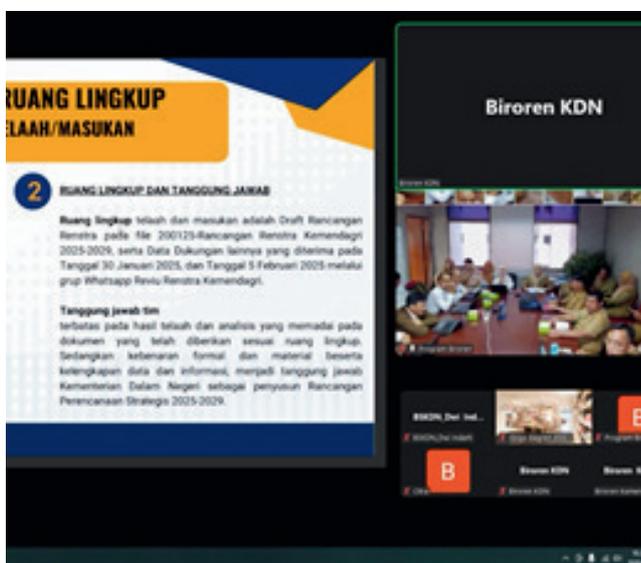
Serba Serbi Februari

Entry Meeting Penelaahan Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 oleh BPKP

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB dipimpin oleh Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Setjen Kemendagri dan dihadiri oleh UKE I Kemendagri dan BPKP.

Rapat ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Setiap UKE I akan di jadwalkan kembali untuk pembahasan terkait masukkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada hari Jumat 14 Februari 2025 dan Senin 17 Februari 2025 wajib ada perwakilan yang hadir dalam pembahasan di RR Program Biro Perencanaan maksimal 2 orang.



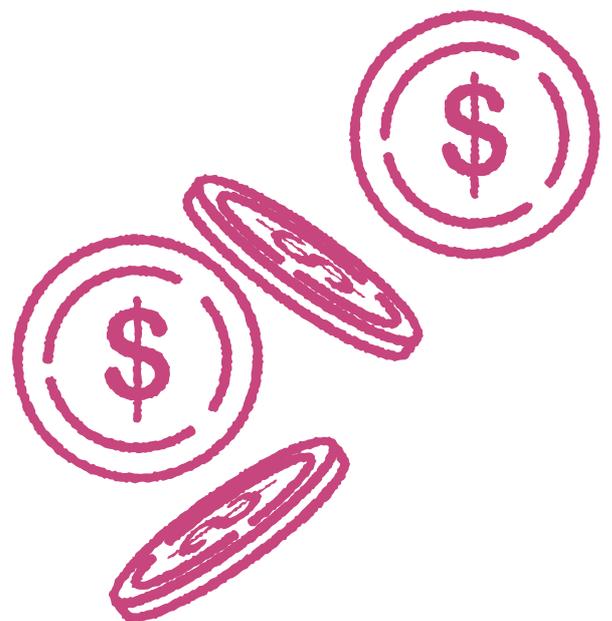
Rapat Entry Meeting BPK RI

Rapat dilaksanakan di Aula BSKDN pkl. 13.00 s.d 14.30 WIB dipimpin oleh Plh. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan di hadiri oleh PPK Lingkup BSKDN, Kepala Bagian, PPTK, BP, BPP, PUM, Pengelola BMN dan PPBJ Sekretariat

Pada rapat tersebut diberitahukan bahwa pemeriksaan akan dilaksanakan selama 75 hari terhitung sejak tanggal 5 Februari 2025.

Akan dilakukan stock opname kas dalam waktu dekat sebelum Tim ke daerah. Pendekatan intern Satker diawali dengan komunikasi yang baik, dokumentasi yang sudah siap disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan diakui apabila benar kegiatan dilaksanakan. Dokumen keuangan sudah disiapkan dengan baik dan lengkap

Untuk pembagian tugas anggota Tim BPK terdiri pemeriksaan kas piutang, aset & persediaan, belanja pegawai, belanja barang selain perjadi, perjadi, belanja modal (pihak ketiga) utk cek fisik sample.



Serba Serbi Februari

Rapat Penyusunan draf Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bagian Perencanaan dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris BSKDN dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Permendagri tentang Pedoman Strategi Kebijakan.

Pada rapat disampaikan diskusi seputar konsep pengaturan kelembagaan dan tata kelola strategi kebijakan di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Pada pembahasan juga diatur seputar pengelolaan penyusunan strategi kebijakan di lingkungan pemprov dan pemkab/pemkot yang mengarah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi riset dan inovasi daerah.

Bagian Perencanaan melaksanakan penyusunan dokumen sesuai garis waktu yang ditentukan dan akan dilaksanakan penjaringan saran serta masukan dari berbagai Unit Kerja internal BSKDN maupun lintas komponen lingkup Kemendagri dan kementerian/lembaga mitra strategis lainnya.



DRAFT

Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024 dan Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Risk Register UPR Lingkup Kemendagri Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 s.d 11.30 melalui zoom meeting dipimpin oleh biro perencanaan dan dihadiri oleh lingkup kemendagri.

Beberapa yang dibahas pada rapat adalah:

- Penilaian terhadap efektivitas implementasi manajemen risiko di masing-masing unit kerja selama tahun 2024.
- Membahas sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan terkait mitigasi dan pengelolaan risiko tercapai.
- Mengidentifikasi risiko baru yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi internal maupun eksternal.
- Pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam penyusunan risk register untuk tahun 2025 di lingkungan Kemendagri.
- Identifikasi dan klasifikasi risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap kegiatan operasional dan pencapaian tujuan.
- Perumusan strategi mitigasi dan penanganan untuk setiap risiko yang teridentifikasi dalam risk register.
- Pentingnya koordinasi antar unit kerja dalam proses penyusunan risk register, dengan melibatkan pihak terkait yang memiliki pengetahuan tentang area risiko masing-masing.
- Penetapan jadwal kegiatan untuk proses penyusunan risk register, dengan target untuk diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.
- Pembentukan tim atau individu yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi dan asistensi.
- Penyusunan laporan yang merangkum hasil evaluasi dan asistensi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil untuk meningkatkan pengelolaan risiko ke depan.
- Pengaturan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua tindak lanjut dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Serba Serbi Februari

Pembahasan penyesuaian anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025

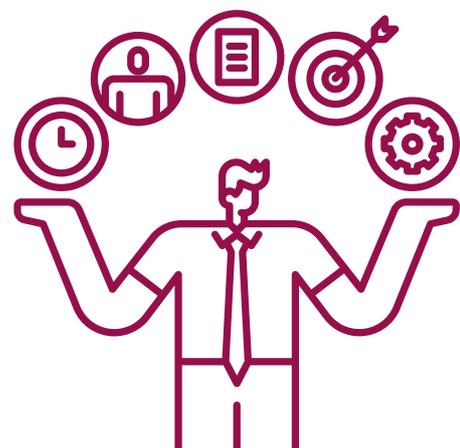
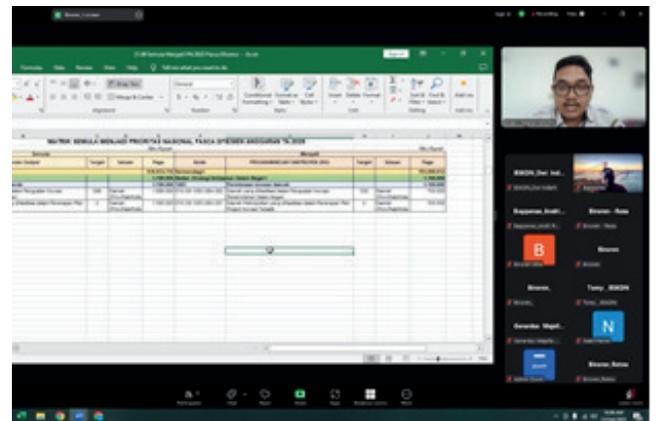
Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB yang dipimpin oleh Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas dihadiri oleh Biro Perencanaan dan Perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Pembahasan terkait penyesuaian target pada kegiatan Prioritas Nasional BSKDN Kemendagri Tahun 2025.

BSKDN Kemendagri mempunyai Program Prioritas Nasional sbb:

- Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi pemdagri semula target 546 Daerah (Prov/Kab/Kota) dengan pagu sebesar Rp.1.690.000.000,- menjadi target 530 Daerah (Prov/Kab/Kota) dengan pagu sebesar Rp.750.000.000,-
- Daerah metropolitan yang difasilitasi dalam penerapan pilot project inovasi tematik semula target 2 Daerah (Prov/Kab/Kota) dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000.000,- menjadi target 2 Daerah (Prov/Kab/Kota) dengan pagu sebesar Rp.350.000.000,-

Bagian Perencanaan melaksanakan penyusunan dokumen sesuai garis waktu yang ditentukan dan akan dilaksanakan penjaringan saran serta masukan dari berbagai Unit Kerja internal BSKDN maupun lintas komponen lingkup Kemendagri dan kementerian/lembaga mitra strategis lainnya.

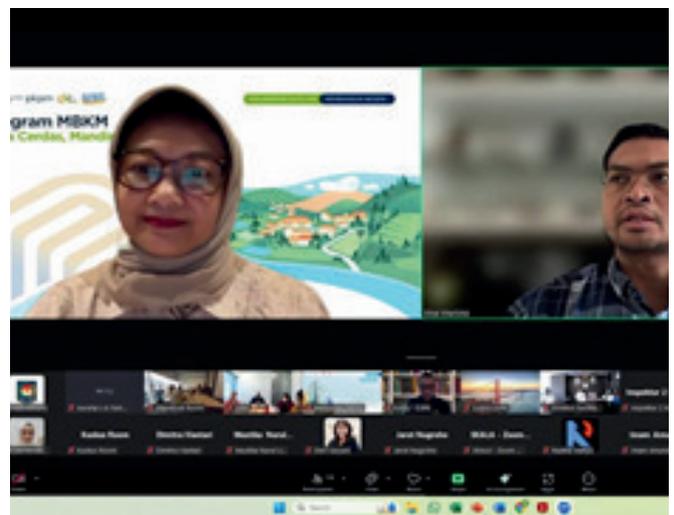


Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama BSKDN Dengan SKALA

Rapat evaluasi pelaksanaan kerja sama antara BSKDN dan SKALA dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Bappenas sebagai Executive Agency, dengan peserta utama dari Implementing Agency, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, turut hadir perwakilan dari SKALA serta unit-unit kerja mitra yang terlibat.

Diskusi dilakukan terkait berbagai tantangan yang dihadapi oleh unit kerja mitra dalam mengimplementasikan kerja sama dengan SKALA. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta aspek administratif yang memerlukan penyempurnaan. Masukan dan saran dari para peserta rapat dikumpulkan untuk perbaikan mekanisme kerja sama ke depan.

Disepakati bahwa perlu adanya perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait, serta perlunya penguatan sumber daya manusia dan teknis untuk mendukung implementasi program kerja sama, dan penjadwalan evaluasi berkala guna memastikan setiap kendala dapat diatasi secara lebih cepat dan efektif.



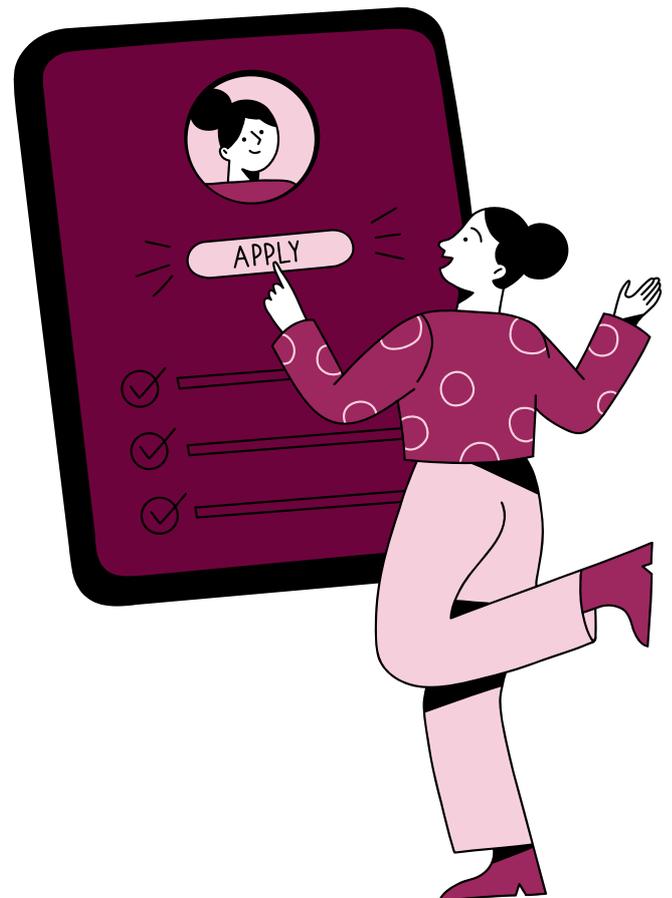
Serba Serbi Februari

Rapat Implementasi Aplikasi Cortex

Rapat dilaksanakan di Command Center BSKDN pkl. 09.00 s.d 12.00 WIB dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan dan dihadiri oleh Narasumber dari KPP Pratama Jakarta Senen, PUM dan para staf pembantu keuangan lingkup Pusat serta Bagian.

Pada rapat tersebut dijelaskan terkait Aplikasi Cortex yang sudah dilaunching oleh Kementerian Keuangan. Diharapkan tahun 2025 aplikasi Cortex tersebut sudah mulai diterapkan oleh BSKDN Kemendagri. Aplikasi itu sendiri meliputi proses pembayaran kode billing, billing terkait SPT; semua jenis setoran didalam SPT (sebagai contoh proses input PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dll).

Pada praktiknya KPP Pratama Jakarta Senen sendiri bersedia membantu memfasilitasi rekan2 dari BSKDN untuk memahami Implementasi Aplikasi Cortex agar semua pertanggungjawaban pajak khususnya dapat lebih rapi dan cermat.



Rapat penyusunan Laporan Kajian Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Perizinan Berusaha

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 s.d 14.00, Penyusunan laporan kajian dibuka oleh Plh. Sekretaris BSKDN. Rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan lokus pengambilan data lapangan.

Telah selesai dilakukan identifikasi dokumen persyaratan dasar perizinan meliputi KKPR, PBG dan Persetujuan Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal) per Lokus dan selanjutnya akan dibuatkan deskripsi dari data yang sudah terkumpul.

Untuk analisis perizinan sektor, tim akan mendalami KBLI 11052 industri air minum isi ulang. Format permintaan data telah disusun, dan masing-masing lokus akan meminta data kepada Dinas Kesehatan.



Serba Serbi Februari

Bimtek Layanan Publik LPePD

Bimtek dilaksanakan pukul 10.00 s.d 15.00, Kegiatan dibuka secara resmi oleh T.R Fahsul Falah, S.Sos, M.Si., Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik.

Pada sesi kegiatan Bimtek berlangsung, terdapat poin-poin penyampaian yang telah terangkum sebagai berikut:

- Penyebarluasan kemanfaatan program aplikasi ini adalah upaya mendukung kebijakan digitalisasi dengan mendorong sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Pengembangan LPePD juga ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital, khususnya di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya menyelenggarakan pelayanan public secara digital;
- LPePD perlu diiringi dengan upaya menumbuhkan ekosistem kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital diperlukan dalam proses transformasi digital yang tengah digalakkan pemerintah mengawal perubahan,

- Dalam implementasinya di daerah, LPePD dapat memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses informasi dan layanan publik tanpa harus datang secara fisik ke kantor pemerintahan. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya transportasi bagi Masyarakat. Proses administrasi dan transaksi dapat menjadi lebih efisien. pemohon dapat mengajukan permohonan atau melengkapi dokumen secara online, mengurangi waktu dan biaya administratif.
- Dari hasil proses pembelajaran dalam Bimtek tersebut, terdapat beberapa hal saran perbaikan seperti optimalisasi fungsi kearsipan pasca penyelesaian dokumen, perlunya fitur reset password, dan meminimalisir error dalam processing dokumen.



Rapat penyusunan Laporan Kajian Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Perizinan Berusaha

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 s.d 15.00 diruang rapat pusat 1 dihadiri oleh seluruh tim yang terlibat.

Tim kajian melanjutkan penyusunan laporan dengan melakukan deskripsi tabel berdasarkan data persyaratan dasar perizinan berusaha yang sudah terkumpul dari 15 lokus.

Rapat diawali dengan melakukan pembahasan syarat dasar KKPR dengan menyusun kembali regulasi dan temuan lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan syarat dasar PBG dan SLF.

Saat ini, Tim kajian masih mendiskusikan dan menyusun laporan syarat dasar persetujuan izin lingkungan dari SPPL, UKL-UPL dan AMDAL.



Serba Serbi Februari

Rapat Reviu Laporan Kinerja TA 2024 Lingkup Kemendagri

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 s.d 12.30 melalui zoom meeting

Laporan kinerja BSKDN telah dilaporkan dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan revisi dari pusdatin.

Bagian perencanaan telah mengikuti arahan dan telah menyusun laporan kinerja TA 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.



Kamis, 13 Februari 2025

Serial	No.	BA Lama	Nama BA Lama	Room
Baiti 1 08.45- 10.15	1	007	Kementerian Sosial	1
	2	003	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi	2
	3	050	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3
Baiti 2 10.30- 12.00	4	049	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4
	5	050	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5
	6	084	Badan Kepegawaian Negara	6
Baiti 3 13.00- 14.30	7	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	7
	8	026	Kementerian Ketenagakerjaan	8
	9	307	Badan Nasional Pemantauan dan Pertolongan	9
Baiti 4 15.00- 16.30	10	010	Kementerian Dalam Negeri	10
	11	050	Kementerian Pemandangan	11
12	054	APR/SPK		12

Rapat Rekonsiliasi Prioritas Nasional Kemendagri TA 2024

Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 17.30 melalui zoom meeting.

Kemendagri mendorong daerah untuk mengusung program prioritas Nasional TA 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas program kegiatan pusat dan daerah dalam rangka pembangunan nasional.

Awal tahun 2024, target RO Renja sebesar 50. Kemudian ada pengurangan pagu sehingga target sempat diturunkan menjadi 15. Selanjutnya, ada dukungan PHLN sehingga target 50 dapat diupayakan.

Setelah berkoordinasi dengan bagian teknis, realisasi riil realisasi fisik sebesar 177. Perekaman sebesar 191 ini masih berupa proyeksi. (akan ada penjelasan detail dan bukti dukungan).

Bagian perencanaan akan terus mengikuti dan memantau sesuai kebijakan yang berlaku

A screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet. The spreadsheet is organized into columns and rows, with data cells containing numerical values. The interface includes the standard Excel ribbon at the top with various tabs like 'File', 'Home', 'Insert', etc. The data appears to be categorized by program and unit, with some cells highlighted in red and others in blue or green. The spreadsheet is viewed through a window titled 'Rapat Rekonsiliasi'.

Serba Serbi Februari

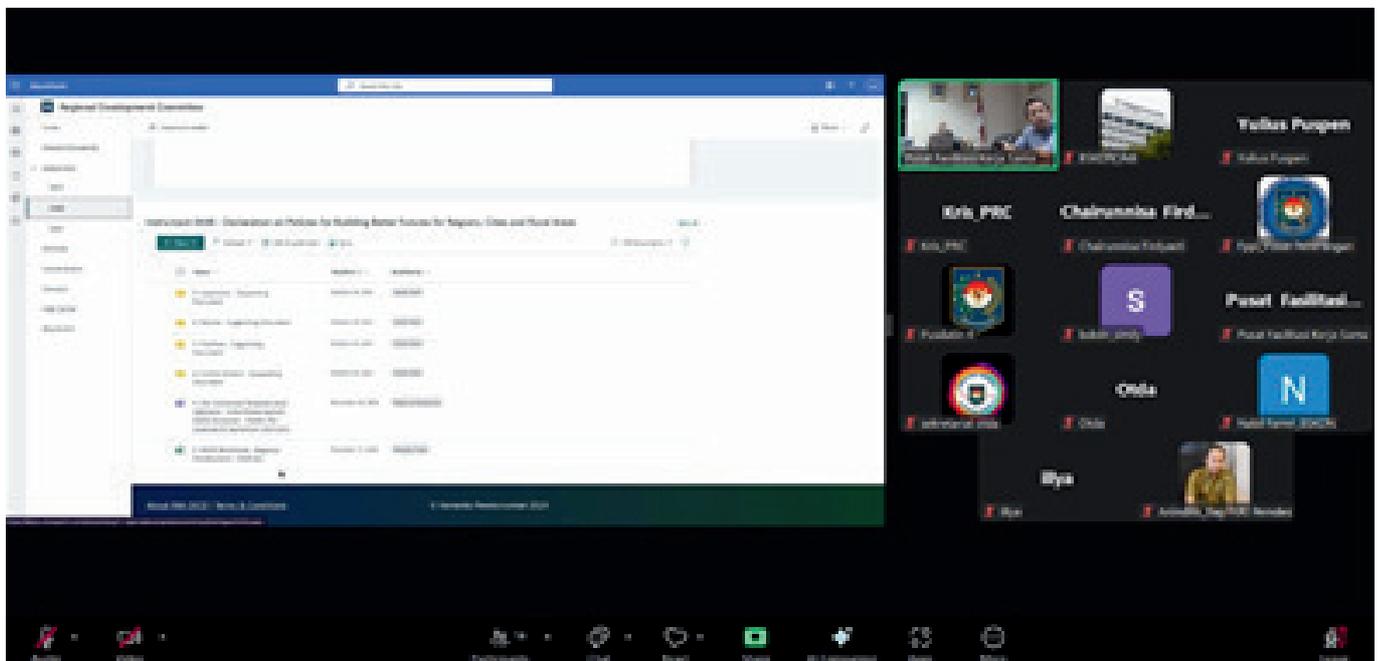
Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengisian Portal INA-OECD

Rapat dilaksanakan pkl. 09.00 s.d selesai melalui zoom meeting.

Pada rapat tersebut membahas mengenai tindak lanjut Pengisian portal INA-OECD dengan batas waktu Pengisian di Triwulan pertama tahun 2025, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait kendala-kendala Pengisian di setiap komponen Kemendagri.

Berdasarkan data yg disampaikan yang telah melakukan pengisian portal INA-OECD yaitu Biro Fasker, Ditjen Bina Bangda, dan Pusdatin.

Berdasarkan data yg disampaikan yang telah melakukan pengisian portal INA-OECD yaitu Biro Fasker, Ditjen Bina Bangda, dan Pusdatin.



Rapat Pembahasan Revisi Permendagri 19 tahun 2020 tentang IPKD

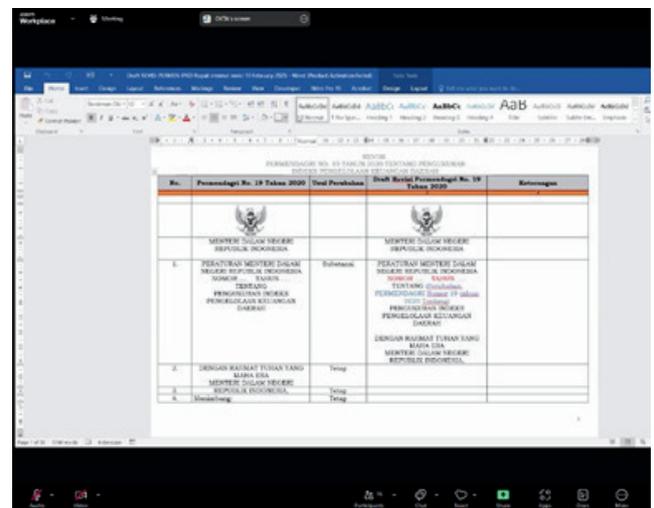
Rapat dilaksanakan secara virtual bersama dengan Tim Penyusun Revisi Permendagri tentang IPKD pada Pusat 3 BSKDN pukul 09.00 s.d 10.00. Rapat dipandu oleh Tim Hukum dan Kerja Sama Bagren dan diikuti oleh seluruh Tim Penyusun Revisi Permendagri tentang IPKD.

Revisi Permendagri tentang IPKD untuk diusahakan diselesaikan pada triwulan 1 2025 namun Kepala Pusat 3 menyampaikan bahwa batas penyelesaian adalah tahun 2025 meskipun mungkin tidak pada Triwulan 1.

Perubahan pengaturan di antaranya dilakukan pengurangan beberapa indikator yang kurang tepat untuk dilakukan pengukuran. Pusat 3 memastikan agar tetap berkomunikasi dengan Ditjen Keuangan Daerah untuk sinkronisasi revisi permendagri.

Pusat 3 agar menarasikan ITKPD untuk dibunyikan dalam permohonan harmonisasi ke Biro Hukum karena menjadi IKU Menteri yang juga memuat IPKD didalamnya.

Bagian Perencanaan siap mengawal harmonisasi dan pengesahan Revisi Permendagri tentang IPKD agar dapat berjalan sesuai rencana.



No.	Permendagri No. 19 Tahun 2020	Dial Provisi	Dial Revisi Permendagri No. 19 Tahun 2020	Keterangan
1.	MENYER TOLAK VEKIB SEPERTI INDONESIA		MENYER TOLAK VEKIB SEPERTI INDONESIA	
2.	PELAYATAN MENTERI DAHAR SEKELAH REPUBLIK INDONESIA SOMER ... KUNING DEWANG PENGALAMAN BERKOR PENGALAMAN KECANTIKAN GEMERAK	Substansi	PELAYATAN MENTERI DAHAR SEKELAH REPUBLIK INDONESIA SOMER ... KUNING DEWANG PENGALAMAN BERKOR PENGALAMAN KECANTIKAN GEMERAK	
3.	DEWANG KALAMAT TULUS YANG KATA DIA MENTER TOLAK VEKIB	Tung	DEWANG KALAMAT TULUS YANG KATA DIA MENTER TOLAK VEKIB	
4.	MENTER TOLAK VEKIB	Tung	MENTER TOLAK VEKIB	
5.	MENTER TOLAK VEKIB	Tung	MENTER TOLAK VEKIB	

Serba Serbi Februari

Rapat Audiensi Kerja Sama BSKDN Kemendagri dengan Yachiyo Engineering Co., Ltd

Kegiatan rapat dibuka oleh Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. selaku Kepala BSKDN dan dihadiri secara langsung oleh:

- T.R. Fahsul Falah S.Sos, M.Si - Kepala Pusat II BSKDN;
- Takashi Toyoda dan tim dari Yachiyo Engineering;
- Perwakilan Pusat Fasilitasi Kerjasama, Setjen Kemendagri;
- Pejabat Struktural dan Fungsional BSKDN Kemendagri;

Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat tersebut, dilaporkan poin-poin pembahasan sebagai berikut

- Yachiyo Engineering Co., Ltd. adalah perusahaan konsultan teknik asal Jepang yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan, pengelolaan sumber daya air, pengolahan limbah, serta pengembangan infrastruktur lingkungan dan perkotaan. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam proyek-proyek internasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

- Yachiyo Engineering telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk Japan International Cooperation Agency (JICA), dalam menerapkan teknologi canggih untuk pemantauan lingkungan berbasis limbah atau Wastewater-Based Epidemiology (WBE). Pendekatan ilmiah tersebut menggunakan analisis air limbah untuk memantau kesehatan populasi. Dengan mengidentifikasi keberadaan patogen, bahan kimia, dan biomarker dalam air limbah, WBE dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren kesehatan di suatu komunitas.



- Metode WBE awalnya dikembangkan untuk pemantauan epidemi penyakit menular seperti COVID-19, polio, dan hepatitis. Namun, perkembangannya juga memungkinkan pemantauan faktor lain yang berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat, termasuk paparan zat berbahaya yang dapat berkontribusi pada stunting.
- Penelitian yang telah dilakukan oleh Yachiyo Engineering Co., LTD. Bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kanazawa University di Bali, menunjukkan bahwa WBE mampu mendeteksi keberadaan SARS-CoV-2 dalam air limbah dari berbagai fasilitas pengolahan air. Data yang diperoleh melalui WBE juga dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menetapkan kebijakan berbasis bukti yang mendukung peningkatan sanitasi, pengelolaan air bersih, serta penguatan program intervensi gizi untuk anak-anak yang berisiko stunting.
- Peluang kerja sama antara Yachiyo Engineering dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sangat besar, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah. Implementasi Wastewater-Based Epidemiology (WBE) berpotensi menawarkan solusi inovatif dalam pemantauan kesehatan masyarakat serta dapat memainkan peran penting dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, perbaikan layanan kesehatan, serta penurunan angka stunting dan perbaikan gizi nasional.
- Berdasarkan hasil diskusi tersebut, BSKDN Kemendagri akan menindaklanjuti rencana kerjasama Yachiyo Engineering terkait Implementasi Wastewater-Based Epidemiology (WBE) dengan pembuatan Letter of Intent (LoI) sebagai kerangka kerjasama awal.
- Berdasarkan rencana kolaborasi tersebut, Bagian Perencanaan akan turut mengawal berbagai hal yang perlu disiapkan untuk mendukung kerjasama antara BSKDN dengan Yachiro Engineering.

Serba Serbi Februari

Rapat Penyusunan Materi Kelembagaan BSKDN

Rapat dilaksanakan di ruang VidCon pukul 15.00 s.d 16.00. Rapat dipandu oleh Tim Hukum dan Kerja Sama Bagren dan diikuti oleh seluruh Tim dengan Tim Perwakilan dari masing masing pusat

Penyusunan materi kelembagaan BSKDN dengan memuat Profil BSKDN, SOTK, Arah dan Kebijakan, Kolaborasi BSKDN dengan pihak luar, TuSi masing masing pusat, dan Penjelasan singkat 4 Indeks di masing masing pusat.

Penyusunan materi kelembagaan BSKDN dengan memuat Profil BSKDN, SOTK, Arah dan Kebijakan, Kolaborasi BSKDN dengan pihak luar, TuSi masing masing pusat, dan Penjelasan singkat 4 Indeks di masing masing pusat.

CONCLUSION



Kegiatan Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jambi

Kegiatan dilaksanakan pukul 14.30 s.d 17.00 berlangsung di Ruang Command Center dipimpin oleh Plh. Ses BSKDN.

Peran DPRD sangat strategis dalam hal perumusan kebijakan dan alokasi anggaran di daerah. Kunjungan ini diharapkan menjadi rujukan untuk membahas strategi kebijakan dan lain hal di Provinsi Jambi

Terkait Pilkada, ada isu bahwa Kepala Daerah tidak dipilih secara langsung, melainkan melalui DPRD. DPRD Provinsi Jambi akan turut mengawal rencana kebijakan tersebut.

Terkait pembentukan BRIDA saat ini belum dilaksanakan, dan sementara kegiatan-kegiatan terkait penelitian masih menggunakan anggaran balitbangda. DPRD Provinsi Jambi juga melihat perlunya mengevaluasi riset-riset di Jambi untuk ditingkatkan, sehingga seimbang antara income dan outcome.

Provinsi Jambi memiliki SDA yang melimpah, namun belum melihat pemanfaatan yang optimal. Kami harap menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, khususnya BSKDN sebagai lembaga think thank, untuk mendorong inovasi dan strategi kebijakan di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi memiliki APBD 4,5 T dan PAD hanya 39%, sementara itu SDA sebagian besar dikelola oleh pihak dari luar daerah. Untuk itu, perlu dirumuskan strategi kebijakan agar pemanfaatan SDA seutuhnya dapat mendatangkan manfaat bagi daerah.



Serba Serbi Februari

Rapat tindak lanjut Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang IKKD

Rapat tindak lanjut Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)

- Penyesuaian terhadap nomenklatur kelembagaan dari

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

- Penyesuaian terhadap metode, variabel, dimensi dan pelibatan pemangku kepentingan terhadap proses pengukuran dan penilaian IKKD.
- Memberikan kepastian kepada Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan pengukuran dan penilaian IKKD.

- Mempercepat penyusunan pedoman umum Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah sebagai turunan atas penetapan Permendagri tentang IKKD untuk kemudian dapat dipedomani pemerintah daerah.
- Hal-hal yang dinilai terlalu teknis dan rigid (mis. penjabaran dimensi, variable dan bobot) ditempatkan pada pedoman umum untuk menghindari seringnya revisi Permendagri apabila terjadi perubahan dan penyesuaian



Rapat revisi laporan akhir Kajian Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Percepatan Perizinan Berusaha

Rapat dipimpin oleh Plh Ses, Tomy V. Bawulang, Ph.D.

Rapat membahas laporan yang sudah telah dikoreksi untuk dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan arahan pimpinan.

Penyusunan laporan akhir telah selesai dikerjakan dan sedang dilakukan pemeriksaan kembali format penulisan laporan oleh Tim Kajian. Laporan akan segera disampaikan kepada Kepala BSKDN untuk meminta arahan lebih lanjut.



Serba Serbi Februari

Pembahasan Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 bersama Kementerian PANRB

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 09.00 s.d 14.00 WIB yang dipimpin oleh Kepala Program Biro Perencanaan Setjen Kemendagri dan dihadiri oleh Perwakilan Kementerian PANRB, Perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Pembahasan terkait pemantapan dok Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029.

Beberapa hal yang menjadi masukan dari Kementerian PANRB terkait Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 yaitu:

- Isu strategis bisa ditungkan dalam portensi dan permasalahan serta kegiatan Prioritas Nasional
- Visi dan Misi agar dikaitkan dengan Presiden terpilih
- Sasaran Strategis agar dilengkapi dengan indikator sasaran strategis ditambahkan kolom IKU dan tambahkan target

The image displays a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide titled "ARSITEKTUR KINERJA DAN KERANGKA LOGIS KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL & INSTANSI PEMERINTAH (KI)" is shown. The slide contains a complex flowchart and table detailing the structure and logic of national and government performance. The table on the left is organized into three main sections: "STRUKTUR ORGANISASI PAKSABERKAS KABINET", "STRUKTUR PERENCANAAN ANKABERKAS", and "STRUKTUR KINERJA NASIONAL". It details various levels of planning from "KABINET" down to "KEMENTERIAN/LEMBAGA" and "KEMENTERIAN/LEMBAGA" down to "KEMENTERIAN/LEMBAGA". The flowchart on the right shows the "Kerangka Logis" (Logical Framework) for "KEMENTERIAN/LEMBAGA" and "KEMENTERIAN/LEMBAGA", starting from "Kebijakan R/L (Program Prioritas, PR)" and "Program R/L" leading to "Sasaran R/L" and "Kegiatan R/L". A Zoom meeting interface is visible on the right side of the image, showing a video call with participants and a list of names including "Dwi Indarti", "Riza Dulkapil", and "Iqbal".

Rapat Penelaahan Dokumen Pendukung Usul Revisi Anggaran Kemendagri TA 2025 Tindak Lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Rapat dilaksanakan via Ms. Teams pkl. 16.00 s.d 17.30 WIB yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Politik dan dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, Kepala Anggaran Biro Perencanaan Setjen Kemendagri dan perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Rencananya akan diadakan 2 kali pertemuan untuk penelaahan pembahasan usulan revisi efisiensi anggaran Kemendagri TA.2025. Diharapkan Kemendagri memberikan penetapan efisiensi belanja Kemendagri kepada Kemenkeu.

Mohon dicek kembali taging pada revisi anggaran, agar tidak terjadi kesalahan dan perubahan penetapan pada efisiensi belanja pada internal Kemendagri. Harapannya bisa cepat selesai terkait revisi efisiensi anggaran, dikarenakan akan berpengaruh pada realisasi Kemendagri TA.2025



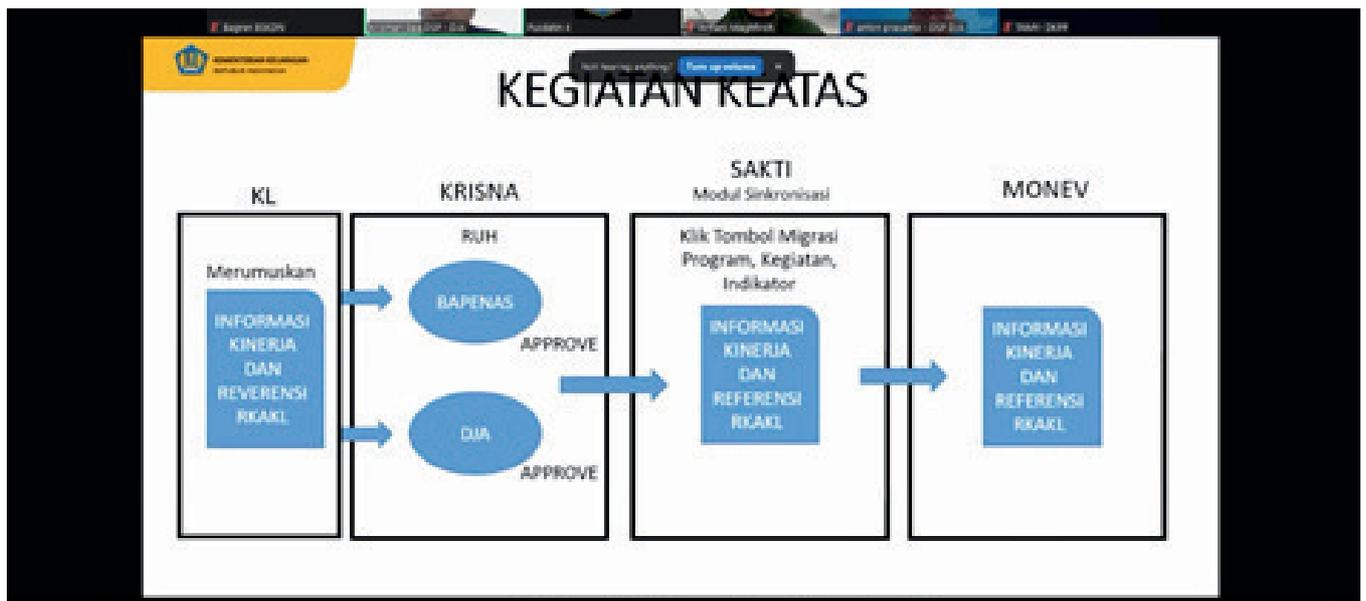
Serba Serbi Februari

Rapat Konsolidasi Dan Pemutakhiran Data Capaian Kinerja Lingkup Kemendagri TA 2024 (SAKTI)

Rapat dilaksanakan pukul 13.00 s.d 16.00 melalui zoom meeting dihadiri oleh kemenkeu, bappenas dan seluruh UKE-I.

Nilai Kinerja Anggaran UKE-I (BSKDN) : perencanaan anggaran sebesar 87,95%, pelaksanaan anggaran sebesar 97,80%, nilai kinerja anggaran 92,88%, efektivitas IKP 59,83% CRO sebesar 100%, efisiensi penggunaan 10% sebesar 100%, efisiensi 15% sebesar 100%.

Bagian perencanaan akan terus memantau dan update terkait data capaian kinerja melalui aplikasi sakti.



Rapat Penelaahan Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Rapat dilaksanakan di Gedung SBP lantai 2 pkl 09.00 s.d 13.00 WIB yang dipimpin oleh Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Setjen Kemendagri yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri dan perwakilan BPKP.

Rapat melakukan penelaahan terhadap rancangan dokumen Renstra Kemendagri 2025-2029. BPKP memberikan saran terkait penyusunan indikator kinerja akan dapat ditemukan cascading dari Indikator Kinerja Utama Kemendagri

Bagian Perencanaan akan menyusun dokumen pohon kinerja BSKDN 2025.



Serba Serbi Februari

Rapat pendampingan penyusunan manajemen risiko tahun 2025

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 s.d 15.00 di aula BSKDN dan dipimpin oleh perencana ahli pertama dan dihadiri oleh perwakilan UKE-II BSKDN.

Rapat ini bertujuan untuk segera menyelesaikan evaluasi manajemen risiko tahunan dengan cara mengumpulkan seluruh UKE-II dan memaparkan segala risiko dan kondisi ditiap tiap bagian.

Rapat pendampingan ini dibantu oleh biro perencanaan sebagai pembimbing dan memantau terlaksananya penyusunan manajemen risiko dari formulir 1-12.



Penelaahan Usul Revisi Anggaran Lingkup Kemendagri TA 2025 Tindak Lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025

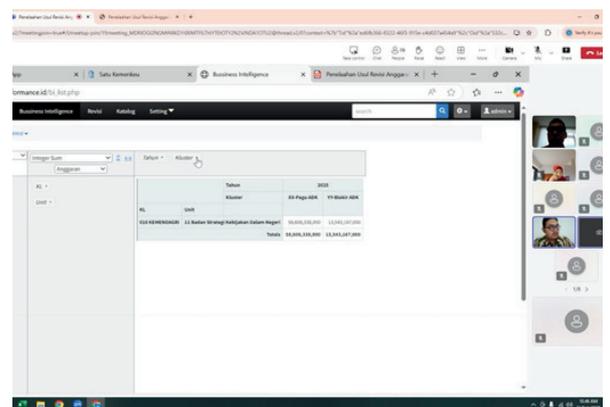
Rapat dilaksanakan via Ms. Teams pkl. 09.00 s.d 15.00 WIB yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Politik dan dihadiri oleh Kementerian PPN/Nappenas, Kepala Anggaran Biro Perencanaan, Kepala Program Biro Perencanaan dan perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Rapat bertujuan untuk koordinasi kesesuaian revisi efisiensi anggaran TA.2025 dengan aplikasi SAKTI.

Terdapat ketidak sesuaian pada aplikasi SAKTI blokir dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- pada blokir 2 (100jt aplikasi IPKD dan 200jt renovasi bangunan), pada blokir A (200jt belanja modal AC) harusnya blokir terbaca berbeda, tapi pada aplikasi SAKTI semua terbaca blokir 2 sebagai tindak lanjut akan diberikan solusinya.

Target Prioritas Nasional BSKDN Kemendagri tidak mengalami banyak perubahan target Prioritas Nasional sbb:

- Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi pemdagri semula target 546 Daerah (Prov/Kab/Kota) menjadi target 530 Daerah (Prov/Kab/Kota)
- Daerah metropolitan yang difasilitasi dalam penerapan pilot project inovasi tematik target 2Daerah (Prov/Kab/Kota) tidak ada perubahan target, targetnya tetap 2 Daerah (Prov/Kab/Kota)



Serba Serbi Februari

Rapat konsolidasi kegiatan prioritas Kemendagri 2025

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 15.00 s.d 17.00 WIB yang dipimpin oleh Bpk Sekjen Kemendagri yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Rapat bertujuan untuk pemantapan program prioritas masing-masing UKE I Kemendagri termasuk BSKDN.

BSKDN mengusulkan 3 kegiatan prioritas sbb:

- Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp. Rp. 1.690.000.000 output kegiatannya Terselenggaranya Pelaporan dan Penilaian Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri berbasis Indeks Inovasi Daerah pada 546 Pemerintah Daerah, Rekomendasi Kebijakan untuk 38 wilayah Provinsi yang merupakan hasil evaluasi atas pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2024 dan Pelaksanaan Inovative Government Award (IGA).
- Penguatan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000 output kegiatannya Pemberian rekomendasi penguatan strategi kebijakan pusat dan daerah dapat mencakup beberapa aspek yang akan memperkuat hubungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas kebijakan yang diimplementasikan. Dasar topik pelaksanaan rekomendasi dilakukan berdasarkan topik-topik isu strategis yang diampu oleh seluruh UKE I lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebesar Rp. Rp. 540.000.000 output kegiatannya Penilaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD); dan Hasil ITKPD akan disusun dalam bentuk rekomendasi bagi Kemendagri dan pemerintahan daerah terkait pembinaan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

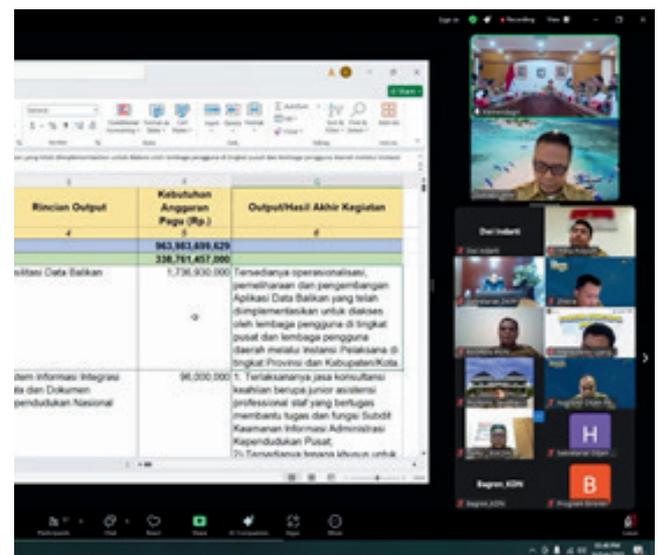
Workshop Pemuktahiran Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2025

Rapat dilaksanakan via Ms. Teams pkl. 09.30 s.d 12.00 WIB yang dipimpin oleh Made Cana Armaya dan perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri dan K/L lainnya.

Rapat bertujuan untuk koordinasi kesesuaian revisi efisiensi anggaran TA.2025 dengan aplikasi SAKTI.

Rapat ini bertujuan untuk petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L dan telah dibuka kembali pemuktahiran RPD Halaman II DIPA Periode Triwulan I Tahun 2025. TW 1 kita tetap kita revisi hal 3 dipanya, namun seandainya di TW 1 masih ada deviasi juga kita sesuaikan, sambil revisi TW 2 April 2025. Anggaran yang terkena efisiensi tahun 2025 agar dimasukkan RPDnya pada bulan Desember

Halaman III DIPA berisi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang disusun per jenis belanja (Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial) halaman III DIPA menjadi dasar acuan dalam pencairan satker.



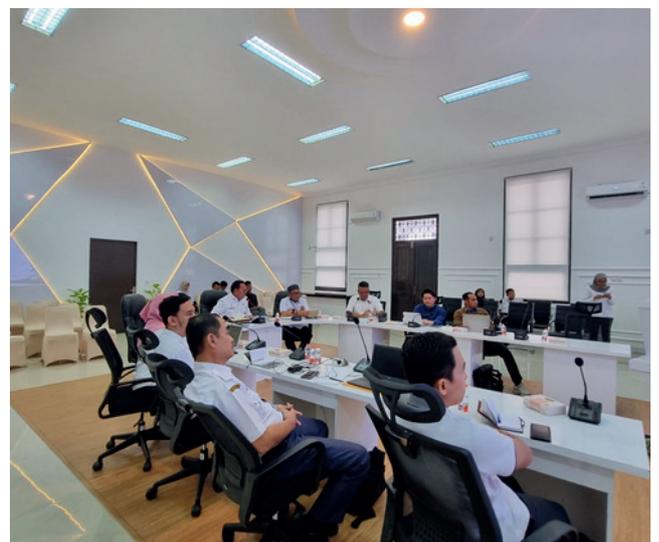
Serba Serbi Februari

Giat Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrim melalui Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peserta rapat terdiri dari Sekretaris BSKDN, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian SDMO, Fungsional Analis Kebijakan dan Fungsional Statistisi Bersama Bapak M. Syahrul beserta 2 orang staf dari BPJS Ketenagakerjaan.

Rapat diawali dengan Penjelasan singkat oleh kepala Bagian Perencanaan dan dibuka oleh Bapak Sekretaris BSKDN. Rapat membahas terkait Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BSKDN Kemendagri. Direncanakan pada tahap awal akan dilakukan kunjungan ke Prov. Jambi pada tanggal 3 Maret 2025 dan ke Kab. Minasaha pada tanggal 10 Maret 2025 sebagai best practice UCJ di daerah.

Terdapat 4 poin pada pembahasan, yaitu: (1) Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BSKDN Kemendagri dalam Upaya mendorong percepatan capaian UCJ dan Perlindungan bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui APBD dan APBDes; (2) Kebijakan Indikator UCJ sebagai salah satu indikator pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD); (3) Dukungan pada Kegiatan Rakor Kepala Daerah dan UCJ Award; dan (4) Penyusunan dan Penertiban SE Mendagri dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).



Kegiatan Rapat Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BSKDN Kemendagri

Rapat dilaksanakan di command center pkl. 10.00 sampai selesai di pimpin oleh Sekretaris Badan dan perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu poin kerjasama terdapat di dlm sasaran prioritas nasional (RKP 2025), yaitu SDM berkualitas melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan serta penguatan karakter jati diri bangsa. Terdapat 4 kategori kluster yg akan dikombinasi dg 3 regional. Ada daerah yg sdh memiliki kebijakan, tersedia anggaran dan dijalankan, namun ada juga daerah yg sdh ada kebijakan tapi tdk ada anggaran, dan terdapat juga daerah yang blm ada kebijakan dan tdk tersedia anggaran



Kerjasama yg dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BSKDN Kemendagri sbg upaya utk mendorong percepatan capaian UCJ dan perlindungan bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui APBD dan APBDes. Kebijakan indikator UCJ sebagai salah satu indikator pada IPKD. sementara permendagri yang berkaitan dg IPKD sedang proses revisi, diharapkan terkait perlindungan sosial sdh ada regulasinya dan perlu dikaji terlebih dahulu.

Dukungan pada kegiatan rakor kepala daerah dan ucj award dilaksanakan saat rakornas. Berdasarkan hasil diskusi penandatanganan Perjanjian Kerjasama akan dilaksanakan pada tanggal 7 maret, dan akan dilaksanakan perjalanan dinas ke jambi, dan minahasa untuk menggali informasi lebih lanjut.

Serba Serbi Februari

Penyampaian policy brief dan LHR SPIP Kemendagri periode 2023-2024 serta laporan manajemen risiko dan kapabilitas APIP tahun 2024

Rapat dilaksanakan pukul 11.00 s.d 13.00 di ruang SBP Kemendagri dipimpin oleh kepala biro perencanaan kemendagri dan dihadiri UKE-I.

Kemendagri telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sasaran yang tidak menghasilkan outcome, indikator kinerja yang belum spesifik mengukur kinerja, target kinerja yang kurang relevan dan lain sebagainya melalui revisi Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 yang telah diterbitkan Pemendagri No 4 tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri No.67 Tahun 2020 ana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 tentang Rencana.

Telah disusun Rancangan SOP Manajemen Risiko dan SOP SPIP di lingkungan Kemendagri. Telah digunakan aplikasi E-integrity BPKP dala penilalar SPIP 2023/2024 dan sosialisasi penggunaan aplikasi Risk Management Information System (RMS).

Telah dimasukkan indikator SPP dan Manajemen Risiko tingkat kementerian sebagai kinerja pimpinan yang dituangkan dalam dokumen revisi Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 dan untuk kinerja Eselon I dimasukkan dalam rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029.

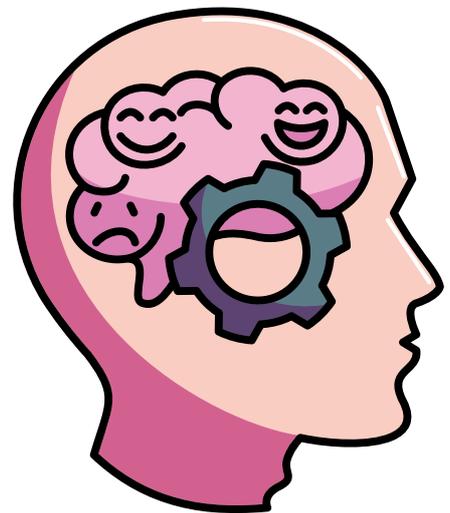


Laporan Revisi Permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman litbang

Perubahan Terminologi dengan Memperbaiki Nomenklatur Penelitian dan Pengembangan menjadi Strategi Kebijakan. Penyesuaian isi dan definisi untuk memperjelas tahapan dalam menyusun rekomendasi kebijakan strategis

Penambahan bab tentang integrasi teknologi dalam tahapan pengambilan kebijakan. Memperjelas Kedudukan dan Tanggung jawab Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam lingkup Kementerian dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dasar pelaksanaan BSKDN dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Permendagri Nomor 4 tahun 2024.



Serba Serbi Februari

Kegiatan Rapat Kerjasama BSI dengan BSKDN Kemendagri

Kerjasama yang dilakukan untuk mempersiapkan penguatan dan pertumbuhan ekonomi syariah di daerah sebagai motor penggerak ekonomi daerah mencapai target desentralisasi pertumbuhan 8% di masing-masing daerah.

Potensi ekosistem ekonomi syariah di daerah luar biasa besar, sehingga dapat membangun ekonomi kerakyatan, mendorong UMKM daerah maju, dan tumbuhnya angka keuangan syariah diatas rata-rata pertumbuhan keuangan konvensional.

BSI telah menjalin kerjasama dengan Keuda dan Bina pemdes di Kemendagri, dengan adanya kerjasama antara BSI dan Ditjen Keuda menghasilkan sentralisasi data di Keuda, sehingga data yang rilis dapat terserap menjadi satu tidak terpisah – pisah dan dapat menjadi support dalam pemberian kebijakan, dan ada sikeudes untuk kerjasama dengan bina pemdes.

Arah kerjasama yang dilakukan untuk membahas strategi pertumbuhan ekonomi syariah secara luas untuk mendorong kapasitas dan kemandirian fiskal di daerah. BSI tidak bisa mendapatkan parameter-parameter yg diperlukan utk mendapatkan hasil kebijakan, shg harapannya dengan adanya kerjasama dengan BSKDN Kemendagri bisa mendapatkan hasil kebijakan yang lebih konkrit

Kemendagri sebagai binwas memiliki tanggung jawab penguatan kapasitas kemandirian fiskal daerah. sehingga perlu dorongan secara sistemik dlm kerangka tuis bskdn, hasil kajian nanti akan disosialisasikan bersama utk edukasi kpd daerah.



Berdasarkan hasil diskusi perlu dibuat MOU antara BSI dan BSKDN Kemendagri, perlu dibuatkan target kinerja dan perencanaan 5 tahun kedepan, tidak hanya kajian tetapi ada tindak lanjut dari kajian itu sebagai payung hukum kedepannya, selain itu juga BSI dan BSKDN Kemendagri perlu bersurat kepada pimpinan fasker Kemendagri, dan akan diadakan pertemuan lanjutan kembali.



Serba Serbi Februari

Membangun SDM Berkualitas dengan investsi penuh berkah

Kegiatan dilaksanakan di kantor BSKDN (Command Center) dari pukul 07.00 s.d 15.00 dihadiri oleh seluruh pegawai BSKDN

Kegiatan terdiri dari berbagai acara yaitu:

- Olahraga dan sarapan bersama
- Sosialisasi produk BSI
- Pelaksanaan ceramah ramadhan 1446H

Kegiatan ini bertujuan untuk penutupan sebelum melaksanakan puasa ramadhan dan sebagai menyambut bulan ramadhan. Seluruh pegawai BSKDN mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan penuh antusias. Kegiatan ini diakhiri dengan kegiatan saling berjabat tangan dan bermaaf-maaf an.



Rapat Harmonisasi Permendagri No.38/2020

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 13.00 s.d 14.30 WIB dipimpin oleh Analis Hukum pada Bagian Perundang-undangan Biro Hukum yang di hadiri oleh Perwakilan, Bagian Perencanaan BSKDN, dan Pusat 1 (Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri).

Perbaikan draft Rancangan Permendagri tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) pasal per pasal. BSKDN telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan mendapatkan kesepakatan bahwa data di IKKD akan mengambil sebagian data dari LPPD Dirjen Otda. Tedapat tumpukan tindih dimensi di IKKD sekitar 30% dengan LPPD milik Dirjen Otda.



Serba Serbi Maret

Rapat Persiapan Sosialisasi Kegiatan Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik

Tujuan kegiatan sosialisasi utk memprkenalkan kpd seluruh stakeholder, terutama wilayah metropolitan sasaran yaitu mebidangro (medan), mamminasatapa (makassar), dan wilayah metropolitan rujukan yaitu gerbangkertosusila (surabaya), cekungan bandung (bandung)

Sosialisasi akan dilaksanakan scr daring dan luring tgl 7 maret 2025 di command center, dg mengundang 3 narasumber (KemenPAN/RB, Bappenas, UI).

Kontrak kajian di wilayah rujukan dilaksanakan bulan maret s/d juli 2025, dg keluaran laporan kajian yg berisikan kondisi penerapan dan dampak inovasi tematik unggulan daerah asal, keseuaian inovai tematik unggulan wilayah metropolitan rujukan dg kondisi dan permasalahan wilayah metropolitan sasaran, kesimpulan dan rekomendasi.

Kontrak kajian di wilayah metropolitan sasaran, yg dilaksanakan maret s/d juli 2025, dg keluaran laporan kajian yg berisi metode utk penerapan inovasi tematik unggulan ke wilayah metropolitan sasaran, pendampingan penerapan replikasi inovasi tematik di wilayah sasaran, instrumen monitoring dan evaluasi tahap 1 dan monev tahap 2



Rapat Pembahasan Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan SKALA

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 11.00 s.d 12.30 WIB dipimpin oleh Bapak Kaban yang di hadiri oleh Perwakilan SKALA, Bagian Perencanaan BSKDN, dan Pusat Inovasi.

Kerja Sama 10 pemerintah daerah dengan SKALA telah menghasilkan sekitar 70 policy brief dengan berbagai konteks yang berbeda di setiap daerah seperti contohnya isu masyarakat adat, isu lingkungan, isu public financial management dan banyak isu lainnya.

Skala berencana akan bekerja sama juga dengan LAN terkait dengan publikasi dan Policy Brief. Mengawal Permendagri terkait tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di daerah dan lingkungan kementerian dalam negeri, termasuk memperhatikan pembinanya, insentif, database di daerah dan pengembangan kapasitasnya.

LAN selaku instansi Pembina akan merevisi modul pelatihan dan pengayaan, diharapkan BSKDN untuk bekerjasama membuat modul dan membantu merevisi. SKALA akan mulai mengumpulkan data dengan mitra kerja samanya, termasuk BSKDN.



Serba Serbi Maret

Rapat Pembahasan Indikator ITKPD Pada Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

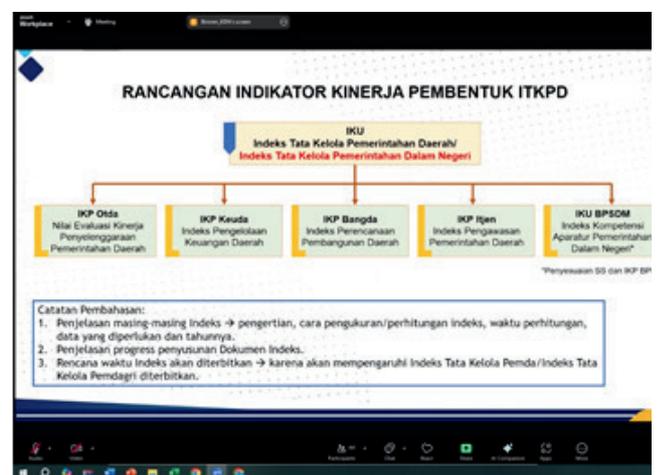
Rapat dilaksanakan pkl 10.00 s.d 13.00 WIB via zoom meeting yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan yang dihadiri oleh Kepala Bagian Program Biroren, Kepala Kapus Kewilayahan dan Perwakilan masing-masing UKE I Kemendagri.

Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri merupakan gabungan dari indeks seluruh UKE I Kemendagri dan bagian dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Kepala Pusat Kewilayahan berencana Tahun 2026 untuk membuat kegiatan Rakornas dengan daerah, agar daerah dapat mengetahui apa yang dicapai dan evaluasinya. ITKPD menggunakan sistem sekunder, untuk mempermudah penginputan di daerah

Dalam pengukuran seluruh indeks pada UKE I Kemendagri harus ada kesepakatan dan akan diskusikan lebih lanjut terkait teknis, bersama para UKE I Kemendagri.

Dalam pengukuran seluruh indeks pada UKE I Kemendagri harus ada kesepakatan dan akan diskusikan lebih lanjut terkait teknis, bersama para UKE I Kemendagri.



Rapat Kajian Penurunan Kemiskinan Melalui Percepatan Dan Kemudahan Perizinan Berusaha Daerah

Rapat dilaksanakan pada pkl 10.00 s.d 11.00 di Ruang Video Conference dipimpin langsung oleh Bapak Kepala BSKDN.

Agenda Rapat membahas finalisasi dokumen Kajian Penurunan Kemiskinan Melalui Percepatan Dan Kemudahan Perizinan Berusaha Di Daerah yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun dokumen yang disampaikan terdiri dari Surat Pengantar, Policy Brief dan Policy Paper.

Dilakukan perbaikan yang berfokus pada 5 rekomendasi meliputi: percepatan penyusunan RDTR Digital, percepatan proses verifikasi teknis terkait PBG, simplifikasi pemenuhan syarat administrasi untuk syarat persetujuan lingkungan, koordinasi bersama dengan K/L terkait untuk penguatan regulasi kemudahan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan yang mengatur pemenuhan persyaratan dasar, dan Penyusunan panduan operability sistem OSS dengan aplikasi pendukung di daerah.

Berbagai studi kasus yang telah dibahas di dalam dokumen final kajian dapat dijadikan referensi strategi kebijakan untuk dapat dipelajari oleh para analis kebijakan, dan mitra BSKDN seperti SKALA. Berdasarkan dokumen akhir kajian (Policy Brief dan Policy Paper), selanjutnya akan disusun bahan materi dalam format Power Point untuk dipaparkan kepada Menteri Dalam Negeri;



Serba Serbi Maret

Rapat Pembahasan Tindaklanjut Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan SKALA

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB di RR Vidcon dipimpin oleh Kepala BSKDN yang dihadiri oleh perwakilan dari SKALA dan perwakilan Pusat maupun Bagian lingkup BSKDN.

Kemendagri blm memiliki dokumen tata kelola jabatan fungsional anjak, sehingga BSKDN diminta untuk menyelesaikan Permendagri dan SKALA membantu dalam pelaksanaannya.

Diperlukan pembuatan database jabfung Kemendagri dan daerah. Perlu training untuk kepala daerah di 10 wilayah kerjasama, rencana penyelenggaraan mulai dari awp semester pertama dan akan dibuatkan kajiannya.

Workshop Kemendagri dengan mengumpulkan semua anjak diminta utk menyusun abstrak policy brief yang nantinya akan dikompetisikan dan mjd calon kandidat utk brgkt di australia, dg target 1 batch 30 org.

Pusat inovasi diminta untuk bekerjasama dengan pusat 1 dari aspek politiknya, dan bagren menyusun agenda mulai dari jumlah peserta, dibuatkan kriteria peserta, pendamping kepala daerah, dan disusun implementasinya.

Command center akan bekerja menggunakan AI, cara kerjanya dengan mengidentifikasi field” data yang berkaitan dg BSKDN, masing” pusat harus memiliki pemangku data, perlu diidentifikasi di tingkat BSKDN dan dikaitkan dengan database yang ada di Kemendagri. Berkaitan dengan replikasi inovasi yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi inovasi yg berkaitan dg 8 poin astacita, setiap pusat harus mencari mitra lebih bervariasi terutama dari sektor pengusaha



Rapat Kerjasama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan Taspen

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB di Kantor Pusat PT TASPEN dipimpin oleh Ibu Harini (Head of Service and Membership Division) yang dihadiri oleh perwakilan dari PT TASPEN dan perwakilan BSKDN.

Jika ada program/layanan, sebaiknya melakukan Advokasi dan Edukasi langsung ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan Surat Edaran dan Administrasi.

Menyiapkan Business Planning (rencana) agar Kerjasama bersifat Sustainable (keberlanjutan) dan tidak hanya 1 kali kegiatan saja. Menyiapkan Bank Data untuk mendukung kerja sama dan mempermudah pelaksanaan program ataupun penyusunan kajian. Memberikan bantuan dan fasilitasi jaminan pensiun kepada pegawai PPPK.



Serba Serbi Maret

Rapat Pembahasan Tindaklanjut Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan SKALA

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB di RR Vidcon dipimpin oleh Kepala BSKDN yang dihadiri oleh perwakilan dari SKALA dan perwakilan Pusat maupun Bagian lingkup BSKDN.

Kemendagri blm memiliki dokumen tata kelola jabatan fungsional anjak, sehingga BSKDN diminta untuk menyelesaikan Permendagri dan SKALA membantu dalam pelaksanaannya.

Diperlukan pembuatan database jabfung Kemendagri dan daerah. Perlu training untuk kepala daerah di 10 wilayah kerjasama, rencana penyelenggaraan mulai dari awp semester pertama dan akan dibuatkan kajiannya.

Workshop Kemendagri dengan mengumpulkan semua anjak diminta utk menyusun abstrak policy brief yang nantinya akan dikompetisikan dan mjd calon kandidat utk brgkt di australia, dg target 1 batch 30 org.

Pusat inovasi diminta untuk bekerjasama dengan pusat 1 dari aspek politiknya, dan bagren menyusun agenda mulai dari jumlah peserta, dibuatkan kriteria peserta, pendamping kepala daerah, dan disusun implementasinya.

Command center akan bekerja menggunakan AI, cara kerjanya dengan mengidentifikasi field” data yang berkaitan dg BSKDN, masing” pusat harus memiliki pemangku data, perlu diidentifikasi di tingkat BSKDN dan dikaitkan dengan database yang ada di Kemendagri. Berkaitan dengan replikasi inovasi yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi inovasi yg berkaitan dg 8 poin astacita, setiap pusat harus mencari mitra lebih bervariasi terutama dari sektor pengusaha



Rapat Kerjasama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan Taspen

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB di Kantor Pusat PT TASPEN dipimpin oleh Ibu Harini (Head of Service and Membership Division) yang dihadiri oleh perwakilan dari PT TASPEN dan perwakilan BSKDN.

Jika ada program/layanan, sebaiknya melakukan Advokasi dan Edukasi langsung ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan Surat Edaran dan Administrasi.

Menyiapkan Business Planning (rencana) agar Kerjasama bersifat Sustainable (keberlanjutan) dan tidak hanya 1 kali kegiatan saja. Menyiapkan Bank Data untuk mendukung kerja sama dan mempermudah pelaksanaan program ataupun penyusunan kajian. Memberikan bantuan dan fasilitasi jaminan pensiun kepada pegawai PPPK.



Serba Serbi Maret

Koordinasi Strategis Pelaksanaan Anggaran Pasca Kebijakan Efisiensi Kemendagri Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pukul 10.00 - 12.00 WIB di ruang Rapat Kepala Biro Perencanaan Lt. 6 Gedung B dan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan seluruh UKE I lingkup Kemendagri.

Dalam rapat dilakukan pembahasan terkait rencana pemenuhan tucin 100% lingkup Kemendagri yang sudah di tahap paraf kooordinasi dari Kementerian terkait. Seluruh UKE I diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk Tucin 100% dan disampaikan melalui Nota Dinas ke Biro Perencanaan Setjen Kemendagri.





Rapat Kerjasama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan Koso Nippon

Kegiatan Rapat dilaksanakan pada pkl 10.00 - 12.15 WIB di Ruang Rapat Pusat 2, Gedung Krisna lantai 3 (tiga), dan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala BSKDN.

Kegiatan Rapat dihadiri oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan KKPP (Pusat 2), Itada Taki dan Hagusa Masahiro dari Koso Nippon, serta Pejabat Struktural dan Fungsional dari Pusat 2, Bagian Perencanaan, dan Bagian Umum.

BSKDN akan terus berkomunikasi dengan daerah untuk mereplikasikan Program Review. Tahun 2025, sosialisasi Program Review ditargetkan dapat mencakup seluruh provinsi. Adapun dalam penerapannya juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara langsung, terutama dari kelompok yang lebih beragam, agar esensi program dapat dipahami sesuai tujuan pengagasnya.

Tantangan penyerapan tenaga kerja dan standar gaji di beberapa daerah, seperti di Gorontalo, menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran rendah, PDRB per kapita menurun. Oleh karena itu, Program Review berperan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui program yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Program Review juga dapat digunakan untuk melihat efektifitas inovasi di daerah yang potensial. Melalui Program Review, dapat dilihat praktik baik inovasi tersebut serta manfaatnya bagi masyarakat, sehingga dapat direplikasikan di daerah lain.

Kedepannya sangat memungkinkan pelaksanaan Program Review dapat didukung melalui aplikasi. Seperti di Jepang ada Aplikasi Liqlid yang dikembangkan Hiroyuki Kurimoto, untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Program Review.

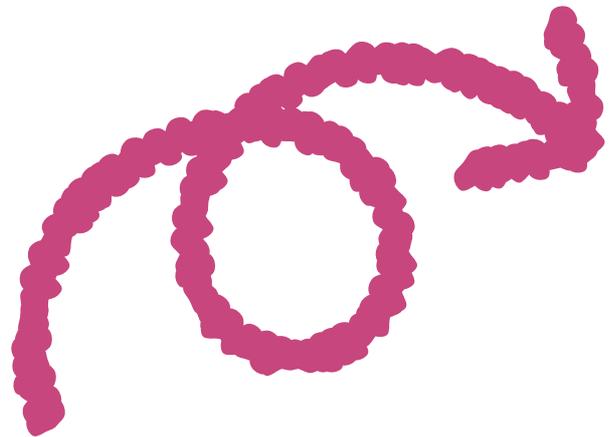
Serba Serbi Maret

Rapat Pembahasan Pelaksanaan Anggaran Pasca Kebijakan Efisiensi dan Tunjangan Kinerja 100%

Rapat dilaksanakan ruang rapat Aula BSKDN Kemendagri pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan yang dihadiri oleh Perwakilan masing-masing Pusat dan Bagian serta Bendahara masing-masing Pusat dan Bagian.

Rapat bertujuan untuk koordinasi masing2 Pusat dan Bagian terkait pembahasan kenaikan tunjangan kinerja 100% pada pegawai ASN di BSKDN Kemendagri.

Kekurangan tunjangan kinerja 100% pada BSKDN Kemendagri sebesar Rp.4.371.283.000,- dalam hal ini, akan di akomodir menggunakan anggaran internal BSKDN Tahun 2025



Rapat Sosialisasi Kegiatan Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi

Rapat dilaksanakan di Command Center BSKDN jam 09.00 s.d 12.00 Kegiatan dihadiri oleh para undangan dari Ditjen Adwil, Kemenpan-RB, KemenPPN/Bappenas, UI, BRIN, para pejabat fungsional tertentu, Kasubbag TU dan para fungsional umum di lingkungan Pusat IV, serta undangan dari 25 Pemda (4 Provinsi dan 21 Kab/Kota) baik daring maupun luring.

Kegiatan ini adalah salah satu dari dua kegiatan Program Prioritas Nasional yang dimiliki oleh BSKDN tahun 2025

- Ada 10 daerah Metropolitan sesuai dengan PP No 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
- Untuk tahun 2025 daerah rujukannya: Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung dan Gerbangkertosusilo (Surabaya)
- Dan daerah Penerapannya: Wilayah Metropolitan Mebidangro (Medan) dan Mamminasatapa (Makassar)

Ada beberapa narasumber diantaranya:

* Dr. Amran (Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil) dengan judul paparan: Kerjasama daerah dan pengembangan 10 wilayah metropolitan.

* Swasti Kirana Putri (Analisis Kebijakan Madya Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kemenpan-RB), dengan judul paparan: Strategi Pengembangan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

* Amos Prima Gracianto (Perencana Ahli Muda Direktur Pembangunan Daerah, KemenPPN/Bappenas), dengan judul paparan: Sasaran Pembangunan Wilayah Metropolitan terkhusus Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kab Deli Serdang, Kab Karo) dan Mamminasatapa (Kota Makassar, Kab Maros, Kab Gowa, Kab Pangkajene dan Kepulauan, Kab Takalar).

* Dr. Ova Chandra Dewi (Dosen Universitas Indonesia), dengan judul paparan: Strategi Pengembangan dan Replikasi Inovasi Tematik Urban Planning dan Smart City.

Serba Serbi Maret

Rapat Internal Bagian Perencanaan

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB di RR. Bagian Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan yang dihadiri seluruh pegawai Bagian Perencanaan.

Pembahasan terkait evaluasi kegiatan triwulan I dan progres kegiatan triwulan II. Bagian Perencanaan harus lebih kompak dalam kegiatan maupun proses pelaksanaan



Adapun progres pada setiap masing tim:

- PPA (sedang dalam proses kekurangan tunjkin 100% dan diakomodir anggarannya internal untuk menutupi kekurangan, proses revisi KPA dan kesepakatan kegiatan ITKPD antara Pusat Kewilayahan dan Biro Perencanaan)
- Monev (Lapkin sudah selesai tinggal proses cetak, Penyusunan Rencana Aksi Triwulan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sudah dilaporkan dan lap. TW I pada PN sudah di lap. ke Bappenas)
- Kerjasama dan PerUndang-undangan (sedang dalam penyelesaian revisi Permendagri 17/2016, dan mengikuti proses kerjasama yang ada di lingkup BSKDN)
- Data dan Knowledge Management (pengumpulan data pada setiap pusat 1 s.d 4 di lingkup BSKDN)

Konsolidasi dan Koordinasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Monev Setjen Kemendagri dan selanjutnya teknis rapat oleh Fungsional Perencana Pertama Monev dan Pelaporan Kinerja Setjen Kemendagri, di hadiri oleh perwakilan dari BSKDN dan seluruh unit kerja ess I lingkup Kemendagri.

Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendagri tahun 2024 sebesar 93,78 mengalami penurunan 1,77 dari tahun 2023 yaitu sebesar 95,55. Penurunan tersebut disebabkan karena aspek efisiensi yang terdiri atas penilaian terhadap penggunaan SBK dan efisiensi SBK Kemendagri belum optimal, khususnya pada Ditjen Polpum dan Ditjen Adwil



Nilai kinerja anggaran BSKDN mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 90,82 menjadi 98,84 pada tahun 2024. Nilai kinerja perencanaan anggaran 99,87 dengan efektivitas IKP 99,57 dan CRO 100, sementara efisiensi penggunaan SBK 100 dan efisiensi SBK 100.

Bagian perencanaan akan terus mengawal kegiatan agar sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan RPD hingga akhir TW I dan akan melakukan penyesuaian pada TW II

Bagian perencanaan akan terus memaksimalkan capaian nilai kinerja anggaran pada setiap pelaporan triwulan melalui penguatan koordinasi antara pengelola aplikasi SMART kemenkeu dengan pengelola aplikasi SAKTI/SAS terkait capaian RO. Seluruh unit kerja agar melakukan efisiensi anggaran dengan penggunaan indikator SBK (SBKU dan/atau SBKK) pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya dalam RKA/KL.

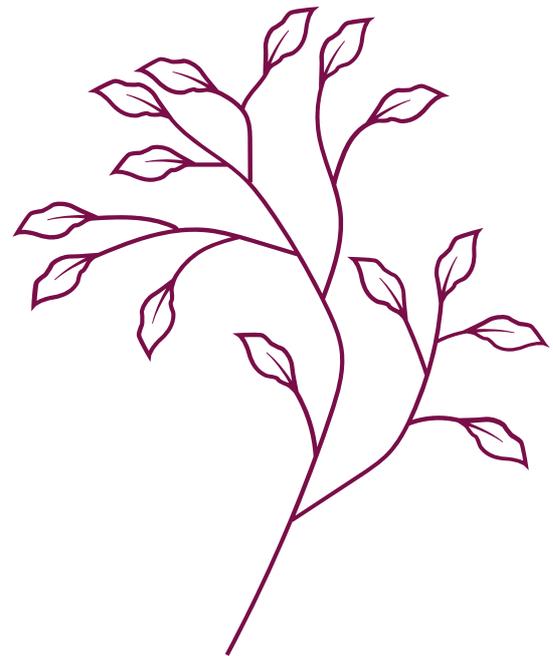
Serba Serbi Maret

Rapat Tindaklanjuti Kerja Sama antara BSKDN dengan SKALA

Rapat dilaksanakan pkl 10.00 s.d 12.00 WIB di RR Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri, di hadiri oleh perwakilan dari SKALA, Bagian Perencanaan BSKDN dan Bagian SDMO BSKDN.

Pada AWP 2024-2025, SKALA akan melaksanakan kegiatan Workshop terkait Policy Brief di Kupang dan Workshop bagi Analis Kebijakan di Kementerian Dalam Negeri. Menjadikan penyusunan revisi permendagri 17 tentang pedoman litbang agar menjadi prioritas Utama rencana kerja dan Kerjasama dengan SKALA

AAaturan tentang Tata Kelola dan Instansi Pembina Analis Kebijakan agar dimasukkan dan di jadikan bab tersendiri di revisi permen pedoman litbang.



Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi dan Penyesuaian Tata Kelola Program SKALA

Rapat dilaksanakan pkl 10.00 s.d 12.00 WIB via zoom meeting dipimpin oleh Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama Kemendagri dan di hadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja ess I lingkup Kemendagri termasuk BSKDN.

Masing-masing komponen agar melaksanakan kerja sama yang telah disepakati.

BSKDN dan skala bersepakat untuk menjadikan revisi permendagri 17 tentang pedoman litbang agar diutamakan dan didiskusikan Bersama.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide is displayed with the following content:

URAIAN EVALUASI DAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA LAKSANA PROGRAM SKALA
 (Rapat Koordinasi Kepala Pusat Program (SKA) dengan Direktur PPKM Bappenas yang membahas hasil-hasil review sama keraja Program (SKA) dan rencana tindak lanjutnya untuk meningkatkan pertukaran informasi Program (SKA) pada 18 Februari 2023)

NO	URAIAN	REKOMENDASI
1.	1. Analisis secara komprehensif (SKA) dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Substansi dan aspek-aspek b. Pertimbangan terhadap aspek-aspek lain (misal: SKA, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi secara komprehensif (SKA) dan (SKA) di tingkat nasional Relevansi aspek-aspek (SKA) dan (SKA) dengan aspek-aspek lain (misal: SKA, dll) Kejelasan dan (SKA) (misal: yang relevan) dalam pertukaran informasi (SKA) yang mendukung (SKA) Kejelasan (SKA) (SKA) dan (SKA) dalam (SKA) dan (SKA) dan (SKA) Pertimbangan secara komprehensif untuk (SKA) dan (SKA) dan (SKA) Kejelasan secara komprehensif dan (SKA) dan (SKA) dan (SKA)
2.	2. Mengingat pentingnya (SKA) dan (SKA) yang (SKA) yang (SKA) dan (SKA)	
3.	3. Melakukan (SKA) secara komprehensif dan (SKA) dan (SKA) dan (SKA)	
4.	4. Melakukan (SKA) secara komprehensif dan (SKA) dan (SKA) dan (SKA)	
5.	5. Melakukan (SKA) secara komprehensif dan (SKA) dan (SKA) dan (SKA)	

On the right side of the Zoom window, a participant is visible, sitting at a desk and reading a document.

Serba Serbi Maret

Rapat Konsolidasi Rencana Aksi Triwulanan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pkl. 13.00 WIB via zoom meeting dipimpin oleh fungsional perencana muda Monev dan Pelaporan Kinerja Setjen Kemendagri, di hadiri oleh perwakilan dari BSKDN dan seluruh unit kerja ess I lingkup Kemendagri.

Rencana aksi perjanjian kinerja merupakan bagian dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada komponen pengukuran kinerja. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 sebesar 77,90 (BB). Aplikasi SIRIKA belum sepenuhnya dikembangkan untuk mengakomodir proses pengukuran kinerja dan masih terbatas pada pengumpulan laporan kinerja

Pelaksanaan pengukuran capaian rencana aksi unit kerja belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan indicator kinerja dalam perjanjian kinerja, dan terdapat beberapa unit kerja pengukuran rencana aksi hanya dilakukan pada sebagian indicator kinerja. Melakukan revisi terhadap renaksi yang ditetapkan pada unit kerja untuk memastikan rencana kerja tersebut telah menjabarkan langkah langkah yang diperlukan guna mencapai seluruh kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja

Memastikan proses pengukuran capaian rencana aksi dilakukan terhadap seluruh indicator kinerja unit kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Rencana aksi agar dievaluasi secara triwulan yang diukur melalui tahapan atau kegiatan sesuai dokumen perencanaan. Perlu dilakukan pemetaan awal terhadap indicator dalam rancangan Renstra tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI TRIWULAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI TRIWULAN
1	1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	1.1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	1.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	1.1.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan
2	2. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	2.1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	2.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	2.1.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan
3	3. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	3.1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	3.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	3.1.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan
4	4. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	4.1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	4.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	4.1.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan
5	5. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	5.1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	5.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan	5.1.1.1. Jumlah Laporan Kinerja yang dihasilkan

(FDA) Strategi Implementasi Wastewater Based Epidemiology (WBE) di Indonesia dalam Upaya Penurunan Stunting dan Peningkatan Perbaikan Gizi

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) diselenggarakan di Gedung Command Center BSKDN Pada pkl 09.00 s.d. 15.00 WIB, dengan dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala BSKDN.

Kegiatan FDA mengundang narasumber dari unsur: MLIT Jepang, Yachiyo Engineering, Universitas Indonesia, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, BRIN, dan Antimicrobial Resistance FAO.

Implementasi Metode WBE di Indonesia awalnya dikembangkan untuk pemantauan epidemi penyakit menular seperti COVID-19, polio, dan hepatitis. Namun, perkembangannya juga memungkinkan pemantauan faktor lain yang berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat, termasuk paparan zat berbahaya yang dapat berkontribusi pada stunting. Permasalahan sanitasi dan kaitannya terhadap stunting telah dibahas di 864 publikasi Scopus, di mana 90 di antaranya membahas korelasi antara sanitasi dengan stunting di Indonesia.

. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam implementasi WBE: infrastruktur (anggaran, peningkatan standarisasi dan SDM); pedoman baku; konsistensi, akurasi, dan keamanan data; serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Implementasi WBE membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak lainnya khususnya dalam segi penyediaan platform data yang besar. Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang sangat dibutuhkan dalam rangka mensukseskan program WBE. Program ini diharapkan dapat terlaksana di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan sektor pelayanan publik di Indonesia.



Serba Serbi Maret

Pembahasan Penguatan Intermediasi Ekosistem Riset dan Inovasi

Rapat dilaksanakan pkl. 13.00 s.d 15.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 13b Kemenko PMK dihadiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, BRIN, Perpunas, Pemda (DKI Jakarta, Jabar, DIY), LPDP, dan Perguruan Tinggi. Rapat dibuka oleh Asisten Deputi Riset, Teknologi dan Kemitraan Industri dan dilanjutkan dengan perkenalan Deputi Baru yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Rapat membahas 4 tujuan, yaitu

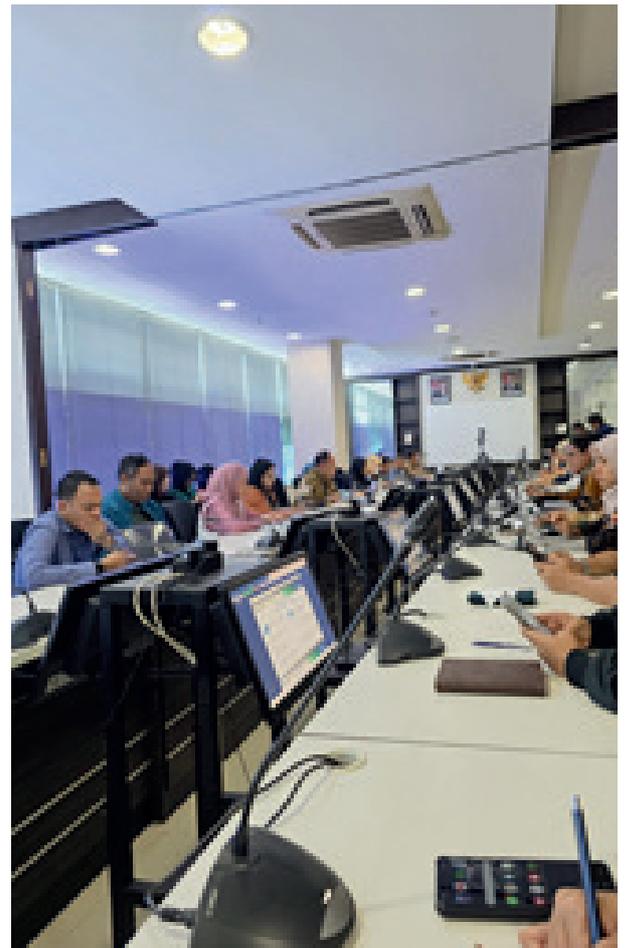
- Mengidentifikasi isu-isu yang berkembang dalam riset dan inovasi di kalangan siswa, mahasiswa, akademisi, peneliti, komunitas, masyarakat dan pemda.
- Menjembatani berbagai stakeholder terkait riset dan inovasi melalui kegiatan kolaboratif yang melibatkan sektor pendidikan, penelitian, komunitas dan pemerintahan (daerah)

- Mempromosikan dan mensosialisasikan berbagai bentuk pemanfaatan riset dan inovasi yang telah atau belum terimplementasi
- Mendorong terciptanya koordinasi dan kolaborasi riset dan inovasi yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor

Poin-poin rapat dari diskusi yang berlangsung di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kendala anak sekolah melakukan riset yaitu daya fikir dan tidak berkelanjutan
- Upaya yang telah dilakukan pelatihan dan pembinaan talenta, proses pengembangan dengan kolaborasi Bersama Perguruan Tinggi
- Tantangan transformasi perpustakaan perguruan tinggi diantaranya minimnya pemanfaatan repositori institusi dan data penelitian oleh civitas akademika serta lemahnya kelembagaan perpustakaan yang menyebabkan ketidakjelasan peran dalam mendukung ekosistem riset.

- Saat ini tinak lanjut atas Permendagri 7/2023 tentang pembentukan BRIDA, dari 38 Provinsi terbentuk 22 Brida, dari 514 kabupaten/kota terbentuk 166 Brida
- BRIN telah merilis IDSD 2024 bekerjasama dengan DKRI mengundang seluruh kepala daerah Se-Indonesia sebagai panduan untuk Menyusun RPJMD
- Ada 2 kendala riset, seringkali tidak match antara riset yang dihasilkan dengan kebutuhan industry dan kedua hasil riset masih memerlukan thaapan yang masih Panjang.
- BRIN menyiapkan fasilitasi pengujian produk inovasi hasil kesehatan dan produk inovasi pertanian BRIN tidak bisa memproduksi peralatan massal kepada masyarakat dan BRIN berharap industry menyampaikan kebutuhan riset sejak awal.
- Tidak punya roadmap RnD dan inovasi yang komprehensif secara nasional.
- Industri tidak menyebutkan pihak swasta.
- Kurangnya applied science, mengembangkan riset yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta.
- Perlunya membuat ekosistem riset dan inovasi + Jakarta menjadi urban lab dan bisa di applied di daerah lain di Ind nesia supaya Jakarta bisa jadi referensi.



Serba Serbi Maret

Rapat Tindak Lanjut Policy Brief Replikasi Inovasi Daerah

. Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 WIB di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri dipimpin oleh Kepala BSKDN Kemendagri, di hadiri oleh Perwakilan BPH Migas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Pustrajakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Pembentukan forum replikasi inovasi sbg bentuk komitmen baik pusat maupun daerah dlm upaya percepatan serta akselerasi pembangunan ekosistem inovasi pada seluruh sektor lntas pemerintah daerah.

Kemendagri melalui Ditjen Adwil dan BSKDN menyusun pedoman kerjasama substantive replikasi inovasi daerah utk menjadi panduan bagi pemda dalam menyusun MoU atau Perjanjian Kerjasama antar daerah.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah perlu mendorong penerapan inovasi pada seluruh urusan pemerintahan kokuren melalui surat edaran yang dijadikan rujukan bagi pemda sbg bentuk akselerasi penyebaran inovasi pada seluruh urusan pemrintahan daerah. Perlu dilakukan pelembagaan replikasi inovasi melalui pembentukan Forum Aktor Replikasi dan Kebijakan Inovasi (FOARKI), forum ini dpt dibentuk scr nasional utk mengakomodir kepentingan K/L serta kebutuhan replikasi lintas tingkatan pemerintahan

BPH Migas sudah menyiapkan aplikasi xstar untuk penerbitan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bbm bersubsidi, harapannya setiap dinas terkait seperti dinas sosial, dinas perikanan, dinas pertanian dapat diberikan user id dan password sehingga penggunaannya sesuai. Saat ini BPH Migas terus melakukan sosialisasi kepada pemprov.

Terkait kewenangan dan pengawasan menurut Ditjen Bangda bukan melalui urusan Dinas ESDM, krn ESDM tidak dimiliki oleh daerah, utk mengarahkan pema perlu disesuaikan dengan urusan” yg terlibat shg bisa diatur di masing” urusan tsb, dan Ditjen Bangda telah mengeluarkan surat utk pelaporan tsb melalui aplikasi xstar.

Terkait dengan policy brief terkait, harapannya dapat mendorong jajaran pema utk mengurangi ketimpangan inovasi diberbagai urusan, shg inovasi tidak hanya berfokus pd urusan pendidikan dan kesehatan saja tapi bisa menjangkau di seluruh urusan.

BPH Migas juga berharap kedepannya dapat memadukan aplikasi” tsb utk mempermudah penyalurannya, dapat merekord kuotanya, pola penyaluran dan dapat menghitung konsumsi real nya.

Terkait rencana kerjasama replikasi inovasi daerah, Fasker mendukung dan bisa dilaksanakan PKS antara BSKDN dan BPH Migas, dengan payung hukumnya berupa nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dgn Kemendagri.



Serba Serbi Maret

Konsolidasi Penyusunan Rencana Aksi tindak Lanjut rekomendasi LHE AKIP Kemendagri

Rapat dilaksanakan pkl. 14.00 s.d 16.00 WIB dipimpin oleh fungsional perencana muda Monev dan Pelaporan Kinerja Setjen Kemendagri, di hadiri oleh perwakilan dari BSKDN dan seluruh unit kerja ess I lingkup Kemendagri.

Nilai AKIP Kemendagri mengalami peningkatan disetiap tahunnya sekitar 1 poin. Berdasarkan hasil evaluasi dari Menpan RB, pada tahun 2024 nilai AKIP Kemendagri sebesar 77,90 dengan predikat BB.

Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis ditingkat kementerian yang indicator kinerjanya belum berorientasi pada hasil (outcome) dan cenderung berfokus pada proses atau output. Telah menyusun penjenjangan kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip prinsip penyusunan penjenjangan kinerja yang baik.

Telah menyusun dokumen manual indicator kinerja namun belum dilengkapi dengan deskripsi dan definisi operasional atau formula perhitungan yang memadai.

Penetapan target kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kinerja eksisting maupun capaian kinerja sebelumnya. Penyusunan rencana aksi belum sepenuhnya menjabarkan atas rencana aksi perjanjian kinerja.

Biro perencanaan sedang menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi LHE dari Menpan RB dan diminta kepada seluruh unit kerja ess I lingkup Kemendagri untuk memberikan saran dan masukan paling lambat hari senin 17 maret 2025.

Rapat Pembahasan Draft Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD)

Rapat dilaksanakan secara hybrid dan dipimpin oleh Kepala Pustrajak Wildukyanlik (Pusat II) dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum dan Biro Perencanaan.

Pada rapat dilaksanakan pembahasan terkait pengaturan pasal per pasal agar tidak tumpang tindih dengan instrument penilaian kinerja pmda yang sudah dimiliki Ditjen Otda. Juga dibahas bahwa wacana ITKPD menjadi IKU Kemendagri adalah agar menyederhanakan berbagai indeks yang ada di Kemendagri, namun perlu penyesuaian dan kesepakatan lebih lanjut apakah yang digunakan adalah ITKPD yang kini disusun BSKDN atau Indeks berbeda yang disusun oleh Setjen dengan nama Indeks Tata Kelola Pemdagri (ITKPDN). Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut untuk memastikan agar kedua indeks dimaksud tidak tumpang tindih.

Bagian Perencanaan terus mengawal pelaksanaan penyusunan Permendagri ITKPD dan berkoordinasi dengan Biro Hukum.



Serba Serbi Maret

Konfirmasi Akhir Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Program SKALA

Komite Teknis sepakat untuk mendorong tata kelola yang lebih efektif dan efisien, termasuk penguatan peran Ketua Pokja dalam memastikan sinergi dan harmonisasi Program SKALA dengan pendanaan APBN/D di bawah Pokja terkait.

Pelaksanaan Program SKALA diharapkan mendukung kegiatan prioritas dan kebutuhan Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan secara lebih efisien, fokus pada substansi, serta selaras dengan arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan melalui pertemuan bulanan Komite Teknis dan Komite Program Provinsi pada level pelaksana serta pertemuan tiga bulanan (triwulan) pada level pimpinan.

Pelibatan Pemerintah Indonesia dalam proses perekrutan dan evaluasi staf manajemen dan tenaga ahli penyedia dukungan teknis, sesuai dengan mekanisme yang paling optimal, untuk menjaga efektivitas Program SKALA dalam mencapai tujuan program dan mendukung agenda pembangunan Indonesia.

Penyesuaian dokumen tata kelola:

- * Mekanisme koordinasi antara Komite Teknis di Pemerintah Pusat, Komite Program Provinsi di Pemerintah Daerah, DFAT, dan Tim SKALA
- * Tata kelola sumber daya manusia Program SKALA
- * Mekanisme evaluasi pelaksanaan dan pelaporan Program SKALA (Monitoring, Evaluation, Research, and Learning) yang juga mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia;
- * Mekanisme penyusunan Annual Work Plan (AWP) dengan penambahan proses evaluasi sebagai acuan pengusulan kegiatan berikutnya.

Rapat Tindaklanjut Proses Harmonisasi Revisi Permendagri 38/2020 Tentang IKKD

Mengusahakan untuk mensentralkan indeks-indeks dan award di Kemendagri dilaksanakan dan dilakukan simplifikasi di BSKDN, dan berkoordinasi dengan Stafsus untuk difasilitasi dengan Menteri (menggunakan Surat Edaran/Arahan Menteri).

Memperhatikan teori teori yang digunakan dalam penyusunan Permendagri. Mengkoordinasikan dengan Kementerian. Perbaiki substansi pada draft agar memperhatikan istilah supaya tidak terlalu general. Memperhatikan Metodologis karena sangat berpengaruh dengan hasil pengukuran.

Memperhatikan pemilihan kata dalam peraturan, contohnya seperti statistika pemerintahan, semi otonom, kepala daerah definitif, dll. Mempertimbangkan masukan dari KemenPAN dan Opini dari BPK



Serba Serbi Maret

Rapat Tindaklanjut Kerjasama antara BSKDN Kemendagri dan Mandiri Taspen

Rapat dilaksanakan di ruang rapat vidcon BSKDN pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB yang dipimpin oleh Sekretaris BSKDN yang dihadiri oleh Kabagren, Kabag SDMO, dan tim Mandiri Taspen

Program mandiri taspen : Warung Mantap, Si mantap laundry, agen kurir mantap dan frozen mantap. Sumber dana dari deposit/nabung dana 250jtan dan kredit 1jtan/bln bagi pensiunan akan mendapatkan paket silver WARUNG.

Pelatihan berbagai jenis usaha bagi pensiunan (hidroponik, budidaya jamur, ternak ayam petelur, ternak puyuh, budidaya ikan).



Rapat Progres Penyusunan Prosundagri 2024 dan Sosialisasi Permendagri No. 3/2025 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Kemendagri

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Hukum, Gedung B Lantai 7 Kantor Pusat Kemendagri, rapat dibuka oleh Karo Hukum Setjen Kemendagri dan dipandu oleh Kabag PUU Biro Hukum Setjen Kemendagri. Pada rapat hadir secara langsung para pejabat fungsional dan pelaksana Biro Hukum dan Analis Hukum BSKDN Kemendagri, para perwakilan UKE I Kemendagri hadir secara virtual

Bagren siap mengawal percepatan penyusunan Rancangan Permendagri yang menjadi tanggungan BSKDN sebagaimana terdaftar dalam Prosundagri Tahun 2025, Bagian Perencanaan menyelenggarakan layanan asistensi dan konsultasi legal drafting serta penelaahan formil atas seluruh rancangan permendagri lingkup BSKDN.



Pada pembahasan Prosundagri dilakukan pembahasan seputar evaluasi penyusunan Prosundagri 2025, BSKDN memiliki 5 usulan Rancangan Permendagri yang harus diselesaikan tahun ini, berikut di antaranya:

- Rancangan Permendagri Perubahan atas Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Pusat 1 BSKDN);
- Rancangan Permendagri Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pusat 3 BSKDN);
- Rancangan Permendagri Perubahan atas Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Pusat 4 BSKDN);
- Rancangan Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Pusat 2 BSKDN);
- Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Sekretariat BSKDN).

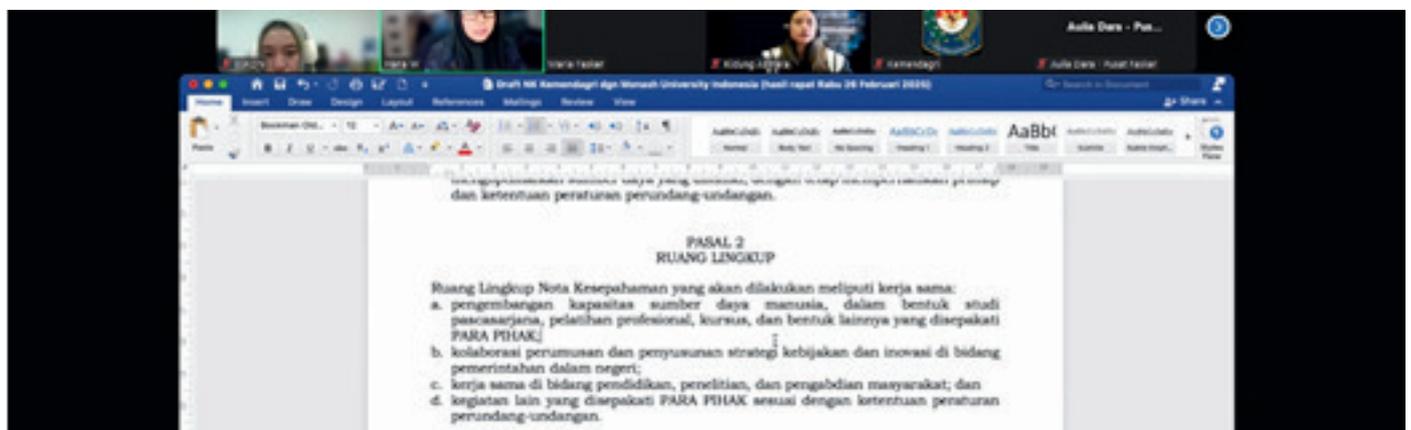
Serba Serbi Maret

Rapat Pembahasan Penyusunan Nota Kesepahaman antara Kemendagri dan Monash University

Rapat dilaksanakan pkl. 13.00 s.d 14.30 via zoom meeting dipimpin oleh Kepala Bidang Kerja sama Dalam Negeri, Pusfasker dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusfasker, BPSDM, BSKDN dan Monash University.

Rapat ini membahas draft Nota Kesepakatan antara Kemendagri dan monash university dan kedua belah pihak akan melakukan tinjauan akhir sebelum penandatanganan resmi dan memastikan bahwa semua langkah administrasi telah terpenuhi. BSKDN dan Monash University berkomitmen untuk segera merealisasikan kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Draft Nota Kesepahaman kemudian diserahkan kepada pihak Monash University untuk finalisasi akhir. Tim UU dan Kerja Sama siap mengawal pembahasan Nota Kesepahaman antara Monash University dan Kementerian dalam Negeri.



Rapat Koordinasi Internal Terkait Pelaksanaan Efisiensi Anggaran dan Inovasi Program di Tengah Efisiensi lingkup BSKDN

Rapat dilaksanakan pkl. 11.00 s.d 14.00 WIB di RR Command Center di pimpin oleh Kepala BSKDN yang di hadiri oleh Sekretaris BSKDN, para Kepala Pusat, Para Kepala Bagian, Para Analis Kebijakan Ahli Madya, Kasubbag TU Pusat, Para Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Statistisi lingkup Pusat BSKDN.

Pelaksanaan anggaran pasca kebijakan efisiensi menjadi salah satu tantangan besar bagi banyak instansi pemerintah dan organisasi dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kebutuhan pengelolaan yang lebih efisien. Kebijakan efisiensi yang diterapkan umumnya bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks ini, anggaran yang sebelumnya dianggap cukup mungkin harus dipangkas, dan perencanaan pengelolaan anggaran harus disesuaikan agar dapat mempertahankan kualitas layanan publik atau kegiatan yang sedang dijalankan.

Jumlah Pagu Aktif BSKDN setelah mengalami realisasi, lalu efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan tunkir 100% yaitu sebesar Rp. 31.196.201.388. Bapak Kepala BSKDN meminta keterangan terhadap perbedaan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Kemendagri yang memiliki kesamaan nomenklatur kegiatan

Kepala Badan memberikan arahan terkait usulan pagu indikatif yang diharapkan dapat mencapai angka 100 milyar. Arahan ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong setiap unit untuk lebih kreatif dan strategis dalam merancang program serta kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan daerah. Kepala Badan menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pencapaian hasil yang maksimal dalam setiap pengajuan anggaran



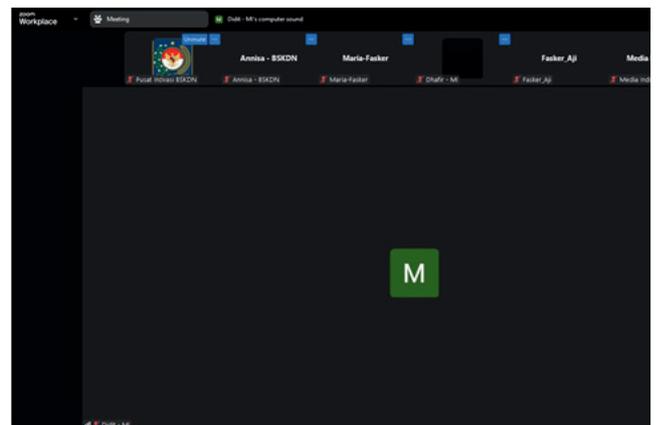
Serba Serbi Maret

Pembahasan Rencana Perjanjian Kerjasama dengan Media Indonesia

Rapat dilaksanakan pkl. 13.00 s.d 14.30 via zoom meeting dipimpin oleh Kepala Bidang Kerja sama Dalam Negeri, Pusfasker dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusfasker, BSKDN dan Media Indonesia.

Rapat ini membahas rencana kerja sama antara BSKDN dan Media Indonesia, kedua belah pihak akan melakukan tinjauan awal sebelum melakukan drafting Nota Kesepahaman dan memastikan bahwa semua ruang lingkup kerja sama dengan BSKDN sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak. BSKDN dan Media Indonesia berkomitmen untuk segera Menyusun rencana kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Tim UU dan Kerja Sama siap mengawal pembahasan Nota Kesepahaman antara Media Indonesia dan BSKDN Kementerian dalam Negeri.



Laporan Hasil Evaluasi dan Rencana Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Program SKALA dan Penyesuaian Prioritas dan Ruang Lingkup Dukungan Program SKALA sesuai Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia

Rapat dilaksanakan di Kantor Bappenas secara luring dan dipimpin oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas (Bapak Maliki). Pada rapat hadir secara langsung: Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala BSKDN Kemendagri, Kapus Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri, Direktur pada Kementerian Keuangan dan Bappenas, serta Tim Kerja SKALA.

Pada rapat dilaksanakan diskusi persiapan penyusunan AWP SKALA 2025-2026 dengan penekanan pada fokus, di antaranya: dukungan penyelarasan RPJMN dengan RPJMD, dukungan pada program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, peningkatan kualitas layanan publik di daerah tertinggal, serta peningkatan kapasitas para analis kebijakan di daerah.

BSKDN menyampaikan rencana kerja sama lanjutan dalam bentuk penyusunan regulasi pengaturan tata kelola analisis kebijakan di daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas para analis kebijakan.

Ditjen Bangda menyampaikan usulan kerja sama pengentasan kemiskinan melalui pencapaian SPM pada pelaksanaan layanan publik di daerah, disampaikan bahwa Tim Pengentasan Kemiskinan di daerah membutuhkan arahan teknis dari pemerintah pusat agar dapat segera ditindaklanjuti di daerah. Bagian Perencanaan akan berkoordinasi secara intensif bersama Tim Kerja SKALA untuk memastikan pelaksanaan kolaborasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas analis kebijakan di BSKDN dan pemda serta dukungan penyusunan regulasi tata kelola strategi kebijakan lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah.



Serba Serbi Maret

Indeks Pembentuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (ITKPDN) Pada Masing2 UKE I

Rapat dilaksanakan via zoom meeting pkl. 09.30 s.d 12.30 WIB dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan yang di hadiri Kepala Pusat Kewilayahan BSKDN, Perwakilan Bagian Program Biro Perencanaan dan perwakilan UKE I Kemendagri

Biro Perencanaan Kemendagri telah meminta data ke masing masing UKE I terkait Definisi Operasional masing-masing Indeks Pembentuk ITKPDN.

Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri merupakan suatu ukuran terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didalamnya terdapat sumber data yang dimiliki oleh masing-masing UKE I pengampu indeks terkait.

Usulan Rancang Bangun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) memiliki 5 dimensi yaitu : Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penataaksanaan, Pengawasan, Capaian Penyelenggaraan.

Masing-masing Dimensi memiliki indikator Indeks pada masing-masing UKE I pengampu yaitu; Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada (Ditjen Keuda), Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada (Ditjen Bina Bangda), Indeks Penerapan SPM pada (Ditjen Bangda), Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada (Ditjen Otda), Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda pada (Ditjen Otda), Indeks Pengawasan Pemerintah Daerah pada (Itjen), Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri pada (BPSDM), Indeks Inovasi Daerah pada (BSKDN), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah pada (BSKDN)



Rapat koordinasi pelaksanaan antara BSKDN dengan LAN dan SKALA

apat dilaksanakan di RR Command Center pkl. 10.00 s.d 12.00 WIB yang dipimpin oleh Kepala BSKDN, yang dihadiri oleh Sekretaris BSKDN, perwakilan SKALA dan LAN, perwakilan Pusat dan Bagian lingkup BSKDN Kemendagri.

Sebagai pembina Analisis Kebijakan, LAN memiliki Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Berdasarkan hasil IKK: partisipasi pemerintah masih dibawah 50%, sedangkan 18% diantaranya berkategori baik.

AN sudah melakukan advokasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Baru 25-30% analisis kebijakan yang sudah memiliki nomor induk analisis kebijakan. Monitoring dan peningkatan kapasitas akan mudah jika 40rb analisis kebijakan telah terintegrasi dengan LAN. Diharapkan BSKDN dapat mendorong hal tersebut.

Dengan 4 indeks BSKDN dapat mengintervensi agar pemerintah daerah dapat lebih peduli dengan kualitas kebijakan. Unsur kualitas kebijakan juga dapat ditambahkan sebagai indikator dalam indeks-indeks tersebut.

LAN akan membentuk Forum Komunikasi Badan Strategi Kebijakan bernama INAKI (Ikatan Nasional Analisis Kebijakan), dengan membangun koordinasi baik dengan K/L ataupun di daerah. Tahun ini akan menerbitkan booth member, yang menjadi keputusan terakhir dari indeks yang diterbitkan oleh K/L. IKK berpengaruh dengan nilai RB K/L atau Pemda.

Akan dilaksanakan workshop di Papua untuk penguatan inovasi dan kualitas kebijakan daerah. Akan ada evaluasi keberlanjutan program-program SKALA, dimana diarahkan untuk mendukung program strategis nasional

Serba Serbi Maret

Rapat awal pembahasan rencana perpanjangan Nota Kesepahaman Kemendagri dan Kementerian ESDM

Rapat dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Kabid Kerja Sama Dalam Negeri Pufasker Setjen. Pada rapat hadir perwakilan dari Kementerian ESDM, BPH Migas, Ditjen Bina Bangsa, dan Biro Hukum Setjen Kemendagri.

ada rapat dilaksanakan pembahasan urgensi perpanjangan Nota Kesepahaman yang akan berakhir pada bulan April 2025, untuk itu didiskusikan perpanjangan untuk 5 tahun ke depan dengan pembahasan potensi ruang lingkup yang disepakati kedua belah pihak.

Bagren siap mengawal perpanjangan Nota Kesepahaman dan secara paralel menyiapkan dokumen PKS untuk menindaklanjuti rencana kerja sama yang lebih teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.

BSKDN menyampaikan rencana kerja sama dengan BPH Migas dalam bentuk fasilitasi replikasi inovasi dalam pengawasan pendistribusian BBM dengan beberapa best practice yang bisa dilihat dari beberapa daerah terpilih yang juga sudah mendapatkan penghargaan Innovative Government Award Kemendagri, hal ini untuk juga mendukung program pemerintah terkait pendistribusian BBM yang efektif dan efisien. BSKDN juga menyumbangkan satu klausul ruang lingkup yang berbunyi “penyelarasan regulasi kolaborasi penyusunan strategi kebijakan untuk percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dalam negeri dan energi dan sumber daya mineral”. Nantinya poin tersebut menjadi dasar penandatanganan PKS dengan kesepakatan kegiatan yang lebih teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Kajian Kebijakan Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 11.30 di Ruang Command Center, BSKDN dan di pimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dlam Negeri, dihadiri oleh perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Pejabat Fungsional BSKDN.

Dalam rapat ini, kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama ini akan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas pembiayaan yang timbul sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk memastikan efektivitas implementasi kerja sama ini. Para pihak juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan kerja sama dengan prinsip transparansi dan anti-korupsi.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat strategi kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal. Kerja sama ini mencakup penyusunan strategi kebijakan bagi pemerintah daerah dan desa dalam optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemberian rekomendasi strategi dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan pekerja dari berbagai sektor, serta pertukaran informasi dan data strategis guna mendukung efektivitas implementasi program. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas dan fasilitasi inovasi daerah terkait kebijakan perlindungan tenaga kerja, serta berbagai kegiatan lain yang disepakati dalam rangka mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



Serba Serbi Maret

Rapat awal pembahasan rencana perpanjangan Nota Kesepahaman Kemendagri dan Kementerian ESDM

Rapat dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Kabid Kerja Sama Dalam Negeri Pufasker Setjen. Pada rapat hadir perwakilan dari Kementerian ESDM, BPH Migas, Ditjen Bina Bangsa, dan Biro Hukum Setjen Kemendagri.

ada rapat dilaksanakan pembahasan urgensi perpanjangan Nota Kesepahaman yang akan berakhir pada bulan April 2025, untuk itu didiskusikan perpanjangan untuk 5 tahun ke depan dengan pembahasan potensi ruang lingkup yang disepakati kedua belah pihak.

Bagren siap mengawal perpanjangan Nota Kesepahaman dan secara paralel menyiapkan dokumen PKS untuk menindaklanjuti rencana kerja sama yang lebih teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.

BSKDN menyampaikan rencana kerja sama dengan BPH Migas dalam bentuk fasilitasi replikasi inovasi dalam pengawasan pendistribusian BBM dengan beberapa best practice yang bisa dilihat dari beberapa daerah terpilih yang juga sudah mendapatkan penghargaan Innovative Government Award Kemendagri, hal ini untuk juga mendukung program pemerintah terkait pendistribusian BBM yang efektif dan efisien. BSKDN juga menyumbangkan satu klausul ruang lingkup yang berbunyi “penyelarasan regulasi kolaborasi penyusunan strategi kebijakan untuk percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dalam negeri dan energi dan sumber daya mineral”. Nantinya poin tersebut menjadi dasar penandatanganan PKS dengan kesepakatan kegiatan yang lebih teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.





Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Kajian Kebijakan Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Rapat dilaksanakan pkl. 10.00 s.d 11.30 di Ruang Command Center, BSKDN dan di pimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dlam Negeri, dihadiri oleh perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Pejabat Fungsional BSKDN.

Dalam rapat ini, kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama ini akan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas pembiayaan yang timbul sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk memastikan efektivitas implementasi kerja sama ini. Para pihak juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan kerja sama dengan prinsip transparansi dan anti-korupsi.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat strategi kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal. Kerja sama ini mencakup penyusunan strategi kebijakan bagi pemerintah daerah dan desa dalam optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemberian rekomendasi strategi dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan pekerja dari berbagai sektor, serta pertukaran informasi dan data strategis guna mendukung efektivitas implementasi program. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas dan fasilitasi inovasi daerah terkait kebijakan perlindungan tenaga kerja, serta berbagai kegiatan lain yang disepakati dalam rangka mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.





Mewujudkan Tata Kelola Data Yang Efektif Dalam Mendukung Evidence Based - Policy Melalui Satu Data Bskdn

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi semakin krusial, khususnya dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik. Ketersediaan data memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih akurat dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, pemerintah dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi masyarakat. Pada umumnya, peranan data dalam pengambilan keputusan di pemerintahan menghadirkan peluang dan tantangan tersendiri.

Data membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, memantau dan mengevaluasi kinerja, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta mengelola risiko dengan lebih baik. Namun disisi lain, pemerintah juga dituntut untuk dapat melakukan tata kelola data yang baik sehingga dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terus mendorong terwujudnya program Satu Data Indonesia (SDI), melalui kebijakan Satu Data Kemendagri. Adapun kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendorong perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Dalam pemenuhan tata kelola data yang baik mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data yang sistematis dan akuntabel. Dengan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Sebaliknya, lemahnya tata kelola data dapat menyebabkan duplikasi informasi, ketidaksesuaian antar lembaga, hingga kesalahan dalam perencanaan program.



Sebagai komponen utama Kemendagri dalam hal perumusan strategi kebijakan, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memiliki peran sentral terkait penyusunan rekomendasi kebijakan strategis di bidang pemerintahan dalam negeri berbasis bukti. Oleh karena itu, sistem pengelolaan data yang terpadu menjadi suatu kebutuhan mendesak. Sistem pengelolaan data terpadu memungkinkan BSKDN untuk dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan secara lebih tepat, cepat dan akurat sebagai bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Pada Tahun 2025, pengelolaan data terpadu di BSKDN diwujudkan melalui program Satu Data BSKDN.

Satu Data BSKDN merupakan upaya integrasi dan sinkronisasi data antar unit kerja di lingkungan BSKDN. Tidak hanya itu, Satu Data BSKDN juga menghimpun data dukung terkait lainnya dari komponen Kemendagri terkait, serta Kementerian/Lembaga lain dan pemerintah daerah. Tujuan penghimpunan data tersebut adalah untuk menghasilkan data yang terstandar (memiliki definisi, klasifikasi, dan format yang seragam), terkonsolidasi (terhindar dari duplikasi dan inkonsistensi antar sumber data), terbuka dan terintegrasi (dapat diakses secara luas dan terhubung dalam satu system data nasional), dan berkualitas (memenuhi prinsip validitas, akurasi, dan reliabilitas) sebagai dasar perumusan strategi kebijakan.

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi semakin krusial, khususnya dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik. Ketersediaan data memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih akurat dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Program Satu Data BSKDN juga ditujukan untuk membawa perubahan sistem kerja yang lebih dinamis. Artinya, penerapan program tersebut bukan hanya soal penerapan teknologi atau sistem informasi, melainkan juga membawa perubahan budaya kerja menuju kolaborasi dan keterbukaan informasi. Keberhasilannya akan memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan tepat sasaran.

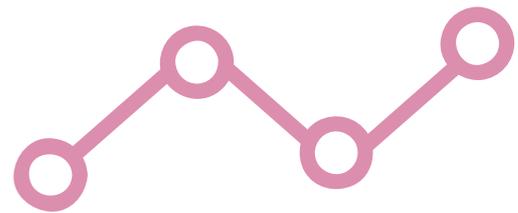
Mewujudkan tata kelola kebijakan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari kualitas data yang digunakan. Satu Data BSKDN menjadi instrumen krusial dalam mengakselerasi reformasi birokrasi dan pembangunan berbasis data. Melalui Satu Data BSKDN, seluruh unit kerja akan memiliki panduan dan platform yang sama dalam mengelola data, mulai dari pengumpulan hingga penyajian dalam bentuk visualisasi maupun laporan analisis.

Satu Data BSKDN akan memuat berbagai data dasar yang bersumber dari 4 (empat) pusat teknis, yaitu Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusat 1) dengan data Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (Pusat 2) dengan data Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pusat 3) dengan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri (Pusat 4) dengan data Indeks Inovasi Daerah (IID). Selain Data indeks tersebut, Satu Data BSKDN juga memuat data-data hasil penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh setiap pusat, beserta data pendukungnya.



Langkah awal program Satu Data BSKDN dilakukan dengan penghimpunan data dasar, dimana kondisi sebelumnya menunjukkan bahwa data dasar BSKDN masih tersebar di masing-masing pusat teknis. Pada tahun 2025, BSKDN melalui Sekretariat badan melakukan penghimpunan dan pepaduan data dasar beserta data dukungnya ke dalam database berbasis spreadsheet yang dikumpulkan melalui walidata di masing-masing pusat teknis.

Kemudian pada data yang terkumpul di dalam akan dikumpulkan dalam database daring melalui server dataverse agar setiap pemangku kepentingan dapat mengatur data yang bersifat terbuka dan yang bersifat tertutup. Berikut adalah daftar data BSKDN yang telah terkmpul tahun 2025.



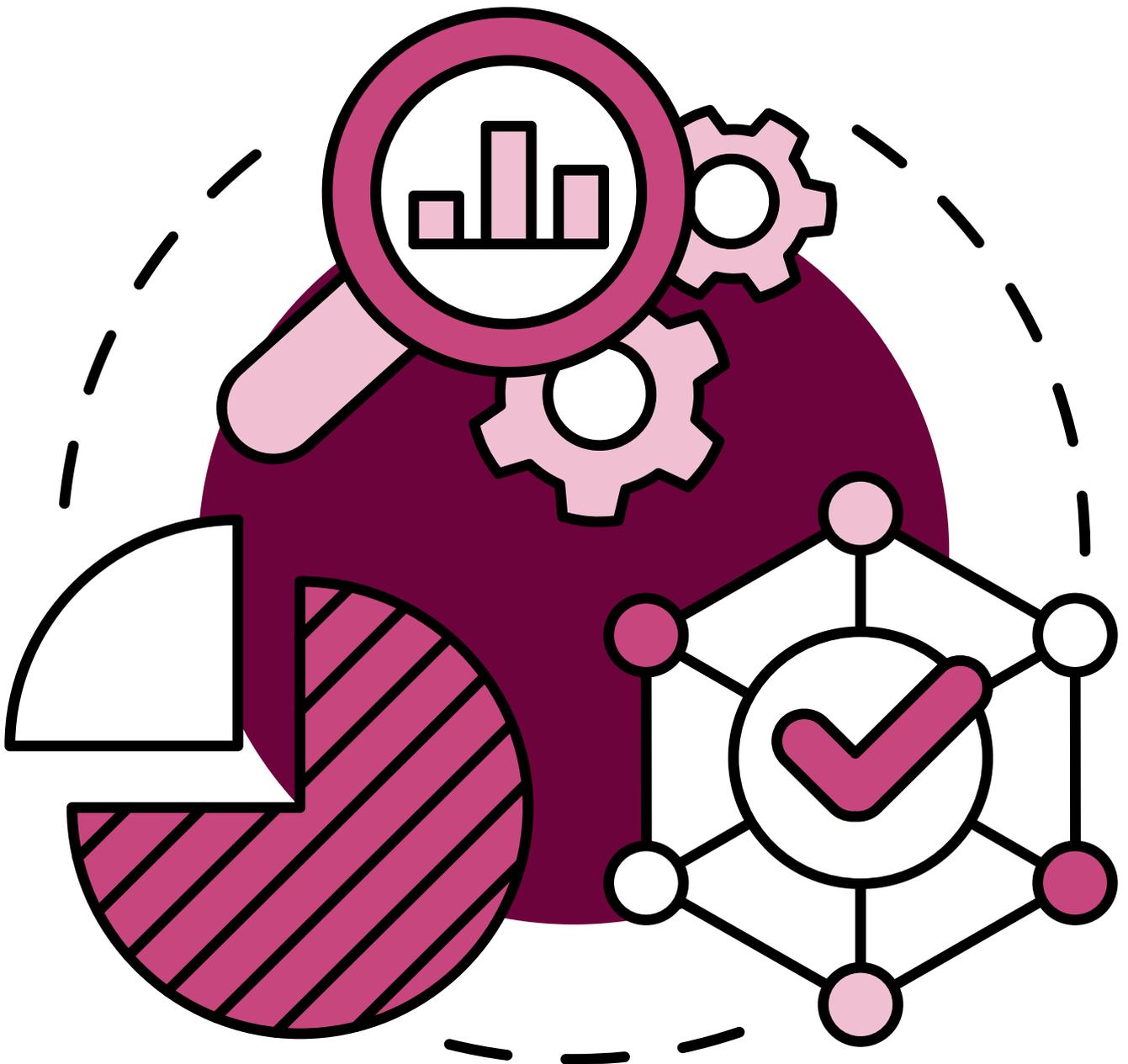
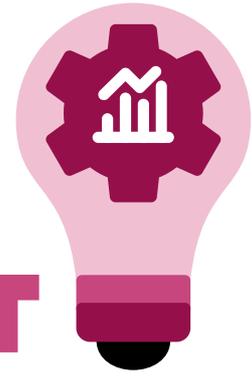
Daftar Data BSKDN Tahun 2025 Berdasarkan Surat Mendagri a.n Sekjen Nomor 600.5.4-1974 Tahun 2025:

No	Nama Data	Produsen Data	Jenis Data	Jadwal Pemutakhiran	Dasar Hukum	Pembatasan Akses
1	Data Pelaksanaan Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, Dan Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
2	Data Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
3	Data Pelaksanaan Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik	Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
4	Data Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik	Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik	Statistik	Tahunan	Permendagri Nomor 137 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
5	Data Pelaksanaan Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa	Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka

6	Data Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa	Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
7	Data Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
8	Data Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tingkat Kota	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
9	Data Rekapitulasi Pengukuran Hasil Indeks Inovasi Daerah	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
10	Data Inovasi Provinsi	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka
11	Data Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Statistik	Tahunan	Permendagri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri	Terbuka

Pada jangka panjang ke depan, database yang sudah terkumpul dapat diperbarui setiap tahunnya sesuai dengan standar data dan metadata yang akan disusun dengan segera. Selain itu, tim database BSKDN ke depan juga akan membuat data yang terkumpul rutin tersebut dapat memberikan informasi secara realtime terkait deskriptif data dasar dan data dukung BSKDN. Dengan demikian, tujuan dari pemaduan data akan dapat tercapai yaitu memudahkan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi data yang ada di lingkup BSKDN secara cepat, tepat dan efisien sehingga dapat menghasilkan kebijakan dengan berbasis bukti (evidence-based policy).

DATA AND KNOWLEDGE MANAGEMENT



Peran Strategis Perencanaan Program Anggaran dalam Penyusunan Usulan Pagu Indikatif di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)

Di tengah dinamika kebijakan nasional dan tuntutan efisiensi birokrasi, perencanaan program anggaran menjadi tulang punggung dalam menyusun arah kerja organisasi pemerintah. Hal ini sangat relevan di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dalam negeri berbasis data, kajian, dan inovasi. Dalam konteks tersebut, penyusunan usulan pagu indikatif bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah proses strategis yang menentukan ruang fiskal dan arah program prioritas BSKDN dalam satu tahun anggaran ke depan.

Pagu indikatif sendiri merupakan batas alokasi anggaran sementara yang diberikan kepada Kementerian /Lembaga sebagai acuan awal dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Di sinilah letak urgensi dari perencanaan program anggaran: bagaimana merancang program yang tidak hanya relevan dengan tugas dan fungsi BSKDN, tetapi juga mampu bersaing dalam keterbatasan fiskal nasional. Dengan kata lain, perencanaan program anggaran menjadi dasar untuk mengusulkan, mempertahankan, bahkan memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai demi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam negeri.



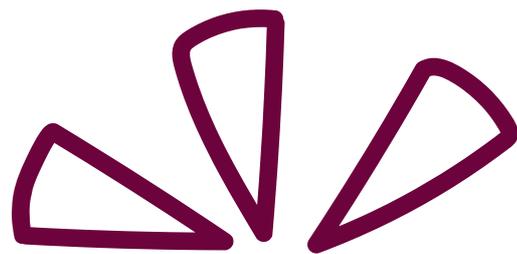


Perencanaan program anggaran yang strategis harus dimulai dengan pemetaan isu-isu strategis nasional dan kebijakan prioritas yang relevan dengan tugas BSKDN. Setiap program dan kegiatan yang dirancang perlu merefleksikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan nasional, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah, penguatan kapasitas aparatur, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam konteks ini, setiap usulan anggaran bukan hanya menjawab kebutuhan internal, tetapi juga menjawab tantangan eksternal yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat.

Proses penyusunan usulan pagu indikatif membutuhkan pendekatan yang berbasis data, analisis kebutuhan, dan evaluasi kinerja program tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang hanya mengulang pola lama tanpa refleksi mendalam terhadap hasil dan capaian sebelumnya, cenderung menghasilkan usulan yang lemah secara argumentatif. BSKDN, sebagai lembaga yang membawa misi kebijakan strategis, perlu menempatkan data dan analisis sebagai dasar dalam menyusun argumentasi anggaran. Ini juga menjadi cerminan dari upaya reformasi birokrasi, di mana perencanaan dan penganggaran tidak lagi berjalan sendiri-sendiri tetapi saling terkait.

Selain itu, proses ini menuntut kolaborasi antarfungsi di dalam BSKDN. Perencana anggaran tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi yang erat dengan unit teknis untuk memahami kebutuhan riil di lapangan, serta dengan unit evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program sebelumnya. Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif, usulan pagu indikatif dapat mencerminkan kebutuhan riil organisasi sekaligus menjawab harapan pemangku kepentingan eksternal.

Tidak kalah penting, strategi komunikasi dalam proses pengusulan juga memainkan peran kunci. Pagu indikatif yang diajukan harus disusun dengan narasi kebijakan yang kuat dan logis, disertai justifikasi program yang berbasis capaian dan potensi dampaknya. Hal ini menjadi penting ketika usulan tersebut akan dibahas dan dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan unit teknis lainnya. Narasi kebijakan yang kuat membantu memperjelas urgensi program dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih berpihak pada kebutuhan substansial.



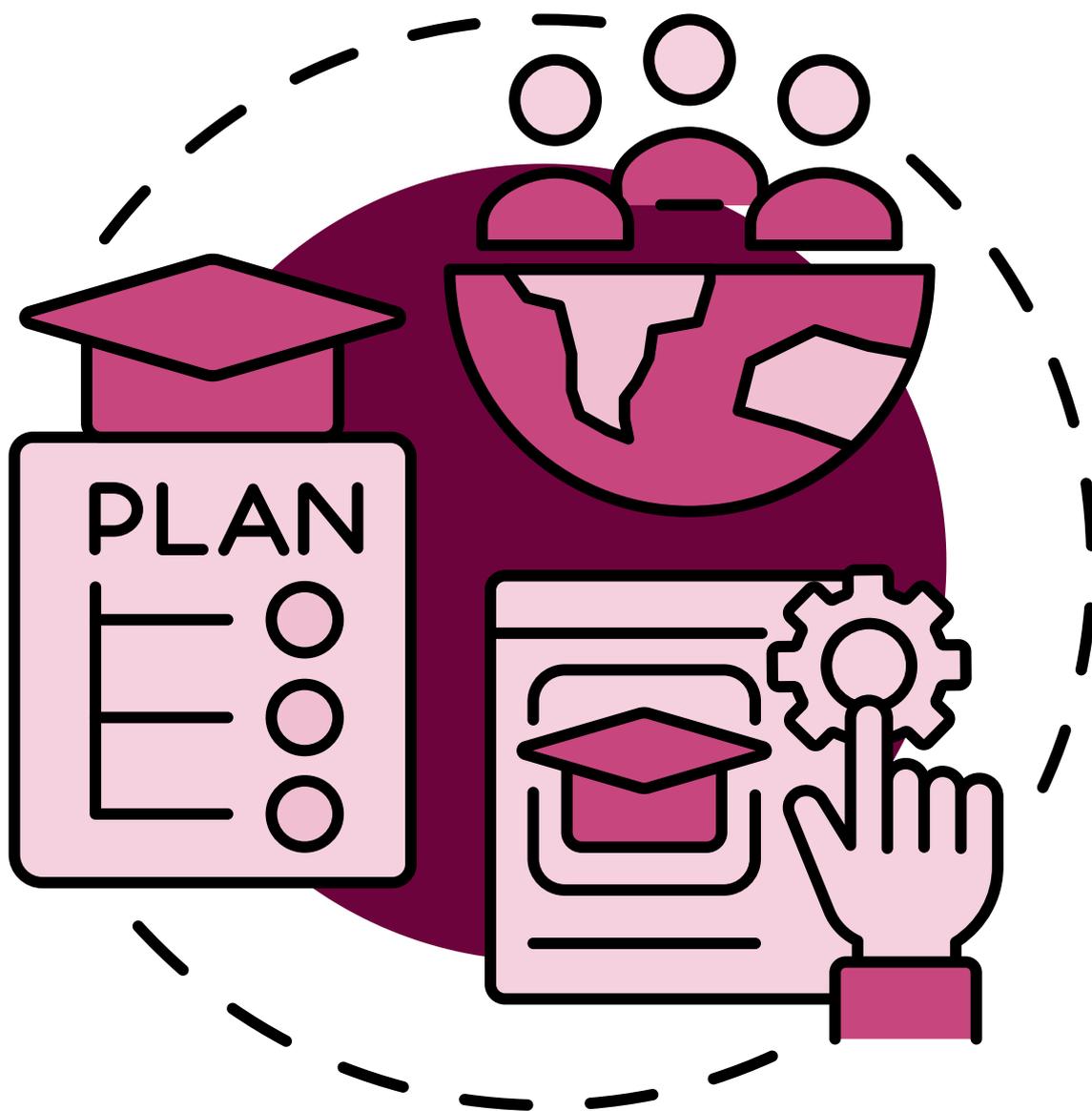
Tantangan lain dalam penyusunan usulan pagu indikatif adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan ideal dan batasan fiskal yang tersedia. Di tengah tekanan untuk melakukan efisiensi anggaran, BSKDN harus mampu menyusun prioritas yang realistis namun tetap berdampak. Dalam hal ini, pendekatan value for money menjadi krusial – setiap usulan anggaran harus mampu menunjukkan nilai manfaat yang lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan.

Pada akhirnya, perencanaan program anggaran yang dilakukan dengan pendekatan strategis bukan hanya akan menghasilkan usulan pagu indikatif yang kuat, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan BSKDN ke arah yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel. Proses ini juga menjadi refleksi dari perubahan paradigma birokrasi, di mana anggaran tidak lagi hanya sebagai alat belanja, tetapi sebagai instrumen perubahan.

Dengan perencanaan yang matang, terukur, dan kolaboratif, BSKDN dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diusulkan dalam pagu indikatif benar-benar berkontribusi terhadap penguatan kebijakan dalam negeri. Ini bukan sekadar tentang angka-angka, melainkan tentang dampak, perubahan, dan arah masa depan birokrasi yang lebih responsif dan strategis.



PROGRAM DAN ANGGARAN





Upaya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Melalui Monitoring dan Evaluasi untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional



Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) merupakan salah satu instansi dan unsur penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berperan strategis dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi kebijakan dalam negeri. Dalam menjalankan fungsinya, BSKDN tidak hanya menyusun strategi kebijakan, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

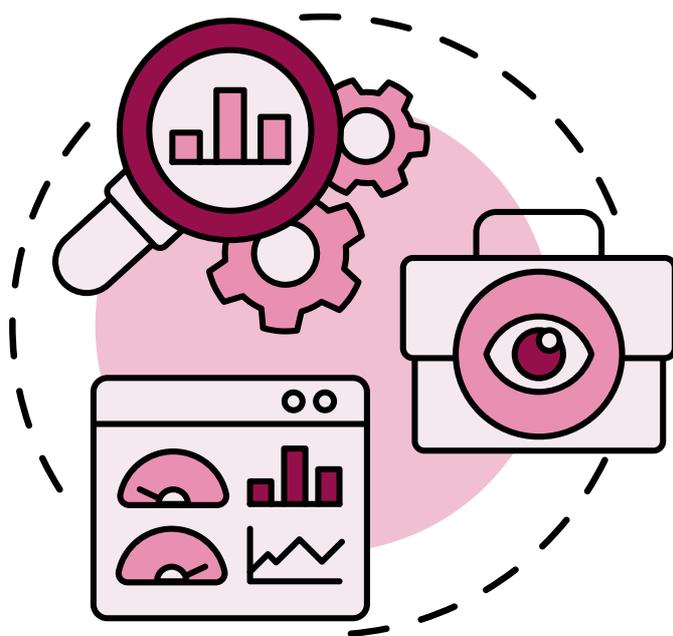
Peran Monitoring dan Evaluasi dalam Strategi Kebijakan

Monitoring dan evaluasi merupakan dua komponen penting dalam siklus kebijakan publik. Monitoring berfokus pada pengawasan pelaksanaan kebijakan secara real time, sementara evaluasi bertujuan menilai dampak, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan yang telah diterapkan. BSKDN memanfaatkan mekanisme monev sebagai alat untuk:

1. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah dan Pusat, Dengan menganalisis capaian kinerja instansi pemerintahan, BSKDN dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian kebijakan agar lebih tepat sasaran.
2. Mengidentifikasi Hambatan Implementasi Kebijakan, Monev memungkinkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun kultural.
3. Mengukur Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat, Evaluasi yang menyeluruh memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta apakah terjadi peningkatan kesejahteraan atau tidak.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Dengan pelaporan hasil monev secara berkala, BSKDN turut mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Strategi BSKDN dalam Meningkatkan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi

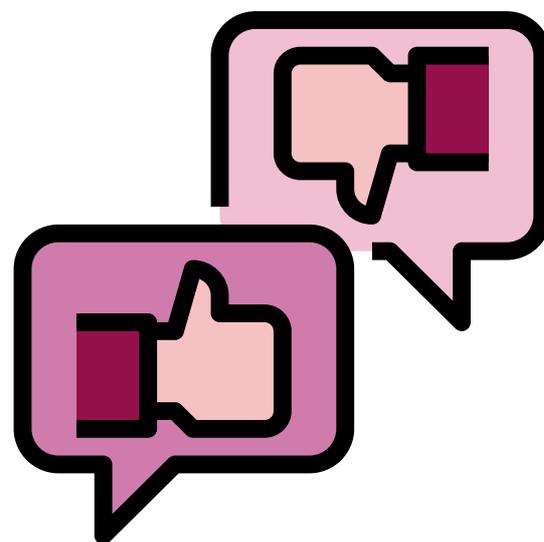
1. Digitalisasi Sistem Monitoring, Penggunaan platform digital untuk pelaporan dan analisis data menjadikan proses monev lebih cepat, akurat, dan terintegrasi antar lembaga.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, BSKDN secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur negara dalam hal monev dan analisis kebijakan berbasis data.
3. Kolaborasi Multipihak, Dalam pelaksanaan monev, BSKDN juga melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan objektif.



Dampak Positif Monev terhadap Tujuan Pembangunan Nasional

Upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BSKDN telah membantu mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih terarah dan terukur. Hasil monev digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan, sehingga proses perumusan kebijakan menjadi adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Dengan pendekatan berbasis bukti dan evaluasi berkelanjutan, BSKDN memperkuat peran strategisnya dalam memastikan bahwa kebijakan dalam negeri tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

MONITORING DAN EVALUASI





Membangun Fondasi Kebijakan yang Kuat: Peran Layanan Hukum dan Kerja Sama di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



Dalam era tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis, penyusunan strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Di tengah kebutuhan tersebut, layanan hukum dan kerja sama menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lintas sektor dan aktor. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) hadir sebagai institusi yang memainkan peran strategis dalam mengorkestrasi proses tersebut.

Layanan Hukum: Menjamin Kepastian dan Kepatuhan Regulasi

Layanan hukum di BSKDN bertugas untuk memastikan bahwa setiap strategi, kebijakan, maupun rekomendasi yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi telaahan yuridis, harmonisasi regulasi, serta pendampingan hukum dalam proses penyusunan kebijakan, layanan hukum berperan sebagai garda depan dalam menjamin kepastian hukum,

akuntabilitas, dan legitimasi dari setiap inisiatif strategis. Tak hanya itu, layanan hukum juga mendukung proses perumusan kebijakan berbasis bukti dengan memberikan analisis normatif atas isu-isu strategis yang berkembang. Hal ini penting untuk menghindari potensi tumpang tindih kebijakan dan memastikan keberlanjutan implementasi di tingkat daerah maupun pusat. Fungsi ini mencakup:

- Analisis Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan: Melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu strategis pemerintahan dalam negeri guna memastikan konsistensi kebijakan dengan kerangka hukum nasional.
- Penyusunan Naskah Hukum : Mendukung penyusunan draf regulasi, pedoman, dan perangkat hukum lainnya yang diperlukan dalam perumusan kebijakan strategis.
- Evaluasi Aspek Hukum Kebijakan Melakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan dari aspek kepatuhan hukum, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

MATRIKS RANCANGAN USULAN KERANGKA REGULASI TAHUN 2025 – 2029
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Pasal 34; 35; 36 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat BSKDN	BRIN, LAN	2025
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Perubahan instrumen penilaian	Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemdagri		2025
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan instrumen penilaian	Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa	Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Kementerian Keuangan	2025
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah	Belum diaturnya ketentuan tentang pembinaan inovasi daerah	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri	BRIN, LAN, KemenPAN RB	2025
5.	Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perlunya pengaturan tentang penguatan strategi kebijakan di daerah dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, melalui pembinaan dan pengawasan pada penyusunan kebijakan daerah yang berdasarkan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Sekretariat BSKDN	Ditjen Otda Kemendagri , Biro Ortala Setjen Kemendagri , BRIN, LAN	2026
6.	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Pasal 24 PP Nomor 38 Tahun 2017 masih menyebutkan Badan Litbang Kemendagri	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri	BRIN, LAN, KemenPAN RB	2026
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Badan Strategi Kebijakan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota	Belum adanya Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di daerah	Sekretariat BSKDN	Ditjen Otda Kemendagri , Biro Ortala Setjen Kemendagri , BRIN, LAN	2027
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dalam rangka menegaskan pembagian <i>positioning</i> BRIN dengan BSKDN Kemendagri, terkait dengan aspirasi daerah agar pembinaan dan pengawasan OPD penyusun rekomendasi kebijakan tetap dilaksanakan oleh Kemendagr sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan	Sekretariat BSKDN	Ditjen Otda Kemendagri , Biro Ortala Setjen Kemendagri , BRIN	2027

NO.	MITRA KERJA SAMA	RUANG LINGKUP
1	BRIN – Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (ORTKPEK)	<ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi riset dan analisis kebijakan Penyelenggaraan seminar/lokakarya
2	UNIVERSITAS LAMPUNG	<ul style="list-style-type: none"> Program MBKM Publikasi karya ilmiah pada Jurnal Bina Praja
3	TANOTO FOUNDATION	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi inovasi pendidikan; Pembinaan inovasi Pendidikan
4	USAID-ERAT	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan teknis pembaruan IPKD Dukungan teknis penyusunan ITKPD Dukungan pembinaan inovasi daerah
5	INHA UNIVERSITY (INCHEON GLOBAL CAMPUS)	Peningkatan kapasitas ASN untuk analisis kebijakan dan peningkatan pemahaman digitalisasi pemerintahan (<i>shortcourse</i>)
6	KOMPAS TV	Kolaborasi pembuatan konten publikasi
9	YAYASAN NUSANTARA SEJATI/KOSO NIPPON	Program Review pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat tingkat Desa
10	MONASH UNIVERSITY INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi riset dan analisis kebijakan Penyelenggaraan seminar/lokakarya
11	SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas ASN untuk analisis kebijakan Analisis peningkatan kualitas pelayanan publik
12	IRONWOOD INSTITUTE	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge sharing terkait Hortikultura dan Agribisnis Peningkatan kapasitas ASN pelaksana urusan pertanian
13.	PT. Panen Lestari Mahkota Nusantara (PARIMANTA)	<ul style="list-style-type: none"> Replikasi inovasi pengelolaan BBM bersubsidi tepat sasaran.



Sinergi Layanan Hukum dan Kerja Sama: Pilar Transformasi Kebijakan

Integrasi antara layanan hukum dan kerja sama menjadi fondasi penting dalam membangun kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Layanan hukum memberikan landasan kepatuhan dan kejelasan norma, sedangkan kerja sama membuka ruang inovasi dan kolaborasi lintas batas. Sinergi keduanya memperkuat posisi BSKDN sebagai pusat unggulan dalam penyusunan strategi kebijakan dalam negeri yang adaptif, legal, dan kolaboratif.

Ke depan, BSKDN akan terus mengembangkan model-model layanan hukum dan kerja sama yang proaktif, inklusif, dan berbasis teknologi, guna menjawab tantangan kebijakan dalam negeri yang semakin kompleks dan multidimensi.



HUKUM DAN KERJASAMA



GALERI





BAGREN

GALERI





BAGREN

Parararunten! Nasi Timbel Makanan Khas Jawa Barat



Tak ada habisnya kita membahas makanan khas Sunda. Salah satu yang menjadi ciri khas dan selalu ada di setiap restoran Sunda yaitu nasi timbel atau dalam bahasa Sunda disebut sangu timbel. Ciri khasnya dari nasi ini adalah dibungkus daun pisang. Nasi timbel adalah nasi yang dibungkus daun pisang dan dibentuk bulat lonjong. Bagi masyarakat Sunda, nasi timbel menggambarkan suasana pedesaan.

Yang menarik, orang Sunda memiliki kebiasaan jika bepergian jauh kerap membawa bekal nasi timbel ini karena hemat dan praktis. Umumnya, nasi timbel merupakan makanan yang dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah karena dulu piring masih sulit ditemukan. Sehingga masyarakat harus menggunakan daun sebagai alas makan.

Sate Bandeng: Makanan Tradisional Khas Banten

Cara pengolahan dan pembakaran yang khas membuat sate ini bisa dinikmati oleh siapa pun. Cara itu juga tak membuat gizinya hilang banyak. Tapi cara itu memang lebih merepotkan. Karena itulah tak semua orang mampu dan mau menggunakannya. Para juru masak mewariskan teknik-teknik membuat sate bandeng kepada keturunannya. Inilah mengapa sate bandeng sering menjadi usaha turun-temurun.

Sekarang, sate bandeng biasa disajikan dalam bentuk diasapi dan dikukus. Tapi ada juga yang menggorengnya. Soal rasa, kita bisa memilih rasa orisinal atau yang pedas. Karena cara pembuatannya yang khas serta cita rasanya yang gurih dan enak, sate bandeng sering menjadi pilihan oleh-oleh para wisatawan.



Icip Makanan Khas Makasar Sop Konro, Enak Mentong!



Sop Konro merupakan hidangan wajib saat pesta, dimana ada ritual, warga memotong kerbau yang kemudian mengambil bagian tulang lalu dimasak dengan bumbu yang sederhana atau biasa disebut dengan Pallu Konro atau Pallu Buku.

Konro aslinya dimasak berkuah dalam bentuk sup yang kaya rempah, akan tetapi kini terdapat variasi kering yang disebut "Konro bakar" yaitu iga sapi bakar dengan bumbu khas konro. Konro bakar biasanya juga disajikan dengan disertai kuah sup yang terpisah. Rasa pedas dan berbumbu ini dibuat dari campuran rempah-rempah, seperti ketumbar, keluwak (buah yang menyebabkan masakan berwarna hitam), sedikit pala, kunyit, kencur, kayu manis, asam, daun lemon, cengkih, dan daun salam.

Makanan Khas Kalimantan Utara: Kepiting Soka

Kepiting soka, atau kepiting cangkang lunak, adalah kuliner khas Tarakan, Kalimantan Utara, yang terkenal karena cangkangnya yang lunak dan bisa dimakan seluruhnya, serta rasanya yang lezat dan kaya manfaat.

Kepiting Soka kaya akan manfaat bagi tubuh yaitu kepiting soka sangat rendah lemak, memiliki sumber mineral yang tinggi, protein tinggi dan juga banyak mengandung vitamin yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ahli gizi menyarankan setidaknya mengonsumsi daging kepiting dua atau tiga kali seminggu.



Tr
Bha
for

uly
teful
you.